

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat pernyataan keaslian Tesis
2. Instrumen pedoman pengumpulan data (Dokumentasi, Observasi dan Wawancara)
3. Outline PAK
4. Contoh SAP/RPP
5. Surat keterangan melakukan penelitian
6. Daftar riwayat hidup penulis



**SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
TARBIYAH STAI AL-QODIRI JEMBER**

Perguruan Tinggi : STAI Al-Qodiri Jember
Semester : I / Ganjil
Matakuliah : Pendidikan Antikorupsi
Pertemuan : 5
SKS : 3
Alokasi Waktu : 3 x 45 menit

A. Kompetensi Dasar :

Menjelaskan pembelajaran pendidikan anti korupsi di sekolah dan pesantren

B. Materi Pokok

Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah dan Pesantren

C. Tujuan Perkuliahan:

1. Mendiskripsikan pembelajaran pendidikan anti korupsi di sekolah umum dan agama
2. Mendiskripsikan pembelajaran pendidikan anti korupsi di pesantren
3. Mengidentifikasi contoh-contoh kegiatan pembelajaran pendidikan anti korupsi di sekolah dan pesantren.
4. Mengobservasi indikasi-indikasi pembelajaran pendidikan anti korupsi di sekolah dan pesantren.

D. Metode Perkuliahan:

1. Presentasi dan Diskusi
2. Demosntrasi
3. Inquiriy
4. Pembelajaran Berbasis Masalah

E. Kegiatan Perkuliahan:

TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN
(1)	(2)	(4)
Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan salam pembuka dan berdo'a bersama dipimpin oleh salah satu peserta didik dengan khusyu'. b. Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai c. Menghubungkan materi yang didiskusikan dengan realitas kehidupan dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan dengan materi 	SAP, Silabus, Text Book, Tugas Terstruktur, Diktat, Slide Presentasi
Penyajian/Inti	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan kesempatan kepada satu kelompok untuk mempresentasikan tugas kelompoknya b. Mahasiswa mempresentasikan hasil tugas kelompoknya tentang pembelajaran pendidikan anti korupsi di sekolah (umum dan agama) dan pesantren serta contoh-contoh kegiatan pembelajaran pendidikan anti korupsi di sekolah dan pesantren. c. Kelompok mahasiswa tersebut memberi kesempatan pada mahasiswa yang lain untuk bertanya dan memberikan sanggahan d. Kelompok mahasiswa tersebut memberi kesimpulan e. Dosen memberikan klarifikasi, tambahan penjelasan, dan kesimpulan f. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. 	Idem
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengajak semua mahasiswa untuk membuat analisis dan kesimpulan sendiri dan hasilnya diletakkan dalam portofolio. b. Menugaskan mahasiswa untuk observasi indikasi-indikasi pembelajaran pendidikan anti korupsi di sekolah dan pesantren c. Memberikan motivasi dan saran agar mahasiswa menjauhi korupsi tersebut. d. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya e. Memberikan salam penutup 	Idem

F. Sumber Belajar

Berbagai daftar pustakan yang ada di outline

G. Penilaian

1. Keaktifan dalam diskusi
2. Hasil Tugas Kelompok Berbentuk Makalah
3. Hasil Observasi di sekolah dan pesantren.

Dosen Pengampu,

Jember, 17 Maret 2016
Ketua Jurusan Tarbiyah

Dina Tsalist Wildana, LLM

Nurul Anam, M.Pd.

IAIN JEMBER

**SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
TARBIYAH STAI AL-QODIRI JEMBER**

Perguruan Tinggi : STAI Al-Qodiri Jember
Semester : I / Ganjil
Matakuliah : Pendidikan Antikorupsi
Pertemuan : 9
SKS : 3
Alokasi Waktu : 3 x 45 menit

A. Kompetensi Dasar :

Menjelaskan kasus-kasus korupsi di Kemenag dan solusinya

B. Materi Pokok

Kasus-Kasus Korupsi Di Kemenag Dan Solusinya

C. Tujuan Perkuliahan:

1. Menjelaskan kasus-kasus korupsi di Kemenag dari berbagai sumber
2. Mendemonstrasikan atau memberikan contoh melalui gambar atau video contoh kasus-kasus korupsi di Kemenag.
3. Menganalisis kasus-kasus korupsi di Kemenag
4. Merumuskan dan menjelaskan solusi untuk mengatasi kasus-kasus korupsi di Kemenag

D. Metode Perkuliahan:

1. Presentasi dan Diskusi
2. Demosntrasi
3. Inquiry
4. Pembelajaran Berbasis Masalah

E. Kegiatan Perkuliahan:

TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN
(1)	(2)	(4)
Pembukaan	<ol style="list-style-type: none">Memberikan salam pembuka dan berdo'a bersama dipimpin oleh salah satu peserta didik dengan khusyu'.Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapaiMenghubungkan materi yang didiskusikan dengan realitas kehidupan dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan dengan materi	SAP, Silabus, Text Book, Tugas Terstruktur, Diktat, Slide Presentasi
Penyajian/Inti	<ol style="list-style-type: none">Memanggil dan memberikan kesempatan kepada satu kelompok untuk mempresentasikan tugas kelompoknyaMahasiswa mempresentasikan hasil tugas kelompoknyaKelompok mahasiswa tersebut memberi kesempatan pada mahasiswa yang lain untuk bertanya dan memberikan sanggahanKelompok mahasiswa tersebut memberi kesimpulanDosen memberikan klarifikasi, tambahan penjelasan, dan kesimpulanMemberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya.	Idem
Penutup	<ol style="list-style-type: none">Mengajak semua mahasiswa untuk membuat analisis dan kesimpulan sendiri dan hasilnya diletakkan dalam portofolio.Memberikan motivasi dan saran agar mahasiswa menjauhi korupsi tersebut.Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnyaMemberikan salam penutup	Idem

F. Sumber Belajar

Berbagai daftar pustakan yang ada di outline

G. Penilaian

1. Keaktifan dalam diskusi
2. Hasil tugas kelompok
3. Hasil analisis dan kesimpulan tiap mahasiswa terhadap kasus-kasus korupsi di Kemenag dan solusinya
4. Portofolio.

Dosen Pengampu,

Jember, 14 April 2016
Ketua Jurusan Tarbiyah

Dina Tsalist Wildana, LLM

Nurul Anam, M.Pd.

IAIN JEMBER

OUTLINE

MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

A. Identitas

Dosen : Dina Tsalist Wildana, LLM
Jurusan : Tarbiyah
Mata Kuliah : Pendidikan Anti Korupsi
SKS : 3 (Tiga) SKS

B. Rasionalisasi

Kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak ada artinya ketika terdapat data yang menunjukkan bahwa penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,55 juta jiwa. Salah satu faktornya adalah perilaku korupsi yang mengakar kuat pada masyarakat terutama para pejabat yang ada di Indonesia. Hasil survei Lembaga Transparency Internasional Indonesia (TII) menunjukkan bahwa Indonesia berada di empat negara terbawah dalam urutan tingkat korupsi dan semakin memburuk dibanding survey dua tahun lalu, yaitu menempati urutan 111.

Data ini membuktikan bahwa perkembangan korupsi di Indonesia mempunyai dampak yang sangat massif. Tindakan korupsi merupakan perilaku yang sangat biadab. Sebagai upaya pencegahan, KPK bekerjasama dengan Kemendikbud dan Kemenag RI untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi dan pesantren). Pendidikan anti korupsi merupakan suatu proses pewarisan budaya yang dilaksanakan dengan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif dan berkarakter, sehingga peserta didik memiliki kepribadian dan sikap yang kuat untuk melawan berbagai bentuk korupsi. Proses pendidikan ini ingin mewujudkan *out put* yang mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi, mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut, dan mampu mendeteksi adanya tindak korupsi.

C. Standar Kompetensi

Setelah selesai mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa diharapkan mengetahui, memahami dan mengimplementasikan sikap anti korupsi sehari-hari.

D. Strategi Perkuliahan

- a. Tatap Muka
 - ✓ Ceramah dan tanya jawab
 - ✓ Diskusi dan Presentasi
 - ✓ Demonstrasi
 - ✓ Inquiry
 - ✓ portofolio
 - ✓ Pembelajaran Berbasis Masalah
 - ✓ dsb.

- b. Non Tatap Muka
 - ✓ Tugas Individu
 - ✓ Tugas Kelompok
 - ✓ Sosialisasi PAK

E. Rencana Kuliah

NO	MATERI	PENANGGUNG JAWAB
1	Intro Mata Kuliah dan Kontrak Belaya	DOSEN & MAHASISWA
2	Pengertian, bentuk-bentuk, penyebab dan dampak terjadinya korupsi	DOSEN & MAHASISWA
3	Sejarah, bentuk-bentuk dan dinamika eksistensi korupsi di Indonesia	MAHASISWA
4	Pengertian, arah orientasi dan nilai-nilai dasar acuan pendidikan anti korupsi di Indonesia dan pendidikan anti korupsi di berbagai Negara	MAHASISWA
5	Pembelajaran pendidikan anti korupsi di sekolah dan pesantren	MAHASISWA
6	Kasus-kasus korupsi di Anggota Dewan dan solusinya	MAHASISWA
7	UTS	DOSEN
8	Kasus-kasus korupsi di Kemendikbud dan solusinya	MAHASISWA
9	Kasus-kasus korupsi di Kemenag dan solusinya	MAHASISWA
10	Kasus-kasus korupsi di Kemenpora dan solusinya	MAHASISWA
11	Kasus-kasus korupsi di pemerintah daerah dan solusinya	MAHASISWA
12	Kasus-kasus korupsi di lembaga-lembaga hukum dan solusinya	MAHASISWA
13	Sosialisasi PAK pada anak SMK, MA, dan MTs.	MAHASISWA
14	UAS	DOSEN

F. Penilaian

1. Penilaian proses (Fleksibel)

- a. Kehadiran
- b. Keaktifan
- c. Tugas Individu (observasi, member kesimpulan dan solusi, serta porto folio)
- d. Tugas dan Diskusi Kelompok

2. Penilaian hasil

- a. UTS (Esai)
- b. UAS (Esai)

G. Sumber Rujukan

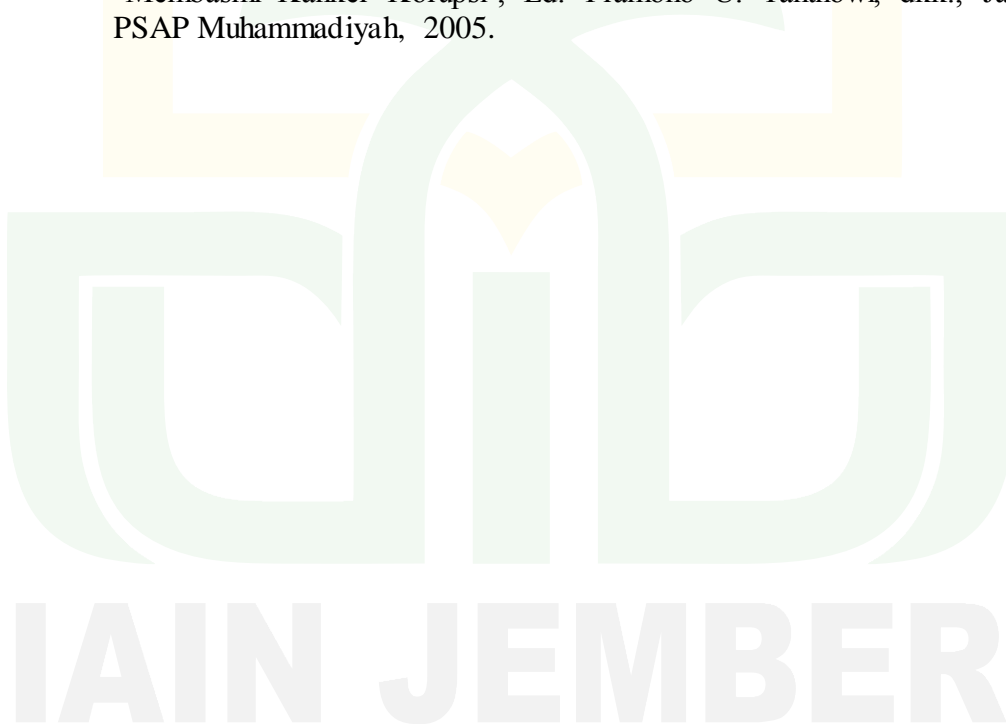
Buku Primer

- Nurul Anam, "Pendidikan Anti Korupsi: Konsep dan Aplikasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perguruan Tinggi dan Pesantren", [Penerbit STAIN Press 2014].
- Nurul Anam, "Pendidikan Anti Korupsi di Pesantren: Nilai-nilai Dasar dan Desain Pembelajaran", [Buku Proceeding di acara Internasional Internasional ICON IMAD 3 UIN Pasca Bandung dan Universitas Malaya Malaysia 2013];
- Nurul Anam, "Pendidikan Teoantroposentis-Indonesiaistik: Membangun Peradaban Bangsa Indonesia melalui Paradigma Pendidikan Pesantren yang Kritis Transformatif, Integratif yang Dialektis dan Berkarakter Indonesia", [Buku Bunga Rampai Diterbitkan oleh Puslitbang Kemenag RI 2011];
- Nurul Anam, "Pendidikan Humanistik: Titik Temu antara Pemikiran Paolo Freire dan KH. A. Wahid Hasyim", [Buku Bunga Rampai Diterbitkan oleh Pesantren Tebuireng pada acara 1 Abad KH. Abdul Wahid Hasyim 2011];
- Nurul Anam, "Mengurai "Benang Kusut" Transformasi Pendidikan Pesantren: Respon terhadap persoalan-persoalan yang belum terselesaikan pada konteks internal, nasional dan global (modern dan postmodern)", [Penerbit STAIQOD PRESS Jember 2014];

Buku Sekunder

- Kemendibud, *Integrasi Pendidikan Anti Korupsi pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan SD/MI Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2011.
- , *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian, 2011.
- Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah*, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013.
- , *Pedoman Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2013*, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013.
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2011.
- Ki Supriyoko, *Peran Pendidikan dalam Mencegah Timbulnya Mental Korupsi Anak Bangsa Indonesia*, dalam Buku, "Agama sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global", Ed. Moh. Asror Yusuf, Yogyakarta: IRCISoD, 2006.

- King, Dwight Y., *Korupsi di Indonesia: Kanker yang Dapat Diobati?*, dalam Buku, "Membasmi Kanker Korupsi", Ed. Pramono U. Tanthowi, dkk., Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.
- Kleden, Ignas, *Wacana tentang Korupsi dan Habermas tentang Wacana*, dalam buku, *Korupsi Kemanusiaan: Menafsirkan Korupsi (dalam) Masyarakat*, Ed. Al. Andang L. Binawan, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Klitgaard, Robert, *Controlling Corruption*, terj. Hermojo, cet. ke III, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*, Bandung: Citra Umbara, 2010.
- Tilaar, HAR, *Pemberantasan Korupsi Melalui Sisdiknas?*, Jurnal Dinamika Masyarakat, Vol. VIII, Jakarta, 2004.
- Wahid, Abdurrahman, *Prolog: Pondok Pesantren Masa Depan*, Di dalam Buku yang berjudul, *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Editor Marzuki Wahid, dkk., Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Widjoyanto, Bambang, "Menggagas" *Gerakan Sosial Anti Korupsi*, dalam Buku, "Membasmi Kanker Korupsi", Ed. Pramono U. Tanthowi, dkk., Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.





SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL-QODIRI JEMBER

Terakreditasi BAN-PT ; Nomor : 168/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014
Sekretariat : Jl.Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161- Patrang Jember 68117
Telp. 0331- 412034, Fax. 0331-427490,485692

Nomor : 234/ SPL/staiqod/SP/VI/2016

Jember, 7 Juni 2016

Lampiran : -

Perihal : **Keterangan Melakukan Penelitian**

Kepada Yth :

Direktur Pascasarjana IAIN Jember

Di -

T e m p a t

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Ketua STAI Al-Qodiri Jember, menerangkan bahwa:

Nama : Umi Nurhayati

NIM. : 0849113090

Perguruan Tinggi : Pascasarjana S2 IAIN Jember

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa peneliti bersangkutan telah melakukan penelitian di STAI Al-Qodiri Jember dengan judul penelitiannya, **"Manajemen Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri"**.

Demikian surat pernyataan telah melaksanakan penelitian ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Ketua

STAI Al-Qodiri Jember

IAIN JEMBER

Asmad, S.Pd.I, M.M.

NIY. 065.2003.09.01

RIWAYAT HIDUP

Umi Nurhayati dilahirkan di Wuluhan Jember Jawa Timur tanggal 18 Desember 1983, anak kedua dari dua bersaudara, pasangan Bapak Dzulqarnain dan Ibu Sudartik. Pendidikan dasar di SDN 04 Kesilir Wuluhan tahun 1996 kemudian melanjutkan SMP Negeri 2 Ambulu (lulus tahun 1999), Madrasah Aliyah (lulus tahun 2003) di Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember, dan mulai mondok di pondok tersebut tahun 2000 s.d 2008.

Pendidikan berikutnya di tempuh di STAI Al-Qodiri Jember dan lulus tahun 2010. Pada saat ini sedang menempuh Program Pascasarjana IAIN Jember 2014-2016. Kariernya sebagai tenaga pegawai dimulai tahun 2009. Sedangkan tenaga pengajar di madrasah diniyah Al-Qodiri Jember pada tahun 2008.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan sebagai wadah terbaik bagi masa depan suatu bangsa. Melalui proses pendidikan akan tercipta suatu generasi terbaik untuk mengembangkan dan memajukan suatu bangsa termasuk juga bangsa Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 dan 3, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.¹

Pendidikan di Indonesia memiliki arah dan misi yang jelas yaitu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

¹ Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Wajib Belajar* (Bandung: Citra Umbara, 2011), 2-3.

² *Ibid.*,6.

Driyarkara merumuskan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia muda, yaitu suatu pengangkatan manusia muda ke taraf insani sehingga ia dapat menjalankan hidupnya sebagai manusia utuh dan membudayakan diri. Pendidikan sebagai proses hominisasi dan humanisasi membantu manusia muda untuk berkembang menjadi manusia utuh, bermoral, bersosial, berwatak berpribadi, berpengetahuan, dan beruhani.³

Namun, pada kenyataannya sampai saat ini, pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberi dampak bagi pembentukan karakter masyarakat Indonesia termasuk juga karakter antikorupsi. Ini dibuktikan dengan publikasi Tempo (11 Juli 2013) tentang hasil survey yang dirilis oleh Lembaga Transparency Internasional Indonesia (TII), Indonesia berada di empat negara terbawah dalam urutan tingkat korupsi dan semakin memburuk disbanding survey dua tahun lalu, yaitu menempati urutan 111 dalam urutan negara terkorup dan Indonesia berada di bawah Thailand (urutan 88) dan Filipina (urutan 108). Sedangkan tiga negara di bawah Indonesia antara lain Vietnam, Laos dan Myanmar.⁴

Selain itu, kenyataan ini melegalkan kesan bahwa korupsi sudah menjadi “*new culture*” di Indonesia dan sulit untuk diminimalisir, karena korupsi sudah menjalar hingga institusi-institusi masyarakat terkecil. Korupsi sudah tidak lagi selalu berkait dengan penyimpangan dalam birokrasi struktural, namun juga telah mengakar dalam budaya hidup sehari-hari masyarakat. Ironisnya, lembaga

³ Benni Setiawan, *Agenda Pendidikan Nasional*. (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2008), 11.

⁴ Nurul Anam, *Pendidikan Anti Korupsi di Pesantren: Konsep Nilai dan Desain Pembelajaran*, (Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM), 2013), 261.

pendidikan yang diharapkan juga mampu melahirkan sosok yang bersih ternyata juga menjadi sarang korupsi.

Korupsi bidang pendidikan di Indonesia hampir terjadi di semua level penyelenggaraan pendidikan dengan pola lama dan baru yang dilakukan unsur birokrasi dan lembaga pendidikan, bahkan sekecil apapun dana pendidikan itu selalu menjadi target korupsi akibat pengawasan yang tidak berjalan efektif. Sebagaimana dalam berita Kompas (1 Oktober 2013), dijelaskan bahwa beberapa laporan dugaan korupsi di lembaga pendidikan, Badan Pengawasan Daerah (Banwasda) justru melindungi rezim korup Dinas Pendidikan dan diperparah lagi tidak ada inisiatif reformasi birokrasi untuk mencegah korupsi pendidikan, bahkan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan menemukan transaksi keuangan tidak sah dari sekelas pegawai kemendikbud yang ditengarai memiliki uang sebanyak Rp. 5 Miliar setelah.⁵ Selain itu, mekanisme penyaluran dana pendidikan seperti Biaya Operasional Lembaga pendidikan (BOS) juga rawan dimanipulasi. Sementara institusi baru didominasi birokrasi pendidikan dan kepala lembaga pendidikan yang akhirnya komite lembaga pendidikan malah melegitimasi berbagai pungutan di lembaga pendidikan.

Menurut Agus Wibowo,⁶ karakter bangsa terutama yang dimiliki peserta didik tengah terdegradasi. Hal ini ditandai dengan praktik plagiasi, perjokian Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), perjokian Ujian Nasional (UN), dan praktik korupsi yang kental mewarnai kehidupan kenegaraan

⁵ Kompas, 1 Oktober 2013

⁶ Wibowo, *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), v.

kita. Semua itu, hanya sekian dari contoh “amburadulnya” moralitas dan karakter bangsa Indonesia saat ini.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah merumuskan dan melaksanakan pendidikan antikorupsi di lembaga pendidikan. Menurut Faisal Djabbar⁷, ide memasukkan materi antikorupsi dalam kurikulum lembaga pendidikan seperti lembaga pendidikan dan per dosenan tinggi mendapat respon positif masyarakat. Hasil jajak pendapat harian “Seputar Indonesia” tanggal 27 Mei 2011 terhadap 400 responden, sebanyak 87% menyatakan perlunya memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum. Keyakinan masyarakat juga relatif besar, hampir 200 responden menyatakan keyakinannya bahwa pendidikan antikorupsi bisa berjalan efektif membendung perilaku korupsi di Indonesia.

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di lembaga pendidikan tidak hanya di lembaga lembaga pendidikan, tapi juga di perguruan tinggi. Karena pendidikan antikorupsi sangat urgen diterapkan, maka di perguruan tinggi, pendidikan antikorupsi menjadi matakuliah tersendiri. Matakuliah Pendidikan antikorupsi hadir sebagai solusi problem moralitas dan karakter itu dengan menciptakan mahasiswa sebagai generasi antikorupsi. Menurut Nanang T. Puspito dkk, keterlibatan mahasiswa tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum, tapi keterlibatannya difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Salah satu upaya pencegahan korupsi yaitu dengan proses perkuliahan. Pendidikan antikorupsi dalam dalam proses perkuliahan bertujuan untuk memberikan

⁷ Muhamad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi: Strategi Internalisasi Nilai-nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 33.

pengetahuan tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi.⁸

Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu mencegah dirinya sendiri dan orang lain untuk tidak melakukan tindak korupsi, dan juga mampu mendeteksi indikasi adanya tindak korupsi di sekitar mereka. Dalam hal ini mahasiswa memiliki kompetensi individual yang bermula dari kepemilikan tanggapan negatif mengenai korupsi dan tanggapan positif terhadap antikorupsi serta menguatnya kesadaran mahasiswa akan adanya potensi tindak korupsi dan yang pada akhirnya memiliki sikap antikorupsi. Sikap antikorupsi ini dimungkinkan untuk mempengaruhi lingkungan sekitar di mana mahasiswa berani melakukan pencegahan terhadap orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun.⁹

Supaya proses pembelajaran berjalan dengan baik, maka salah satunya dibutuhkan suatu manajemen pembelajaran yang baik dan efektif. Manajemen pembelajaran itu dalam matakuliah pendidikan antikorupsi sangat penting, karena manajemen pembelajaran mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan bersifat tidak berwujud (*intangibile*). Usahanya ialah mencapai hasil-hasil yang spesifik, biasanya dinyatakan dalam bentuk sasaran-sasaran. Manajemen pembelajaran dapat dinyatakan sebagai tidak berwujud (*intangibile*), karena tidak dapat dilihat,

⁸ Tim Penulis, *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), 23-24.

⁹ Kementerian Agama, *Pedoman Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2013*, (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), 3-4.

tetapi dapat dirasakan hasilnya, yakni output pekerjaan yang cukup, ada kepuasan pribadi, produk dan servisnya lebih baik.¹⁰

Manajemen pembelajaran selalu menyangkut adanya tiga hal yang merupakan unsur penting, yaitu a) usaha kerjasama b) oleh dua orang atau lebih, dan c) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹¹ Menurut Jejen Musfah, dalam manajemen sering disebut istilah mutu, efisiensi dan efektivitas.¹² Apabila manajemennya berjalan dengan baik termasuk juga dalam proses pembelajaran, maka ketiga istilah itu akan tercapai dengan baik. Sebaliknya, jika manajemennya tidak berjalan dengan baik, maka ketiganya tidak akan terwujud.

Karena eksistensi manajemen pembelajaran sangat berperan penting dalam pelaksanaan matakuliah pendidikan antikorupsi, maka dosen-dosen yang ada di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember melakukan langkah-langkah inovatif dalam manajemen pembelajaran pendidikan antikorupsi. Menurut Bapak Irham Bashori, M.HI, sebelum dia merumuskan dan melaksanakan perkuliahan pendidikan antikorupsi di STAI Al-Qodiri Jember, dia melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu agar perkuliahan berjalan dengan efektif. Usaha-usaha persiapannya tersebut tidak hanya bersumber pada buku, tapi juga melakukan diskusi-diskusi dengan dosen-dosen untuk merumuskan dan merencanakan formulasi pendidikan antikorupsi yang akan diterapkan dalam perkuliahan. Selain itu, pelaksanaan pendidikan antikorupsi mengalami pengembangan. Di tahun 2013, aktifitas perkuliahan sekitar 50% berpusat pada mahasiswa dan 50%

¹⁰ George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 9.

¹¹ Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2009), 4.

¹² Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 6-7.

lagi berpusat pada dosen, tetapi pada tahun 2014 aktifitas perkuliahan banyak berpusat pada mahasiswa ketimbang dosen, bahkan mahasiswa disuruh untuk mensosialisasikan pendidikan antikorupsi di lembaga pendidikan MA dan SMK Al-Qodiri Jember.¹³

Dari diskripsi di atas, maka proposal penelitian ini yang berjudul, “Manajemen Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016”, sangat menarik untuk diteliti.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perencanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016?
2. Bagaimana pengorganisasian Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016?
3. Bagaimana pelaksanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016?
4. Bagaimana evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016?

¹³ Observasi dan Wawancara dengan salah satu dosen Matakuliah Pendidikan Anti Korupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember, tanggal 7 februari 2015 dan 27 April 2015.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016.
2. Untuk mendeskripsikan pengorganisasian Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016.
3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016.
4. Untuk mendeskripsikan evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat mengembangkan wawasan pengetahuan terutama tentang manajemen pendidikan antikorupsi di pedosenan tinggi Islam, skill di bidang penelitian serta penulisan karya ilmiah.
2. Bagi Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan serta pengembangan lebih lanjut tentang manajemen pendidikan antikorupsi.
3. Bagi para pengamat, pengkaji dan peneliti yang menaruh atensi terhadap peningkatan dan pengembangan bidang pendidikan terutama tentang manajemen pendidikan antikorupsi di perdosenan tinggi Islam.
4. Bagi Pascasarjana IAIN Jember, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai upaya inovasi ilmiah dan menjadi khazanah keilmuan bagi kajian lebih lanjut.

E. Definisi Judul Penelitian

1. Manajemen Pembelajaran

Secara etimologis, manajemen berasal dari kata kerja bahasa Inggris “*to manage*” yang sinonim dengan *to hand, to control*, dan *to guide* (mendosens, memeriksa, dan memimpin). Untuk itu, dari asal kata ini manajemen dapat diartikan pendosensan, pengendalian, memimpin atau membimbing.¹⁴ Secara terminologi, manajemen adalah sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan, yang dilakukan oleh individu untuk menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁵ Jadi, manajemen merupakan upaya yang terukur yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada evaluasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Pembelajaran secara etimologis berasal dari kata “*instruction*” atau disebut juga kegiatan intruksional (*instructional activities*) adalah usaha mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang belajar berperilaku tertentu dalam kondisi tertentu.¹⁶ Secara terminologi, pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa-siswa belajar. Pembelajaran juga diartikan sebagai sebuah proses perubahan tingkah laku atau sikap yang disebabkan oleh pengalaman. Gagne dan Briggs mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu rangkaian *events* (kondisi, peristiwa, kejadian, dsb) yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi pembelajar,

¹⁴*Ibid.*, 9.

¹⁵ George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009). 9.

¹⁶ Syeb Kurdi dan Abdul Aziz, *Model Pembelajaran Efektif Pendidikan Agama Islam di SD dan MI*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2006), 1.

sehingga proses belajarnya dapat berlangsung mudah.¹⁷ Dengan demikian, pembelajaran adalah proses interaksi yang dirancang dan dilakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga peserta didik dapat mengalami perubahan tingkah laku atau sikap yang disebabkan oleh pengalaman.

Sedangkan manajemen pembelajaran dapat didefinisikan sebagai usaha mengelola (*me-menej*) lingkungan belajar dengan sengaja agar seseorang belajar berperilaku tertentu dalam kondisi tertentu. Jadi, manajemen pembelajaran terbatas pada satu unsur manajemen lembaga pendidikan saja, sedangkan manajemen pendidikan meliputi seluruh komponen sistem pendidikan, bahkan bisa menjangkau sistem yang lebih luas dan besar secara regional, nasional, bahkan internasional.¹⁸

Dari definisi di atas, maka yang dimaksud dengan manajemen pembelajaran adalah sebuah kegiatan pengelolaan pembelajaran yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada evaluasi pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran.

2. Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

Matakuliah pendidikan antikorupsi yang dirumuskan Dirjen Dikti Kemendikbud¹⁹ lebih berorientasi berupa sebuah matakuliah yang berdiri sendiri (*independen*), yang diselenggarakan secara reguler selama satu semester. Matakuliah ini dapat ditetapkan sebagai matakuliah yang bersifat wajib maupun pilihan di dalam kurikulum per dosenan

¹⁷ Permendiknas, No 41 tahun 2007 tentang *Standar Proses*.

¹⁸ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi, dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, cet 1 2002), 39.

¹⁹ Kemendikbud, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian, 2011), 3.

tinggi. Tentu tidak menutup kemungkinan materi dan metode pembelajaran ini nantinya diterapkan juga pada bentuk-bentuk pendidikan di luar matakuliah independen. Sedangkan pendidikan antikorupsi adalah pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik tentang pendidikan antikorupsi. Dalam pendidikan antikorupsi harus mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik).²⁰

Dari definisi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi, maka dapat dirumuskan bahwa Matakuliah Pendidikan Antikorupsi merupakan sebuah matakuliah yang berdiri sendiri (*independen*), yang diselenggarakan secara reguler selama satu semester yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik tentang pendidikan antikorupsi sehingga peserta didik terbiasa bersikap antikorupsi dan menjadi agen antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Maka dari itu, adapun yang dimaksud dengan judul, “Manajemen Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri” adalah suatu kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi untuk menciptakan peserta didik (mahasiswa) yang antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri.

²⁰ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2013), 6.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis dengan judul “Manajemen Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016” ini disajikan berupa urutan yang secara garis besar terdiri: Bab I pendahuluan, berisi uraian tentang konteks penelitian, di mana peneliti menguraikan masalah yang akan diteliti beserta teori-teori pendukungnya yaitu mengenai manajemen pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi. Selain itu juga memaparkan fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II kajian pustaka. Pada bab ini diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yakni penelitian terdahulu dan kajian teoritik. Pada pembahasan penelitian terdahulu dipaparkan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan pada bagian kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan.

Bab III metode penelitian. Pada bagian ini dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian yang dipilih, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data serta bagian terakhir yaitu teknik pengujian keabsahan data.

Bab IV paparan data dan temuan penelitian. Pada bagian ini peneliti mengurai tentang gambaran penyajian data dan analisisnya serta pembahasan temuan-temuan penelitian. Berikutnya pada bagian penyajian dan analisis data peneliti akan mendeskripsikan uraian data dan temuan yang diperoleh setelah

menggunakan berbagai metode penggalan dan kemudian menganalisisnya secara terperinci. Sedangkan pada bagian pembahasan temuan, peneliti akan menguraikan secara deskriptif gagasan peneliti, keterkaitan dan posisi temuan yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian ditafsirkan serta disimpulkan menjadi sebuah teori.

Bab V pembahasan. Bab ini akan membahas temuan-temuan penelitian yang telah dipaparkan pada bab IV dengan tujuan menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan penelitian untuk diintegrasikan ke dalam pengetahuan yang mapan, memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru, dan menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian.

Bab VI penutup. Bab ini terbagi menjadi dua yakni kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, peneliti akan menarik benang merah dari seluruh pembahasan yang terkait langsung dengan fokus dan tujuan penelitian yakni tentang Manajemen Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016, serta ragam bentuk dalam pelaksanaannya. Sedangkan pada bagian saran peneliti akan memberikan saran konstruktif sebagai bahan rekomendasi yang mengacu pada temuan penelitian, pembahasan, serta kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam proposal penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang dijadikan sebagai perbandingan:

1. Apiek Gandamana²¹ dengan penelitiannya yang berjudul, “Implementasi Pendidikan Anti Korupsi melalui Habitiasi dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Siswa untuk Membangun Karakter Siswa: Studi Deskriptif di SMP Negeri 1 Cianjur-Jawa Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) model implementasi pendidikan antikorupsi dilakukan dengan 2 cara yakni, mengintegrasikan materi pendidikan antikorupsi ke dalam mata pelajaran PKn dan model pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas sekolah. (2) Faktor pendukung adalah adanya komitmen yang baik dari seluruh warga sekolah dan orangtua, serta adanya dukungan dari pemerintah. Sedangkan faktor penghambat yaitu kesulitan guru dalam mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam mata pelajaran PKn serta faktor lingkungan yang melihat korupsi sebagai hal yang biasa atau membudaya. (3) Sekolah harus lebih memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti seminar maupun pelatihan tentang pembelajaran

²¹Apiek Gandamana, *Implementasi Pendidikan Anti Korupsimelalui Habitiasi dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Siswa untuk Membangun Karakter Siswa: Studi Deskriptif di SMP Negeri 1 Cianjur-Jawa Barat*. Hasil Penelitian di Program Pascasarjana Prodi IPS Universitas Pendidikan Indonesia, 2014.

antikorupsi, guru lebih sering mempelajari pendidikan antikorupsi agar mendapatkan kemudahan dalam pengintegrasian pendidikan antikorupsi. Dan adanya komitmen yang kuat dari seluruh warga sekolah dan juga pemerintah dalam rangka mendukung implementasi pendidikan antikorupsi tersebut. Kesimpulan penelitian ini pendidikan antikorupsi akan lebih efektif apabila diintegrasikan dengan mata pelajaran PKn dan dilakukan melalui pembiasaan berupa kantin kejujuran sebagai upaya siswa membiasakan berbuat jujur. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemerintah harus mensosialisasikan pendidikan antikorupsi, sekolah harus konsisten melaksanakan program pendidikan antikorupsi, dan Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan mengambil sampel yang lebih besar dan metode penelitian yang berbeda.

Apabila dibanding dengan proposal penelitian ini, penelitian ini sama-sama meneliti tentang pendidikan antikorupsi dan menggunakan pendekatan kualitatif, namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian.

2. Nuriani Laura Malau Gurning²² dengan penelitiannya yang berjudul, “Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Warung Kejujuran Di SMP Keluarga Kudus”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (a) latar belakang warung kejujuran adalah sebagai praktek nyata dari pendidikan antikorupsi yang telah diterima peserta didik dalam pembelajaran pendidikan antikorupsi yang diterima peserta didik. (b)

²² Nuriani Laura Malau Gurning, *Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Warung Kejujuran Di SMP Keluarga Kudus*. Hasil Program Pascasarjana Program Studi Teknologi Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.

warung kejujuran adalah warung yang tidak ada penjaganya, menjual keperluan siswa, Peran wali kelas adalah sebagai fasilitator yang mengajarkan pendidikan antikorupsi di kelas. Evaluasi warung kejujuran dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan dari pengelola dan pengawasan oleh seluruh warga sekolah. Warung kejujuran efektif dipakai sebagai sarana mengimplementasikan pendidikan antikorupsi. (c) hambatan dalam pelaksanaan warung kejujuran masih ada siswa yang melakukan kecurangan, pengelola warung kejujuran masih harus mengajar di kelas, dan kadang muncul rasa jenuh. Usaha mengatasi dengan dengan pemberian pengertian di kelas dalam pembelajaran antikorupsi dan sosialisasi ketika upacara hari Senin, dan sesama guru saling menguatkan ketika mulai muncul rasa jenuh. (5) Warung kejujuran berhasil membentuk karakter siswa yang jujur setidaknya selama mereka sekolah di SMP Keluarga selain itu tapi para guru menyadari bahwa menanamkan nilai kejujuran pada siswa tidaklah semudah membalikkan telapak tangan dan hasilnya tidak dapat dilihat dalam waktu dekat.

Apabila dibanding dengan proposal penelitian ini, penelitian ini sama-sama meneliti tentang pendidikan antikorupsi dan menggunakan pendekatan kualitatif, namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian.

B. Kajian Teori

1. Manajemen Pembelajaran

a. Pengertian Manajemen Pembelajaran

Secara etimologis, kata manajemen (*management*) berarti, pimpinan, direksi dan pendosens, yang diambil dari kata kerja “manage” dalam bahasa perancis berarti tindakan membimbing atau memimpin. Sedangkan dalam bahasa latin, management berasal dari kata “*managiere*” terdiri dari dua kata yaitu manus dan agere. *Manus* Berarti tangan dan “*agere*” berarti melakukan atau melaksanakan.²³

Plunket dkk.²⁴ mendefinisikan manajemen sebagai “*One or more managers individually and collectively setting and achieving goals by exercising related functions(planning organizing staffing leading and controlling) and coordinating various resources(information materials money and people)*”. Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti bahwa manajemen merupakan satu atau lebih manajer yang secara individu maupun bersama-sama menyusun dan mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi-fungsi terkait (perencanaan pengorganisasian penyusunan staf pengarahan dan pengawasan) dan mengkoordinasi berbagai sumber daya (informasi material uang dan orang). Manajer sendiri menurut Plunket dkk. merupakan *people who are allocate and oversee the use of resources*: orang yang mengatur dan mengawasi penggunaan sumber daya.

²³ Purwodarminto Wojowarsito, *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris*, (Jakarta: Hasta, 1974), 6

²⁴ Warren R. Plunkett, dkk., *Management: Meeting and Exceeding Customer Expectations*. 8 Edition. (USA: Thomson South-Western Co, 2005), 5.

Sedangkan Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.²⁵

Sedangkan pembelajaran secara etimologis berasal dari kata “*instruction*” atau disebut juga kegiatan intruksional (*instructional activities*) adalah usaha mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang belajar berperilaku tertentu dalam kondisi tertentu. Kata “*instruction*” mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengajaran (*teaching*). Jika kata pengajaran ada dalam konteks dosen-murid di kelas formal ;pembelajaran (*instruction*) mencakup pula kegiatan belajar mengajar yang tidak mesti-dihadiri dosen secara fisik. Oleh karena itu dalam *instruction* yang di tekankan adalah proses belajar, maka usaha-usaha terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa disebut pembelajaran.²⁶

Pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa-siswa belajar. Pembelajaran juga diartikan sebagai sebuah proses perubahan tingkah laku atau sikap yang disebabkan oleh pengalaman. Belajar menurut Gagne dalam Dahar (1989) dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Belajar pada hakekatnya adalah suatu aktivitas yang mengharapkan perubahan tingkah laku pada diri individu yang sedang

²⁵ Griffin, R., *Business*, 8th Edition. (NJ: Prentice Hall., 2006).

²⁶ Syeb Kurdi dan Abdul Aziz, *Model pembelajaran efektif pendidikan Agama Islam di SD dan MI*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2006), 1.

belajar (Diknas, 2004) Dari konsep belajar muncul istilah pembelajaran. Degeng dalam Wena (2009) mengartikan pembelajaran sebagai upaya membelajarkan siswa. Gagne dan Briggs mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu rangkaian events (kondisi, peristiwa, kejadian, dsb) yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi pembelajar, sehingga proses belajarnya dapat berlangsung mudah (Diknas, 2004).²⁷

Sedangkan manajemen pembelajaran adalah segala usaha pengaturan proses belajar mengajar dalam rangka tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Manajemen program pembelajaran sering disebut dengan manajemen kurikulum dan pembelajaran.²⁸

Manajemen pembelajaran dapat didefinisikan sebagai usaha mengelola (*manage*) lingkungan belajar dengan sengaja agar seseorang belajar berperilaku tertentu dalam kondisi tertentu. Jadi, manajemen pembelajaran terbatas pada satu unsur manajemen lembaga pendidikan saja, sedangkan manajemen pendidikan meliputi seluruh komponen sistem pendidikan, bahkan bisa menjangkau sistem yang lebih luas dan besar secara regional, nasional, bahkan internasional.²⁹

Berdasarkan pemikiran tersebut manajemen pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha ke arah pencapaian tujuan-tujuan melalui aktivitas-aktivitas orang lain, atau membuat sesuatu dikerjakan oleh orang-orang lain berupa peningkatan minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang siswa (orang yang belajar),

²⁷ Permendiknas, No 41 tahun 2007 *tentang Standar Proses*.

²⁸ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 11.

²⁹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konse Strategi, dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, cet 1 2002), 39.

dengan memperluas cakupan aktivitas (tidak terlalu dibatasi), serta mengarah kepada pengembangan gaya hidup di masa mendatang.³⁰

b. Fungsi-fungsi Manajemen Pembelajaran

Menurut George R Terry,³¹ manajemen ialah suatu proses tertentu, terdiri dari *planning, organizing, actuating, controlling* dengan menggunakan dengan menggunakan seni dan ilmu pengetahuan untuk setiap fungsi itu dan merupakan petunjuk dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan terlebih dahulu.

Menurut Made Pidarta manajemen menunjukkan bahwa fungsi atau kegiatan manajemen seperti *planning, organizing, actuating, dan controlling* secara langsung atau tidak langsung selalu bersangkutan dengan unsur manusia. *Planning* dalam manajemen adalah ciptaan manusia, *organizing* adalah mengatur unsur manusia, *actuating* adalah proses menggerakkan manusia-manusia anggota organisasi, sedang *controlling* diadakan agar pelaksanaan manajemen (manusia-manusia) selalu dapat meningkatkan hasilnya.³²

1) Perencanaan Pembelajaran

Dalam perencanaan terdapat *strategic planning* yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan organisasi sehingga organisasi tetap maju dan berkembang.³³ Demikian juga dalam organisasi pembelajaran, pembelajaran tidak

³⁰ Ella Yulaelawati. *Kurikulum dan Pembelajaran. Filosofi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Pakar Raya, 2004), 14.

³¹ Mannulang, *Dasar-dasar Mangement*, (Jakarta: Ghalia, 1976), 6

³² Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta 2004), 32.

³³ Manzini, E. *Sustainable Product Services Development; Workshop Organized by UNEP-WG-SPD en Pioneer industries on Sustainable Services*, (Amsterdam: In The INNES Conference challenge of Sustainable Development, 1996), 34.

akan pernah mencapai tujuan yang diinginkan tanpa ada strategi perencanaan yang bagus.

Dalam konteks pembelajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan.³⁴ PP RI No. 19 Th. 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 20 menjelaskan bahwa; ”Perencanaan proses pembelajaran memiliki silabus, perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”.³⁵

Menurut Wina Sanjaya menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran terdiri atas dua kata, yaitu kata perencanaan dan pembelajaran. Untuk memahami konsep dasar perencanaan pembelajaran, berikut ini terdapat dua pemahaman tentang perencanaan pembelajaran: *pertama*, perencanaan yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus di lakukan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, proses suatu perencanaan harus di mulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus di lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Elly (1979), perencanaan itu pada dasarnya adalah suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang di harapkan.

³⁴ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran : Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 17.

³⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 15.

Dari pendapat di atas, maka setiap perencanaan minimal harus memiliki empat unsure sebagai berikut :

- a) Adanya tujuan yang harus di capai.
- b) Adanya strategi untuk mencapai tujuan.
- c) Sumber daya yang dapat mendukung.
- d) Implementasi setiap keputusan.³⁶

Perencanaan itu dapat bermanfaat bagi dosen sebagai kontrol terhadap diri sendiri agar dapat memperbaiki cara pengajarannya.³⁷ Agar dalam pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik, untuk itu dosen perlu menyusun komponen perangkat perencanaan pembelajaran antara lain sebagai berikut:

- a) Menentukan Alokasi Waktu dan Minggu efektif. Menentukan alokasi waktu pada dasarnya adalah menentukan minggu efektif dalam setiap semester pada satu tahun ajaran. Rencana alokasi waktu berfungsi untuk mengetahui berapa jam waktu efektif yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dalam satu tahun ajaran. Hal ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar minimal yang harus dicapai sesuai dengan rumusan standard isi yang ditetapkan.³⁸
- b) Menyusun Program Tahunan (Prota). Program tahunan (Prota) merupakan rencana program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, yang dikembangkan oleh dosen mata pelajaran yang bersangkutan,

³⁶ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Cet 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 23-24

³⁷ Suryobroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, Cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 27.

³⁸ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Sistem Pembelajaran*, 49.

yakni dengan menetapkan alokasi dalam waktu satu tahun ajaran untuk mencapai tujuan (standar kompetensi dan kompetensi dasar) yang telah ditetapkan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh dosen sebelum tahun ajaran, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya.³⁹

c) Menyusun Program Semester (Promes). Program semester (Promes) merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau Program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensidasar itu dilakukan.⁴⁰

d) Menyusun Silabus Pembelajaran. Silabus adalah bentuk pengembangan dan penjabaran kurikulum menjadi rencana pembelajaran atau susunan materi pembelajaran yang teratur pada mata pelajaran tertentu pada kelas tertentu.⁴¹ Komponen dalam menyusun silabus memuat antara lain identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, standard kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.⁴²

³⁹ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 251.

⁴⁰ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Sistem Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 53

⁴¹ Nazarudin, *Manajemen Pembelajaran: Implementasi Konsep, Karakteristik dan Metodologi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum*, (Yogyakarta: Teras 2007), 126

⁴² Abin Syamsudin Makmun, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung, Pustaka Eduka, 2010), 217.

e) Menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP). SAP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.⁴³ Komponen-komponen dalam menyusun SAP meliputi: a) identitas mata pelajaran; b) standar kompetensi; c) kompetensi dasar; d) indikator tujuan pembelajaran; e) materi ajar; f) metode pembelajaran; g) langkah-langkah pembelajaran; h) sarana dan sumber belajar; i) penilaian dan tindak lanjut. Selain itu dalam fungsi perencanaan tugas kepala lembaga pendidikan sebagai manajer yakni mengawasi dan mengecek perangkat yang dosen buat, apakah sesuai dengan pedoman kurikulum ataukah belum. Melalui perencanaan pembelajaran yang baik, dosen dapat mempersiapkan segalasesuatu yang dibutuhkan siswa dalam belajar.⁴⁴

2) Pengorganisasian Pembelajaran

Fungsi pengorganisasian dalam kegiatan pembelajaran merupakan upaya untuk menentukan pelaksana tugas dengan jelas kepada setiap personil lembaga pendidikan sesuai bidang, wewenang, mata pelajaran, dan tanggung jawabnya. Menurut Hick dan Gullet,⁴⁵ pengorganisasian adalah kegiatan membagi tugas dan tanggung jawab dan wewenang sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

⁴³ Ibid., 221.

⁴⁴ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, 222-223.

⁴⁵ Herbert Hicks and Ray Gullett, C., *Organization: Theory and Behavior*, (London: Mc Graw Hill, 1981), 321.

Menurut Syaiful Sagala⁴⁶ pengorganisasian pembelajaran meliputi beberapa aspek:

- a) Menyediakan fasilitas, perlengkapan dan personel yang diperlukan dalam Matakuliah Pendidikan Antikorupsi untuk penyusunan kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui suatu proses penetapan pelaksanaan pembelajaran yang diperlukan untuk menyelesaikannya.
- b) Mengelompokkan komponen pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi dalam struktur lembaga pendidikan secara teratur.
- c) Membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi.
- d) Merumuskan dan menetapkan metode dan prosedur pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi.
- e) Pengorganisasian pembelajaran ini memberikan gambaran bahwa kegiatan belajar dan mengajar Matakuliah Pendidikan Antikorupsi mempunyai arah dan penanggungjawab yang jelas. Artinya dilihat dari komponen yang terkait dengan pembelajaran pada institusi lembaga pendidikan memberi gambaran bahwa jelas kedudukan kepala lembaga pendidikan dalam memberikan fasilitas dan kelengkapan pembelajaran, dan kedudukan dosen untuk menentukan dan mendesain pembelajaran dengan mengorganisasikan alokasi waktu, desain kurikulum, media dan kelengkapan pembelajaran, dan lainnya yang berkaitan dengan

⁴⁶ Syaiful Sagala. *Konsep dan Makna Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 143.

suksesnya penyelenggaraan kegiatan belajar. Kemudian jelas kedudukan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar baik di kelas maupun belajar di rumah, dibawah koordinasi dosen dan juga orang tua siswa yang berkaitan dengan belajar. Pengorganisasian pembelajaran ini dimaksudkan agar materi dan bahan ajaran yang sudah direncanakan dapat disampaikan secara maksimal.

3) Pelaksanaan Pembelajaran

Implementasi atau *directing*, yaitu proses pelaksanaan program pembelajaran agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam lembaga pendidikan serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.⁴⁷ Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan di lembaga pendidikan. Dalam fungsi pelaksanaan ini memuat kegiatan pengelolaan dan kepemimpinan pembelajaran yang dilakukan dosen di kelas dan pengelolaan peserta didik. Oleh karena itu dalam hal pelaksanaan pembelajaran mencakup dua hal yaitu:

Pertama: pengelolaan kelas dan peserta didik. Pengelolaan kelas adalah satu upaya memperdayakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran.⁴⁸ Berkenaan dengan pengelolaan kelas sedikitnya terdapat tujuh hal yang harus diperhatikan, yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, yaitu ruang

⁴⁷ Abdul Rohman, *Pengertian dan Fungsi Manajemen*, Makalah 2011, 3.

⁴⁸ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), 173.

belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, penerangan, suhu, pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari (pembentukan dan pengembangan kompetensi) dan bina suasana dalam pembelajaran.⁴⁹

Dosen dapat mengatur dan merencanakan segala sesuatunya, situasi yang ada ketika proses belajar mengajar berlangsung. Menurut Nana Sudjana yang dikutip oleh Suryobroto⁵⁰ pelaksanaan proses belajar mengajar meliputi pentahapan sebagai berikut:

- a) Tahap pra instruksional. Tahap yang ditempuh pada saat memulai sesuatu proses belajar mengajar: Dosen menanyakan kehadiran siswa dan mencatat siswa yang tidak hadir; Bertanya kepada siswa sampai dimana pembahasan sebelumnya; Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya dari pelajaran yang sudah disampaikan; Mengulang bahan pelajaran yang lain secara singkat.
- b) Tahap instruksional. Tahap pemberian bahan pelajaran yang dapat diidentifikasi beberapa kegiatan sebagai berikut: menjelaskan kepada siswa tujuan pengajaran yang harus dicapai siswa; menjelaskan pokok materi yang akan dibahas; membahas pokok materi yang sudah dituliskan; pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh yang kongkret, pertanyaan, tugas; Penggunaan alat bantu

⁴⁹ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran : Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 165.

⁵⁰ Suryobroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, Cet. II, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 30-31.

pengajaran untuk memperjelas pembahasan pada setiap materi pelajaran; menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi.

- c) Tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan tahap instruksional, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu: Mengajukan pertanyaan kepada kelas atau kepada beberapa murid mengenai semua aspek pokok materi yang telah dibahas pada tahap instruksional; Apabila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh siswa (kurang dari 70%), maka dosen harus mengulang pengajaran; Untuk memperkaya pengetahuan siswa mengenai materi yang dibahas, dosen dapat memberikan tugas atau PR; Akhiri pelajaran dengan menjelaskan atau memberitahukan pokok materi yang akan dibahas pada pelajaran berikutnya.⁵¹

Kedua, pengelolaan dosen. Pelaksanaan sebagai fungsi manajemen diterapkan oleh kepala lembaga pendidikan bersama dosen dalam pembelajaran agar siswa melakukan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Sehubungan dengan itu, peran kepala lembaga pendidikan memegang peranan penting untuk menggerakkan para dosen dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai manajer di dalam kelas.

Dosen adalah orang yang bertugas membantu murid untuk mendapatkan pengetahuan sehingga ia dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dosen sebagai salah satu komponen dalam kegiatan pembelajaran, memiliki posisi sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama dosen ialah

⁵¹ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), 173.

merancang, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Dosen harus dapat menempatkan diri dan menciptakan suasana kondusif, yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. Selain itu, dengan kompetensi yang dimiliki oleh setiap dosen akan menunjukkan kualitas dosen yang sebenarnya, kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dari perbuatan secara profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen.

4) Mengawasi dan Mengevaluasi Pembelajaran

a) Mengawasi Pembelajaran

Konsepsi pemantauan secara umum menunjuk pada upaya mengamati dan pengendalian kegiatan agar sesuai dengan rencana. Pemantauan dalam konteks kegiatan pembelajaran orang dewasa pada hakekatnya sama saja. Namun tekanannya pada situasi dan kondisi warga belajar dalam melakukan tugas belajar.

Konsepsi disiplin mengacu pada ketertiban pelaksanaan kegiatan yang berpedoman pada peraturan yang telah disepakati bersama dan telah ditentukan dalam perencanaan. Dalam konteks pembelajaran orang dewasa, disiplin menyangkut ketertiban tutor yang menciptakan suasana belajar dan ketertiban warga belajar dalam melakukan tugas-tugas belajar.⁵² Pengawasan adalah suatu konsep yang luas yang dapat diterapkan pada manusia, benda dan organisasi. Pengawasan dimaksudkan untuk memastikan anggota organisasi melaksanakan

⁵² Ratna Wilis Dahar, *Teori-teori Belajar*, (Jakarta: Erlangga, 1989), 52.

apa yang dikehendaki dengan mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi informasi serta memanfaatkannya untuk mengendalikan organisasi.⁵³

Menurut Syaiful Sagala,⁵⁴ pengawasan dalam konteks pembelajaran dilakukan oleh kepala lembaga pendidikan terhadap kegiatan pembelajaran pada seluruh kelas, termasuk mengawasi pihak-pihak terkait sehubungan dengan pemberian pelayanan kebutuhan pembelajaran secara sungguh- sungguh. Untuk keperluan pengawasan ini, dosen mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi kegiatan belajar, serta memanfaatkannya untuk mengendalikan pembelajaran sehingga tercapai tujuan belajar yang telah direncanakan.

b) Mengevaluasi Pembelajaran

Istilah evaluasi berasal dari bahasa inggris yaitu “evaluation”. Menurut Wand dan Gerald W. Brown evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukannilai dari sesuatu.⁵⁵ Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara: [1] membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan dosen dengan standar proses, dan [2] mengidentifikasi kinerja dosen dalam proses

⁵³ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen; Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 197.

⁵⁴ Syaiful sagala, *Supervisi Pengajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 133.

⁵⁵ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 17.

pembelajaran sesuai dengan kompetensi dosen. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja dosen dalam proses pembelajaran.

Evaluasi merupakan suatu upaya untuk mengetahui berapa banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh siswa dari hal-hal yang telah diajarkan oleh dosen.⁵⁶ Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menekankan pada diperolehnya informasi tentang seberapa jauh perolehan siswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan.⁵⁷

Pertama, evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian dan atau pengukuran hasil belajar, tujuan utama evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan yang tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. Apabila tujuan utama kegiatan evaluasi hasil belajar ini sudah terealisasi maka hasilnya dapat difungsikan untuk berbagai keperluan tertentu.⁵⁸

Menurut Suryobroto,⁵⁹ adapun langkah-langkah evaluasi hasil pembelajaran meliputi: (1) evaluasi formatif. Evaluasi formatif seringkali diartikan sebagai kegiatan evaluasi yang dilakukan pada akhir pembahasan setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan.⁶⁰ Evaluasi ini yakni diselenggarakan pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar, yang diselenggarakan secara periodik,

⁵⁶ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 156.

⁵⁷ Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses.

⁵⁸ Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses.

⁵⁹ Suryobroto, *Proses Belajar...*, 53.

⁶⁰ Indah Komsiyah, *Belajar dan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 125.

isinya mencakup semua unit pengajaran yang telah diajarkan; (2) evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang diselenggarakan oleh dosen setelah jangka waktu tertentu pada akhir semesteran. Penilaian sumatif berguna untuk memperoleh informasi tentang keberhasilan belajar pada siswa, yang dipakai sebagai masukan utama untuk menentukan nilai rapor akhir semester.⁶¹

Kedua, evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran yakni untuk menentukan kualitas dari suatu program pembelajaran secara keseluruhan yakni dari mulai tahap proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi ini memusatkan pada keseluruhan kinerja dosen dalam proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara:

- (1) Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan dosen dengan standard proses.
- (2) Mengidentifikasi kinerja dosen dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi dosen. Sebagai implikasi dari evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan dosen maupun kepala lembaga pendidikan dapat dijadikan umpan balik untuk program pembelajaran selanjutnya.⁶² Jadi evaluasi pada program pembelajaran meliputi: (a) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dibanding dengan rencana; (b) melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi dan merumuskan tindakan koreksi, menyusun standar-standar pembelajaran dan sasaran-sasaran; dan (c) menilai pekerjaan dan melakukan tindakan terhadap

⁶¹ Suryobroto, *Proses Belajar...*, 44.

⁶² Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses.

penyimpangan-penyimpangan baik institusional satuan pendidikan maupun proses pembelajaran.⁶³

Adapun alat evaluasi pembelajaran diantaranya sebagai berikut: (1) tes hasil belajar. Untuk mengukur keberhasilan belajar siswa atau dikenal dengan istilah Penilaian Acuan Patokan (PAP). PAP bisa digunakan bila dosen menggunakan tes seperti: tes prasyarat (*entry-behavior test*), tes awal (*pre test*), tes akhir (*post tes*), dan tes pengukur kemajuan (*progress test*); (2) kriteria test. Sebagai alat ukur dalam evaluasi, tes harus memiliki dua criteria, yaitu validitas dan realibilitas; dan (3) jenis-jenis tes. Tes berdasarkan jumlah siswa, ada tes kelompok atau tes individual. Sedangkan dari cara pelaksanaan, tes dapat dibedakan menjadi tes lisan, tes tulisan dan tes perbuatan.⁶⁴

2. Pendidikan Antikorupsi

a. Istilah Korupsi

Istilah “korupsi” berasal dari bahasa latin *corruptio* dari perspektif Fockema Andrea atau *corruptus* dari perspektif *Webster Student Dictionary*. Kata *corruptio* sendiri punya kata kerja, *corrumpere* (suatu bahasa Latin yang lebih tua), yang artinya busuk, rusak menggoyankan, memutarbalikkan, atau menyogok. Dari bahasa latin tersebut dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah

⁶³ Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran...*, 146

⁶⁴ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain*, 232-234

adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjururan, dapat suap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.⁶⁵

Dalam bahasa Arab, korupsi disebut *risywah* yang berarti penyuapan. *Risywah* juga diartikan sebagai uang suap. Selain dinilai sebagai sebuah tindakan merusak dan khianat, korupsi juga disebut *fasdd (ifsdd)* dan *ghulull*.⁶⁶ *Risywah* secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan (*al-Misbah al-Muniral-Fayumi, al-Muhalla-Ibnu Hazm*). Semua ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa *Nash Qur'aniyah* dan *Sunnah Nabawiyah* yang antara lain menyatakan: "Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram" (QS Al Maidah 42). Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan '*akkaaluna lissuhti*' dengan *risywah*. Dengan demikian, *risywah* identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT., diharamkan mencari suap, menyuap, menerima suap, dan mediator antara penyuap dan yang disuap. Hanya saja jumbuh ulama membolehkan penyuapan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezhaliman seseorang. Namun orang yang menerima suap tetap berdosa (Kasyful

⁶⁵ Tim Penulis, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), 23. Lihat juga di dalam buku Ignas G Saksono, *Tantangan Pendidik(an) Memecahkan Problem Bangsa: Tanggapan terhadap Pembatalan UU BHP*, (Yogyakarta: Forkoma PMKRI, 2010), 22.

⁶⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Ponpes Krapyak al-Munawwir, 1884), 537,

Qona' 6/316, Nihayatul Muhtaj 8/243 , al-Qurtubi 6/183, Ibnu Abidin 4/304, al-Muhalla 8/118, Matalib Ulin Nuha 6/479.⁶⁷

Dalam terminologi fiqih Islam, korupsi juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan (*jarimah*) terhadap amanah. Korupsi identik dengan *risywah* dan *at-tajawwuz fi isti'mal al-haq* (menyalahgunakan wewenang). Jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi disebut pencurian (*sariqah*) dan jika dilakukan secara terang-terangan disebut sebagai perampokan (*al-nahb*).⁶⁸ Korupsi termasuk kejahatan terhadap harta benda manusia (*akl amwal al-nas bi al-bathil*) dan secara esensial mirip dengan *ghulul*, yaitu pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang (*ghanimah*). *Ghulul* jelas-jelas diharamkan dalam al-Qur'an dengan ancaman bahwa pelakunya akan membawa serta barang yang dikorupsinya sebagai pertanggungjawaban di akhirat.⁶⁹

Apabila dilihat dari aspek terminologi, Bank Dunia dan Lembaga Internasional Transparansi⁷⁰ menganut definisi klasik yang memandang korupsi sebagai: "Penggunaan posisi seseorang di masyarakat untuk mendapat keuntungan pribadi secara tidak sah". Penyalahgunaan kekuasaan dan memperoleh keuntungan pribadi tersebut dapat terjadi di bidang

⁶⁷Tim Penulis, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), 23-24.

⁶⁸Hasyim Muzadi, "Merubah Perilaku Korup Melalui Moral Keagamaan", dalam artikel di www.nu-anti.korupsi.or.id , diakses pada 5 Maret 2007.

⁶⁹A. Malik Madany, "Korupsi Sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Islam", dalam artikel di www.nu-anti.korupsi.or.id, diakses pada 5 Maret 2007. Sumiarti, *Pendidikan Anti korupsi*, P3M STAIN Purwokerto: INSANIA, Vol. 12, No. 2, 8 Mei-Ags 2007, 189-207

⁷⁰Singgih, *Dunia Pun Memerangi Korupsi: Beberapa Catatan dari International Anti Corruption Conference I – X dan Dokumen PBB tentang Pemberantasan Korupsi*, (Tangerang: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pellita Harapan, 2002),120.

kekuasaan pemerintah maupun swasta, dan seringkali terjadi kolusi antara individu-individu dari keduanya. Oleh karena itu, Badan Informasi Internasional di Libanon memakai istilah: “Korupsi adalah perilaku individu-individu swasta maupun pejabat pemerintah yang telah menyimpang dari tanggung jawab yang telah ditetapkan dengan menggunakan jabatan atau kekuasaan mereka untuk mencapai tujuan pribadi maupun mengamankan keuntungan pribadi.” (Lebanon *Anti Corruption Initiative Report* 1999).

b. Korupsi dalam Perspektif Undang-Undang

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dan ditambah oleh UU No. 20 Tahun 2001 lebih memperluas ruang lingkup tindak pidana korupsi, selain mengadopsi rumusan tindak pidana korupsi menurut UU No. 3 Tahun 1971 (UU anti korupsi kita berlaku sebelumnya) yang merujuk ketentuan KUHP; juga memasukkan perilaku-perilaku koruptif yang selama ini tumbuh dan dianggap wajar di masyarakat sebagai tindak pidana korupsi. Seperti gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke KPK dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi menurut ketentuan UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001.⁷¹

⁷¹Soesilo, *Korupsi Refleksi Zaman Edan*, (Malang: Yayasan “Yusula”, 2008), 72-73.

Dari sudut pandang hukum, definisi bentuk korupsi secara gamblang dijelaskan dalam 13 Pasal UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 yang dirumuskan dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yaitu:

- 1) Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara
- 2) Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara
- 3) Menyuap pegawai negeri
- 4) Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
- 5) Pegawai negeri menerima suap
- 6) Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
- 7) Menyuap hakim
- 8) Menyuap advokat
- 9) Hakim dan advokat menerima suap
- 10) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
- 11) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
- 12) Pegawai negeri merusakkan bukti
- 13) Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
- 14) Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti
- 15) Pegawai negeri memeras
- 16) Pegawai negeri memeras pegawai yang lain
- 17) Pemborong berbuat curang
- 18) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang

- 19) Rekanan TNI/Polri berbuat curang
- 20) Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
- 21) Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
- 22) Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain
- 23) Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
- 24) Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK
- 25) Merintang proses pemeriksaan
- 26) Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya
- 27) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
- 28) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
- 29) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
- 30) Saksi yang membuka identitas pelapor.⁷²

Dari 30 jenis korupsi tindak pidana korupsi dikelompokkan kembali menjadi 7 bentuk/jenis. Sebagaimana dalam buku saku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perbuatan yang termasuk bentuk-bentuk korupsi digolongkan ke dalam 7 bentuk yakni :

- 1) Perbuatan yang merugikan keuntungan negara. Korupsi jenis ini hukumannya diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001. Indikasinya:

⁷² Tim Penulis, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), 27-28.

- a) Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- b) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.

2) Suap-menyuap. Korupsi jenis ini hukumannya diatur dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001. Indikasinya:

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya;
- b) Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- c) Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
- d) Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji;
- e) Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

f) Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

g) Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

h) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara;

i) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara;

j) Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara.

3) Penggelapan dalam jabatan maksudnya ialah menyalahgunakan jabatan yang dipercayakan kepada dirinya. Korupsi jenis ini hukumannya diatur

dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001. Indikasinya:

- a) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
- b) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
- c) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;
- d) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;

- e) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
 - f) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
- 4) Pemerasan ialah seseorang yang memiliki jabatan tertentu dan dengan jabatan yang dimilikinya ia memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang akan menguntungkan dirinya maupun kelompoknya dengan cara yang tidak wajar. Korupsi jenis ini hukumannya diatur dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001. Indikasinya:
- a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - b) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau

penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

c) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

5) Perbuatan curang. Korupsi jenis ini misalnya pemborong yang curang dalam hal pembuatan jembatan jalan umum, seharusnya uang yang digunakan untuk membeli semen mahal digunakan dengan membeli semen murah yang kualitas jembatannya tidak tahan lama sehingga sisa dari anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri maupun kelompoknya. Korupsi jenis ini hukumannya diatur dalam Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001. Indikasinya:

a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau

penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan maksudnya kegiatan yang bertujuan menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan. Jenis ini diatur dalam Pasal 12 UU No 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001. Indikasinya: pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mendosens atau mengawasinya;
- 7) Gratifikasi atau istilah lainnya pemberian hadiah kepada pejabat. Diatur dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001. Indikasinya: setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.⁷³

c. Penyebab Korupsi di Indonesia

Apabila ditelusuri, penyebab korupsi yang sangat parah di Indonesia ini memang bervariasi. Ada sekian banyak variabel yang dapat menjadi faktor penyebab korupsi. Secara historis orang sering mengkolerasikan tindakan korupsi dengan sejarah masa lalu, terutama birokrasi patrimonial dan penjajah Belanda.

⁷³KPK, *Pahami Dulu Baru Lawan: Buku Saku Mengenali Korupsi*, (Jakarta: KPK, Tt.), 3-66.

Amien Rahayu, seorang analis sejarah LIPI dalam " Jejak Sejarah Korupsi Indonesia" bahwa mulai zaman kerajaan-kerajaan lawas, budaya korupsi di Indonesia pada prinsipnya dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan sebenarnya kehancuran kerajaan-kerajaan besar (Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram) adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya. Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh "budaya-tradisi korupsi" yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita.⁷⁴

Sedangkan faktor lainnya yang sering disebut adalah ekonomi.⁷⁵ Jika terkait dengan penyelenggara negara, ada yang menyatakan bahwa sumbernya adalah gaji kecil. Namun, pendapat tersebut terbantahkan dengan sendirinya karena yang banyak melakukan korupsi justru orang-orang yang berada di posisi elit dengan gaji lebih dari mencukupi. Ada juga yang berpandangan bahwa penyebabnya adalah kekurangan pemahaman pada agama. Tetapi, hasil penelitian lembaga pengabdian masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta memperlihatkan walaupun orang menjalankan shalat tapi korupsi tetap dijalankan.

Selain itu, dewasa ini kita hidup di zaman yang disebut era kapitalisme, yang efek negatifnya adalah sikap konsumerisme yang berlebihan. Inti

⁷⁴Sering kita mendengar bahwasanya strategi jitu Belanda (VOC) menguasai Nusantara adalah dengan politik pecah belah (*divide et impera*), tapi pernahkah kita bertanya atau meneliti persoalan atau penyebab utama mudahnya bangsa asing (Belanda) mampu menjajah Indonesia sekitar 350 tahun (versi Sejarah Nasional?), lebih karena perilaku elit bangsawan yang korup, lebih suka memperkaya pribadi dan keluarga, kurang mengutamakan aspek pendidikan moral, kurang memperhatikan "character building", mengabaikan hukum apalagi demokrasi. Terlebih lagi sebagian besar penduduk di Nusantara tergolong miskin, mudah dihasut provokasi atau mudah termakan isu, dan yang lebih parah mudah diadu domba. Lebih jauh, lihat Adib Bahari dan Khotibul Umam, *Komisi Pemberantasan Korupsi, dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 18-19.

⁷⁵James C. Scott, *Korupsi Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990),57.

kapitalisme adalah kompetisi. Sebenarnya kompetisi ini bagus, tapi sayangnya kompetisi ini bukan pada sisi pengembangannya SDM tetapi lebih pada kompetisi siapa memperoleh apa, *who gets what, by what means and how much*. Ironisnya *means* (sarana) yang digunakan juga tidak berdasar atas kompetisi yang fair, dalam arti siapa yang berusaha keras dialah yang memperoleh banyak, akan tetapi melalui sarana yang salah dan terkutuk, yaitu korupsi. Di sekitar kita ada banyak tindakan terkutuk yang terstruktur, bisa dirasakan dan dilihat kehadirannya tetapi sulit dibuktikan, karena kerapian mengemas tindakan korupsi itu. Struktur penggajian pegawai negeri, misalnya tidak mungkin menjadikan pegawai negeri kaya raya, jika memang tidak didukung oleh usaha lainnya.⁷⁶

Selain itu, ada faktor mentalitas. Banyak di antara kita yang memiliki mental menerabas,⁷⁷ ingin segera menikmati usaha, tidak dengan cara benar dan fair tetapi melalui mekanisme usaha yang salah. Moralitas kita menjadi goyah kalau melihat keberhasilan orang lain secara ekonomis. Rendahnya daya tampung lapangan kerja juga menjadi variabel banyaknya penyelewengan rekrutmen tenaga kerja, baik sektor negeri maupun swasta. Di sinilah mental menerabas itu memperoleh momentum yang sangat relevan.

Secara terperinci, penasihat KPK Abdullah Hehamahua⁷⁸ menyatakan, berdasarkan kajian dan pengalaman, ada 8 penyebab korupsi di Indonesia yakni :

- 1) Sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Sebagai negara yang baru berkembang seharusnya prioritas pembangunan dibidang pendidikan.

⁷⁶Nur Syam, *Gerakan Anti Korupsi*....., 247.

⁷⁷Lebih jauh mengenai mentalitas menerabas dan implikasi-implikasinya, silahkan baca Koentjoroningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1938).

⁷⁸ ErmansjahDjaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 51.

Tetapi selama puluhan tahun, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde reformasi ini, pembangunan difokuskan dibidang ekonomi. Padahal setiap negara yang baru merdeka terbatas dalam bidang SDM, uang, manajemen, dan teknologi.

- 2) Kompensasi PNS yang rendah. Wajar saja karena negara baru berkembang tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya sehingga sekitar 90 % PNS melakukan KKN.
- 3) Pejabat yang serakah. Pola hidup yang konsumerisme melahirkan pejabat-pejabat yang berpikiran untuk menjadi kaya secara instan.
- 4) *Law Enforcement* tidak berjalan. Penyebabnya karena pejabat atau PNS yang serakah karena gaji tidak cukup maka penegakan hukum pun jadi lambat hampir di seluruh instansi pemerintahan.
- 5) Hukuman yang ringan terhadap koruptor. Disebabkan *Law enforcement* tidak berjalan di mana aparat penegak hukum bisa dibayar atau istilah lainnya hukum bisa dibeli, maka hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap koruptor untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.
- 6) Pengawasan yang tidak efektif. Internal kontrol di setiap unit tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait KKN. Hingga akhirnya lahirlah Irjen dan Bawasda yang bertugas melakukan internal audit. Malangnya, sistem ini tidak melakukan perubahan besar terkadang Irjen dan Bawasda pun turut melakukan korupsi.

- 7) Tidak ada keteladanan pemimpin
- 8) Budaya masyarakat yang kondusif KKN. Dalam negara agraris seperti Indonesia masyarakat cenderung paternalistik.

Sedangkan dalam perspektif KPK, korupsi dalam birokrasi di Indonesia terjadi dalam berbagai cara dan pintu masuk. Ada 6 (enam) sektor yang dapat dipilah yaitu 1). penerimaan non pajak; 2). belanja barang dan jasa; 3). bantuan sosial; 4). pungutan daerah; 5). dau/dak/dekonsentrasi dan 6). penerimaan pajak. Menurut kajian KPK, Pola Korupsi di Indonesia dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu : 1). Jenis korupsi terdiri dari dua yaitu konvensional dan *state capture* (*political corruption* dan birokrasi kleptokratif); 2). Pilar korupsi terdiri dari: para pengusaha hitam, penguasa korup dan stakeholder (penegak hukum, calo kasus, ahli tukang dan aktor politik; 3). Modus korupsi terdiri dari 3 yaitu mafia peradilan, mafia pajak, mafia SDA, Mafia politik. Dari beberapa data yang dihimpun oleh KPK terlihat beberapa indikator yang mempengaruhi derajat kekorupan suatu negara yaitu: Indeks Persepsi Korupsi (IPK), *Doing Business* (tingkat kemudahan usaha), Survey PERC untuk berinvestasi, Survey Integritas Sektor Publik, Bribery Indeks.⁷⁹

d. Upaya-upaya Pemberantasan Korupsi

Dari diskripsi di atas tentang penyebab terjadinya korupsi, kenyataan ini menunjukkan bahwa korupsi sudah merajalela di Indonesia. Untuk mengatasi masalah korupsi ini, terdapat banyak cara untuk mengatasinya. Salah satunya

⁷⁹Arifah Cahaya, *Peta Korupsi Di Indonesia: Fakta dan Data terkait Korupsi di Indonesia*, Diambil Tanggal 20 Januari 2014 dalam <http://arifahcahaya11.blogspot.com/2013/03/peta-korupsi-di-indonesia.html>

yaitu dengan pendekatan yang ditawarkan Satgas PMH dan UNDP.⁸⁰ Satgas PMH bersama UNDP dalam bukunya “Modus Operandi Mafia Hukum” (2010) menyimpulkan bahwa penegakan hukum dan pengadilan adalah salah satu kunci utama untuk memberantas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Karenanya agenda mewujudkan negara yang bebas KKN harus dimulai lebih dahulu dari pembenahan sektor penegakan hukum dan pengadilan.

Menurut Satgas PMH, Penelitian yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* pada tahun 2002 yang dilakukan di enam wilayah di Indonesia secara detail telah mengklasifikasikan tahapan dan pihak yang terlibat serta modus mafia peradilan (mafia hukum). Praktik tersebut terjadi di sepanjang proses penegakan hukum, dari hulu, yaitu proses penyelidikan, sampai hilir, yaitu proses pemasyarakatan.

Selain itu, maka semua kalangan harus bergerak untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Menurut Azra⁸¹ untuk mengatasi korupsi maka semua elemen masyarakat baik elemen kultural maupun struktural bersatu untuk mengatasi korupsi. Gerakan kultural anti korupsi yang dilakukan oleh dua organisasi besar, NU dan Muhammadiyah, pada hakekatnya merupakan upaya terstruktur melalui pewacanaan, pendataan dan sosial marketing mengenai tidakan korupsi. Sebagai gerakan kultural, tentu saja, akan memilah isu-isu menarik mana yang dapat diperbincangkan, didiskusikan, diberitakan melalui media, dan diharapkan akan

⁸⁰ Arifah Cahaya sebagaimana dikutip oleh Sholikhin dan Nurul Anam, *Pendidikan Anti Korupsi: Konsep dan Aplikasi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah dan Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IAIN Jember Press, 2016), 135-136.

⁸¹ Nur Syam, *Gerakan Anti Korupsi Melalui Pendidikan: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, dalam Buku, *Agama Sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global*, ed. Moh. Asror Yusuf, (Jawa Timur: IRCiSoD dan STAIN Kediri, 2006), 243-244.

menjadi opini publik. Melalui pendataan, sekurangnya akan diperoleh informasi yang akurat tentang siapa melakukan korupsi apa, dan seberapa banyak dalam bentuk apa, dan sebagainya. Sedangkan melalui pemasaran sosial akan didapati bahwa korupsi merusak kehidupan generasi mendatang, menyengsarakan dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bahkan akan menyebabkan kebangkrutan sebagai negara-bangsa.

Sedangkan gerakan struktural, pemerintah harus tetap konsisten untuk memberantas korupsi. Sebenarnya gerakan struktural telah lama dilakukan. Pada tahun 1990, misalnya, melalui Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) dilaporkan bahwa ditemukan berbagai penyimpangan tentang pembangunan. Penyimpangan itu di antaranya adalah penyertaan modal pemerintah kepada BUMN yang tidak jelas statusnya, banyaknya kredit macet dan juga proyek pemerintah daerah yang tidak sesuai dan sebagainya. Sayangnya, temuan-temuan menarik tersebut tidak mendapatkan respon yang baik dari pemerintah, pers, juga masyarakat. Dewasa ini, telah dibentuk berbagai komisi dan bahkan undang-undang anti korupsi yang bertujuan untuk memberantas korupsi, penyelamatan uang negara, penyelamatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sayangnya, semua institusi ini hanyalah menjadi acuan kertas. Bukan karena ketidakmampuan secara fungsional atau yudisial, akan tetapi seringkali berbenturan dengan kekuasaan politik yang jauh lebih perkasa.

e. Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan: Pendidikan Antikorupsi sebagai Solusi Preventif

Korupsi di Indonesia bagaikan suatu “penyakit” yang sukar disembuhkan dan merupakan suatu fenomena yang kompleks. Menurut Wijayanto⁸² untuk memberantas korupsi terdapat 4 (empat) pendekatan yang paling banyak diadopsi oleh berbagai kalangan yaitu: pendekatan pengacara (*Lawyer approach*), pendekatan bisnis (*Business approach*), pendekatan pasar atau ekonomi (*Market or Economist approach*), dan pendekatan budaya (*Cultural approach*).

Pendekatan terakhir atau pendekatan budaya ini yang dilakukan adalah membangun dan memperkuat sikap anti-korupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, biaya tidak besar (*low costly*), namun hasilnya akan berdampak jangka panjang (*long lasting*).

Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat pemerintah sudah berhasil menuntaskan berbagai kasus korupsi besar, berbagai instansi sudah melakukan upaya hukum dan lingkungan kerja yang lebih berintegritas, kenyataannya masih saja banyak terjadi kasus-kasus korupsi. Sesuatu yang lebih memprihatinkan adalah begitu mudahnya korupsi skala kecil (*petty corruption*) dilakukan oleh individu-individu di dalam masyarakat, karena sesungguhnya korupsi besar berasal dari korupsi kecil. Di sinilah perhatian terhadap pentingnya pendekatan budaya (*cultural approach*) mulai menguat. Pendidikan formal maupun non formal akhirnya menjadi pilihan. Secara umum, pendidikan

⁸² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud), *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011), 3-4

ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi. Tujuan praktis ini, bila dilakukan bersama-sama semua pihak, akan menjadi gerakan masal yang akan mampu melahirkan bangsa baru yang bersih dari ancaman dan dampak korupsi.

Eko Handoyo dkk. juga menjelaskan bahwa untuk memberantas korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan melakukan suatu tindakan represif, namun yang lebih mendasar lagi adalah melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui tindakan preventif ini adalah dengan menumbuhkan kepedulian untuk melawan berbagai tindakan korupsi, dan sekaligus juga mendidik generasi muda dengan menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak hal yang dapat dilakukan, misalnya melalui kampanye publik, maupun melalui penanaman nilai-nilai moral dan etika yang dapat dimasukkan dalam kurikulum pada berbagai level seperti SD, SMP, SMA dan Perdosenan Tinggi (PT). Dengan upaya ini diharapkan mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang “bersih” dan “antikorupsi” sekaligus menjadi contoh bagi generasi sesudahnya dan sebelumnya. Kesadaran dan kepedulian masyarakat perlu ditumbuhkan melalui berbagai cara, antara lain dengan mencanangkan “Gerakan Antikorupsi”, yang menandai komitmen berbagai elemen masyarakat dalam memberantas korupsi.⁸³

⁸³ Eko Handoyo dkk., *Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Antikorupsi Di Sma 6 Kota Semarang*, Hasil Penelitian Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Tt: 2.

Menurut Sjahrudin⁸⁴ Selama ini upaya menumbuhkan generasi yang bersih dan antikorupsi ini telah dilakukan melalui kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga pemerintah, Depdikdasmen, Depdikti, Kemenag RI dan lembaga pendidikan sebagai pelaksanaan pasal 13 UU. No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu bahwa KPK menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi bekerja sama dengan Depdikdasmen, Depdikti dan Kemenag RI pada setiap jenjang pendidikan melalui sosialisasi, komunikasi, dan pendidikan. Tujuan pembelajaran pendidikan antikorupsi adalah: 1) pada saat terjun ke masyarakat siswa telah mendapat bekal yang cukup untuk dapat memahami etika di setiap level “ social leaders ” yang dijalannya, 2) memahami secara komprehensif pentingnya etika baik di sektor publik maupun di sector privat, 3) mengenali dan memahami dampak buruk korupsi terhadap kepercayaan masyarakat dan persaingan di dunia internasional, dan 4) memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk memberantas korupsi.

Sebenarnya di Indonesia istilah pendidikan antikorupsi relatif baru karena belum banyak yang mengenalnya. Istilah pendidikan antikorupsi dapat dipandang sebagai bagian dari rekonstruksi pendidikan yang berupaya untuk menjawab berbagai persoalan korupsi di masyarakat. Di Indonesia, korupsi sudah menjadi “cultur hitman” karena korupsi tidak hanya dilakukan di tingkat atas tetapi juga sudah merambah ke tingkat bawah. Jadi, dengan adanya pendidikan antikorupsi, masyarakat di Indonesia diharapkan terbebas dari berbagai bentuk tindakan korupsi

⁸⁴ *Ibid.*

dan menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, amanah dan bertanggung jawab.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam⁸⁵ menyebutkan bahwa pendidikan antikorupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Dalam pendidikan antikorupsi harus mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik).

Sedangkan menurut Sumiarti⁸⁶, pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang agar mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas antikorupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Dalam konteks pendidikan, “memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya” berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi.

Dengan demikian, suasana proses pendidikan bagi generasi bangsa Indonesia tidak boleh dipisahkan dengan internalisasi dan aplikasi pendidikan antikorupsi. Apalagi, sebelum maklumat untuk menerapkan pendidikan

⁸⁵ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2013), 6.

⁸⁶ Sumiarti, *Pendidikan Anti korupsi*, P3M STAIN Purwokerto: INSANIA, Vol. 12, No. 2, 8 Mei-Ags 2007, 189-207.

antikorupsi di lembaga pendidikan, pendidikan karakter sudah dilaksanakan terlebih dahulu di lembaga pendidikan. Dengan adanya usaha penerapan pendidikan karakter di lembaga pendidikan, ini diupayakan untuk selalu memperkuat karakter generasi bangsa Indonesia sebelum dia benar-benar terjun untuk mengabdikan kepada masyarakat.

Pendidikan antikorupsi memiliki arah yang jelas. Arah orientasi pendidikan antikorupsi yaitu untuk memupuk kesadaran peserta didik dalam menentang bentuk kemungkaran sosial, kejahatan kemanusiaan yang komunal dan melibatkan publik. Hal tersebut secara eksplisit lebih diarahkan kepada peningkatan iman dan takwa dengan menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya serta penyemaian nilai-nilai kemanusiaan yang universal secara aplikatif. Pendapat hampir sama juga disampaikan oleh Bhayu Sulistiawan yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku antikorupsi⁸⁷

Menurut Dharma⁸⁸ arah orientasi pendidikan antikorupsi bisa dilihat dalam umum tujuan pendidikan antikorupsi adalah: (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; (2) perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Jika merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (3)

⁸⁷Bhayu Sulistiawan, *Nilai-Nilai Anti korupsi dalam Pendidikan Islam (Tinjauan Normatif Aspek Kurikulum Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan Anti korupsi)*, Skripsi di Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2008, 103.

⁸⁸Anwar Hamdani, *Model Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SLTA di Wilayah Kota Surakarta*, Makalah Penelitian, 2012, 3-4.

disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dari dasar inilah, signifikansi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi lewat jalur pendidikan tidak dapat diabaikan potensinya sebagai salah satu cara untuk membudayakan antikorupsi di Indonesia.⁸⁹

Semua orientasi pendidikan antikorupsi bersumber pada beberapa nilai yang menjadi sumber dan pedoman pendidikan antikorupsi. Aspek-aspek nilai-nilai kehidupan yang terukur yang terkandung di dalam pendidikan antikorupsi sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Tim Pengembangan Pendidikan Budi Pekerti (TPPBP) Propinsi DIY pada tahun 1996⁹⁰ adalah: (1) pengabdian, (2) kejujuran, (3) sopan santun, (4) toleransi, (5) kedisiplinan, (6) keikhlasan, (7) *tepa selira*, (8) *empan papan*, (9) guyub rukun, (10) gotong royong, dan (11) tata krama. Nilai-nilai inilah yang ditanamkan kepada anak didik untuk dapat mempraktekkan langsung di dalam kehidupan sosialnya. Anak didik ditanamkan rasa pengabdian dan mempraktekannya dalam kehidupan, misalnya mengabdikan kepada orang tua, dosen, sesama teman, dan sebagainya. Demikian juga dalam aspek-aspek yang lain.

Beberapa ahli menyatakan bahwa pada hakekatnya, nilai-nilai pendidikan antikorupsi juga berpedoman pada nilai-nilai pendidikan karakter. Dalam merumuskan nilai-nilai dasar pendidikan antikorupsi, Yulita TS berpedoman pada nilai-nilai yang dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik, seperti:

⁸⁹ Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003*..., 5-6

⁹⁰ Ki Supriyoko, *Peran Pendidikan dalam Mencegah Timbulnya Mental Korupsi Anak Bangsa Indonesia*, dalam Buku, "Agama sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global", Ed. Moh. Asror Yusuf, (Yogyakarta: IRCISoD, 2006), 233.

kejujuran, kepedulian dan menghargai sesama, kerja keras, tanggungjawab, kesederhanaan, keadilan, disiplin, kooperatif, keberanian dan daya juang/kegigihan.

Namun, secara khusus, ternyata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)⁹¹ merumuskan nilai-nilai yang bisa menjadi acuan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Nilai-nilai Acuan dalam Pendidikan Antikorupsi
Versi Kemendikbud

N	Nilai	Deskripsi
1.	Kejujuran	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
2.	Kepedulian	Sikap dan tindakan yang selalu ingin member bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
3.	Kemandirian	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
4.	Kedisiplinan	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan

⁹¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011), 75-81.

5.	Tanggung Jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam,
6.	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
7.	Kesederhanaan	Bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati.
8.	Keberanian	Mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. (tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur.
9.	Keadilan	Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak/ tidak pilih kasih, berpihak/ berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional.

Sedangkan bagi lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Kementerian Agama RI, acuan nilai dan perilaku anti korupsi yang diintegrasikan dalam mata pelajaran dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.2
Nilai dan Perilaku Anti Korupsi
Versi Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI⁹²

No.	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-Ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	a. Mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari. b. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu c. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di madrasah, dan di masyarakat. d. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. b. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu. c. Terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu. d. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan

⁹² Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah...*, 20-21.

3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	<p>a. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya.</p> <p>b. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.</p>
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	<p>a. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya.</p> <p>b. Tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.</p>
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	<p>a. Mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</p> <p>b. Mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</p> <p>c. Mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</p>

6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	<p>a. Bangga terhadap perilaku anti korupsi.</p> <p>b. Anti terhadap perilaku korupsi.</p>
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat	<p>a. Menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi.</p> <p>b. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi.</p> <p>c. Menjadi teladan perilaku anti korupsi.</p>

3. Implementasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

a. Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

Matakuliah Pendidikan Antikorupsi ini tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus. Berlandaskan pada fenomena permasalahan serta pendekatan budaya yang telah diuraikan diatas, matakuliah ini lebih menekankan pada pembangunan karakter antikorupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa. Mata kuliah Pendidikan antikorupsi yang dirumuskan Dirjen Dikti Kemendikbud lebih berorientasi berupa sebuah matakuliah yang berdiri sendiri (*independen*), yang diselenggarakan secara reguler dalam 14–16 pertemuan selama satu semester. Matakuliah ini dapat ditetapkan sebagai matakuliah yang bersifat wajib maupun pilihan di dalam kurikulum per dosenan tinggi. Tentu tidak menutup kemungkinan materi dan metode

pembelajaran ini nantinya diterapkan juga pada bentuk-bentuk pendidikan diluar matakuliah independen. Materi Antikorupsi dapat disampaikan dalam satu atau beberapa pertemuan (insersi) dalam sebuah matakuliah tertentu, atau dalam bentuk pelatihan, kampanye, seminar dan sebagainya. Metode yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan keterbatasan ruang, waktu dan kondisi.⁹³

Dengan demikian tujuan dari matakuliah Anti-korupsi adalah membentuk kepribadian antikorupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.⁹⁴ Hal ini menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁵

⁹³ Kemendikbud, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian, 2011), 3.

⁹⁴ *Ibid*, 5.

⁹⁵ *Ibid.*, v.

Sedangkan dalam Pedoman Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi Dirjen Diktis Kementerian Agama RI 2013⁹⁶, Pendidikan Antikorupsi di perdosenan tinggi bisa menggunakan beberapa pendekatan yang diterapkan dalam kurikulum pendidikan antikorupsi, yang masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Model dan pendekatan tersebut di antaranya: model sebagai Mata Pelajaran tersendiri. Pendidikan antikorupsi disampaikan sebagai mata pelajaran tersendiri seperti bidang studi yang lain. Dalam hal ini dosen bidang studi pembelajaran antikorupsi harus membuat Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP), Satuan Pelajaran (SP), Rencana Pengajaran (RP), metodologi pengajaran, dan evaluasi pengajaran. Selain itu, pembelajaran antikorupsi sebagai mata pelajaran harus masuk dalam jadwal yang terstruktur. Keunggulan pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran adalah materi lebih terfokus dan terencana dengan matang. Dengan demikian, pelajaran lebih terstruktur dan terukur sebagai informasi. Ada jam yang sudah ditentukan sebagai kesempatan untuk memberikan informasi secara pasti. Dosen dapat membuat perencanaan dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya.

Sedangkan materi yang ditawarkan Dirjen Pendidikan Islam Direktorat Madrasah RI di antaranya: 1) apa dan di mana korupsi itu, 2) sebab - sebab korupsi, 3) isu moral, 4) korupsi dan hak asasi manusia, 5) memerangi korupsi, 6) korupsi dan ekonomi pasar, 7) korupsi dan hukum, 8) korupsi dan masyarakat demokrasi, 9) hak dan kewajiban warga Negara, 10) pemerintahan yang bersih

⁹⁶ Kementerian Agama, *Pedoman Model Integrasi Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2013*, (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), 5-9.

dan berwibawa, dan 11) tata kelola pemerintahan yang baik. Materi-materi tersebut juga bisa diterapkan di perdosenan tinggi, tapi proses kajian dan analisisnya lebih komprehensif, kritis dan konstruktif.

Dalam buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perdosenan Tinggi dijelaskan, matakuliah pendidikan antikorupsi ini berisi tentang materi-materi sebagai berikut: model pembelajaran matakuliah antikorupsi; pengertian korupsi; faktor penyebab korupsi; dampak massif korupsi; nilai dan prinsip antikorupsi; upaya pemberantasan korupsi; gerakan, kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi; tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan peranan santri dalam pencegahan korupsi.⁹⁷

Dengan diajarkannya materi-materi tersebut, maka rumusan diskriptif tujuan pendidikan antikorupsi dari matakuliah Antikorupsi adalah membentuk kepribadian antikorupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.⁹⁸

Dari tujuan di atas, jika dirumuskan dalam Standar Kompetensi (SK), maka kompetensi yang ingin dicapai adalah :

- 1) Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual competence*).

⁹⁷ Materi-materi ini diambil dari buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Untuk lebih jelasnya, lihat Tim Penulis, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian, 2011).

⁹⁸ Kemendikbud, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian, 2011), 5.

2) Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut.

3) Mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi (dan melaporkannya kepada penegak hukum). Adapun penjelasan adalah sebagai berikut :

a) Kompetensi individual dimulai dari mahasiswa memiliki persepsi negatif mengenai korupsi dan persepsi positif mengenai antikorupsi, menguatnya kesadaran (*awareness*) terhadap adanya potensi tindak korupsi. Mahasiswa akhirnya memiliki sikap antikorupsi dalam arti berusaha untuk tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun.

b) Sikap antikorupsi ini kemudian memberikan efek-tular ke lingkungan sekitar dimana mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun, termasuk mampu memberikan informasi kepada orang lain mengenai hal-hal terkait korupsi dan antikorupsi.

c) Kompetensi selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu tindak korupsi secara komprehensif mulai dari bentuk, proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian/dampak yang ditimbulkan; selanjutnya mampu menghasilkan penyelesaian masalah (*problem solving*). Melaporkan kepada penegak hukum mungkin saja dilakukan, namun harus memiliki bukti-bukti yang valid.

b. Desain Model Pembudayaan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi

Pendidikan anti korupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik.⁹⁹ Dengan pemahaman seperti ini, maka implementasi pendidikan antikorupsi harus mewujudkan budaya antikorupsi. Mewujudkan budaya antikorupsi tidak hanya menyampaikan materi tentang pendidikan antikorupsi tapi juga harus membiasakan untuk antikorupsi dalam kehidupannya.

Untuk mewujudkan budaya antikorupsi, maka dibutuhkan model pembudayaan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Model pembudayaan pendidikan anti korupsi yang dirumuskan Dirjen Dikti Kemendikbud¹⁰⁰ lebih berorientasi berupa sebuah mata kuliah anti korupsi yang berdiri sendiri (*independen*), yang diselenggarakan secara reguler dalam 14–16 pertemuan selama satu semester. Mata kuliah ini dapat ditetapkan sebagai mata kuliah yang bersifat wajib maupun pilihan di dalam kurikulum perguruan tinggi. Tentu tidak menutup kemungkinan materi dan metode pembelajaran ini nantinya diterapkan juga pada bentuk-bentuk pendidikan diluar mata kuliah independen. Materi Anti korupsi dapat disampaikan dalam satu atau beberapa pertemuan (*insersi*) dalam sebuah mata kuliah tertentu, atau dalam bentuk pelatihan, kampanye, seminar dan sebagainya. Metode yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan keterbatasan ruang, waktu dan kondisi.

⁹⁹ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi*, 6.

¹⁰⁰ Kemendikbud, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian, 2011), 3.

Sedangkan dalam Pedoman Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi Dirjen Diktis Kementerian Agama RI 2013¹⁰¹, pembudayaan Pendidikan Anti korupsi di perguruan tinggi bisa menggunakan beberapa pendekatan yang diterapkan dalam kurikulum pendidikan anti korupsi, yang masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Model dan pendekatan tersebut di antaranya:

Pertama, model sebagai matakuliah tersendiri. Pendidikan anti korupsi disampaikan sebagai mata pelajaran tersendiri seperti bidang studi yang lain. Dalam hal ini guru bidang studi pembelajaran anti korupsi harus membuat Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP), Satuan Pelajaran (SP), Rencana Pengajaran (RP), metodologi pengajaran, dan evaluasi pengajaran. Selain itu, pembelajaran anti korupsi sebagai mata pelajaran harus masuk dalam jadwal yang terstruktur. Keunggulan pendidikan anti korupsi sebagai mata pelajaran adalah materi lebih terfokus dan terencana dengan matang. Dengan demikian, pelajaran lebih terstruktur dan terukur sebagai informasi. Ada jam yang sudah ditentukan sebagai kesempatan untuk memberikan informasi secara pasti. Guru dapat membuat perencanaan dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya.

Kedua, model terintegrasi dalam matakuliah. Adapun yang dimaksud dengan terintegrasi dalam mata pelajaran adalah pokok bahasan pendidikan anti korupsi tersebut disisipkan dalam sejumlah mata kuliah yang sudah ada dalam

¹⁰¹ Kementerian Agama, *Pedoman Model Integrasi Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2013*, (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), 5-9.

kurikulum PTAI. Secara aplikatif hal tersebut lebih berkedudukan sebagai pendekatan dalam pembelajaran. Terkait dengan hal ini maka konsep pembelajaran yang dapat dijadikan acuan adalah internalisasi pembelajaran integritas di mana internalisasi nilai-nilai integritas dalam pembelajaran harus memperhatikan 4 hal yang meliputi; pengertian atau pemahaman terhadap karakter integritas; perasaan integritas; tindakan integritas; dan internalisasi nilai-nilai (nilai keimanan, etika, dan moral).

Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi juga dapat disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata kuliah. Dosen dapat memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan mata kuliahnya. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup. Dengan model seperti ini, semua dosen adalah pengajar pembelajaran anti korupsi tanpa kecuali. Keunggulan model ini adalah semua dosen ikut bertanggungjawab akan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa. Pemahaman nilai hidup anti korupsi dalam diri anak tidak melulu bersifat informatif-kognitif, melainkan bersifat terapan pada tiap mata pelajaran.

Ketiga, model di luar pembelajaran. Penanaman nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya. Model ini dapat dilaksanakan oleh guru sekolah yang bersangkutan yang mendapat tugas tersebut atau dipercayakan

pada lembaga di luar sekolah untuk melaksanakannya, misalnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keempat, model *hidden curriculum*. Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi sekolah perlu merencanakan suatu kebudayaan dan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan adalah alat pendidikan. Bagi anak yang masih kecil, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik anak di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula. Berdasarkan pembiasaan itulah anak terbiasa menurut dan taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah dan masyarakat, setelah mendapatkan pendidikan pembiasaan yang baik di sekolah pengaruhnya juga terbawa dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sampai dewasa nanti.

Keempat, model gabungan. Model gabungan berarti menggunakan gabungan antara model terintegrasi dan di luar pembelajaran secara bersama-sama. Penanaman nilai lewat pengajaran formal terintegrasi bersama dengan kegiatan di luar pembelajaran. Model ini dapat dilaksanakan baik dalam kerja sama dengan tim oleh guru maupun dalam kerja sama dengan pihak luar sekolah.

c. Metode dan Evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

Sedangkan dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi di Madrasah Dirjen Pendidikan Islam¹⁰², ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan anti korupsi, yaitu sebagai berikut: 1) metode inquiry. Metode inquiry menekankan pencarian secara bebas dan penghayatan nilai-nilai hidup dengan langsung melibatkan siswa untuk menemukan nilai-nilai tersebut dalam pendampingan dan pengarahan guru; 2) metode pencarian bersama (*collaborative*). Metode ini menekankan pada pencarian bersama yang melibatkan siswa dan guru. Pencarian bersama lebih berorientasi pada diskusi atas soal-soal yang aktual dalam masyarakat, di mana proses ini diharapkan menumbuhkan sikap berpikir logis, analitis, sistematis, argumentatif untuk dapat mengambil nilai-nilai hidup dari masalah yang diolah bersama; 3) metode siswa aktif atau aktivitas bersama. Metode ini menekankan pada proses yang melibatkan siswa sejak awal pembelajaran. Guru memberikan pokok bahasan dan siswa dalam kelompok mencari dan mengembangkan proses selanjutnya. Siswa membuat pengamatan, pembahasan analisis sampai proses penyimpulan atas kegiatan mereka. Metode ini mendorong siswa untuk mempunyai kreativitas, ketelitian, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, kerja sama, kejujuran, dan daya juang; 4) metode keteladanan (pemodelan). Dalam dunia pendidikan, apa yang terjadi dan tertangkap oleh siswa bisa jadi tanpa disaring akan langsung dilakukan. Proses pembentukan kepribadian pada siswa akan dimulai dengan melihat orang yang akan diteladani. Guru dapat menjadi

¹⁰² Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah* (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), 13-17.

tokoh idola dan panutan bagi siswa. Dengan keteladanan guru dapat membimbing siswa untuk membentuk sikap yang kokoh; 5) Metode *Live In*. Metode *Live in* dimaksudkan agar siswa mempunyai pengalaman hidup bersama orang lain langsung dengan situasi yang sangat berbeda dari kehidupan sehari-harinya. Dengan pengalaman langsung siswa dapat mengenal lingkungan hidup yang berbeda dalam cara berpikir, tantangan, permasalahan, termasuk tentang nilai-nilai hidupnya; dan 6) metode penjernihan nilai atau klarifikasi nilai. Teknik mengklarifikasi nilai atau penjernihan nilai dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa.

Selain itu, setiap metode pada dasarnya harus memberikan aspek *problem-based learning* bagi mahasiswa, bahkan membawa pada *problem solving* terhadap setiap masalah yang dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. *In-class discussion*. Tujuannya untuk menumbuhkan kepekaan (awareness) dan membangun kerangka berfikir (*framework of thinking*)
2. *Case study*. Tujuannya untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap kasus korupsi serta mampu menganalisa atas dasar konsep-konsep yang diberikan.
3. Skenario perbaikan sistem (*improvement system scenario*). Tujuan metode ini untuk memberikan rangsangan kepada mahasiswa agar memikirkan penyelesaian masalah secara nyata (*problem solving*).

4. Kuliah umum (*General lecture*). Tujuannya adalah untuk belajar dari praktisi atau orang-orang di lapangan yang mampu menginspirasi dan dapat menjadi role model bagi mahasiswa.
5. Diskusi film. Tujuan: menggunakan media film sebagai media pembelajaran melalui kekuatan audiovisual.
6. *Investigative report*. Tujuannya adalah mahasiswa memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi dan menganalisis sebuah tindak korupsi yang nyata terjadi di lingkungan sekitar atau daerah setempat, serta membuat laporan korupsi yang efektif dan *impactful*.
7. *Thematic exploration*. Tujuannya adalah untuk membangun cara berfikir (way of thinking) yang komprehensif dalam menggali sebuah kasus.
8. *Prototype*. Tujuan metode ini sebagai penerapan keilmuan atau ciri khas perguruan tinggi terkait atau ciri khas lokal dalam konteks anti korupsi; atau mengeksplorasi korupsi dan anti korupsi. Kegiatan: mahasiswa membuat prototype teknologi terkait cara-cara penanggulangan korupsi.
9. *Prove the government policy*. Tujuannya adalah untuk memantau realisasi janji pemerintah sebagai bentuk integritas.

10. *Education tools*. Tujuannya adalah untuk menciptakan media pembelajaran yang kreatif untuk segmen pendidikan formal maupun publik dalam rangka gerakan anti korupsi.¹⁰³

Sedangkan pada aspek evaluasi, dalam panduan Dirjen Pendis Madrasah Kemenag RI¹⁰⁴, secara umum evaluasi terdiri atas penilaian eksternal dan internal. Penilaian eksternal merupakan penilaian yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Penilaian eksternal dilakukan oleh suatu lembaga, baik dalam maupun luar negeri dimaksudkan antara lain untuk pengendali mutu. Sedangkan penilaian internal adalah penilaian yang direncanakan dan dilakukan oleh guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dalam konteks pendidikan anti korupsi ini maka penilaian yang layak untuk digunakan adalah internal.

Penilaian kelas merupakan bagian dari penilaian internal (*internal assessment*) untuk mengetahui hasil belajar peserta didik terhadap penguasaan kompetensi yang diajarkan oleh guru. Tujuannya adalah untuk menilai tingkat pencapaian kompetensi peserta didik yang dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung dan akhir pembelajaran. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan oleh guru untuk memantau proses, kemajuan, perkembangan hasil belajar peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan yang

¹⁰³ Kemendikbud, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian, 2011), 10-17.

¹⁰⁴ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2013), 18-19.

diharapkan secara berkesinambungan. Penilaian dapat memberikan umpan balik kepada guru agar dapat menyempurnakan perencanaan dan proses pembelajaran.

Berkaitan dengan pendidikan anti korupsi model *assesment* dan evaluasi yang perlu dikembangkan adalah portofolio. Portofolio sebagai *assesment* berarti mengandung makna bahwa dalam pendidikan anti korupsi alat untuk mengukur keberhasilan siswa adalah dengan menggunakan kumpulan hasil kerja (karya) terbaik siswa yang berisi berbagai pengalaman dan prestasi yang disusun berdasarkan urutan waktu dan kegiatan. Sebagai contoh siswa diminta untuk mengamati peristiwa atau artikel di koran/ majalah/intemet masalah korupsi kemudian siswa diminta untuk menganalisis mengapa terjadi korupsi ?, apa sebab-sebabnya?, bagaimana alternatif pemecahannya?, diantara beberapa alternatif pemecahan, mana yang akan dipilih sebagai alternatif terbaik?. Jika telah dipilih alternatif terbaik selanjutnya dicari peluang, prospek, dan tantangan ke depan.

d. Implementasi Budaya Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Di dalam buku pedoman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal DIKTI ¹⁰⁵ disebutkan bahwa peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan

¹⁰⁵ Kemendikbud, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*..., v.

pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Sesuatu yang penting diperhatikan adalah untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Untuk keperluan perkuliahan dipandang perlu untuk membuat sebuah Buku Ajar yang berisikan materi dasar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Sedangkan Dirjen Pendidikan Islam¹⁰⁶ menjelaskan bahwa penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana lembaga pendidikan. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Pembiasaan adalah alat pendidikan. Berdasarkan pembiasaan itulah mahasiswa terbiasa menurut dan taat kepada peraturan-peraturan yang beralaku di perguruan tinggi dan masyarakat, setelah mendapatkan pendidikan pembiasaan yang baik di perguruan tinggi pengaruhnya juga terbawa dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sampai dewasa nanti. Menanamkan kebiasaan yang baik memang tidak mudah dan kadang-kadang membutuhkan waktu yang

¹⁰⁶ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi*, 11.

lama untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui pembiasaan pada mahasiswa-mahasiswa, tetapi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sukar pula untuk mengubahnya. Karena itu adalah penting, pada awal kehidupan mahasiswa, menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik dan jangan sekali-kali mendidik mahasiswa berdusta, tidak disiplin, menyontek dalam ulangan dan sebagainya. Bagi mahasiswa, pembiasaan sangat penting, arena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik mahasiswa di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula.

4. Manajemen Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

1) Manajemen Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

Supaya matakuliah pendidikan antikorupsi berjalan dengan baik, maka dibutuhkan suatu manajemen pembelajaran. Menurut Terry, manajemen adalah proses, yakni aktifitas yang terdiri dari empat subyektivitas yang masing-masing merupakan fundamental. Keempat subyektivitas itu- yang ada dalam dunia manajemen dikenal sebagai P.O.A.C adalah *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), *controlling* (pengawasan).¹⁰⁷ Oleh karena itu, implementasi manajemen pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi sangat berkaitan dengan empat unsur manajemen tersebut.

¹⁰⁷Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Agama Islam*. (Jakarta: PT. Bharata Karya Aksara, 1986), 6-7.

Berpijak dari konsep manajemen dan pembelajaran, maka konsep manajemen pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi dapat diartikan proses mengelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian (pengarahan) dan pengevaluasian kegiatan yang berkaitan dengan proses membelajarkan si pembelajar dengan mengikutsertakan berbagai faktor di dalamnya guna mencapai tujuan matakuliah pendidikan antikorupsi. Dalam “memanaje” atau mengelola pembelajaran, manajer dalam hal ini dosen melaksanakan berbagai langkah kegiatan mulai dari merencanakan pembelajaran, mengorganisasikan pembelajaran, mengarahkan dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan. Pengertian manajemen pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi dapat diartikan secara luas dalam arti mencakup keseluruhan kegiatan bagaimana membelajarkan mahasiswa mulai dari perencanaan pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi sampai pada penilaian pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi.¹⁰⁸

Adapun empat unsur manajemen pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi dijelaskan sebagai berikut:

1) Fungsi Perencanaan Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

Dalam konteks pembelajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk

¹⁰⁸ Ella Yulaelawati, *Kurikulum dan Pembelajaran. Filosofi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : Pakar Raya, 2004), 76.

mencapai tujuan yang ditentukan.¹⁰⁹ PP. RI No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 20 menjelaskan bahwa; ”Perencanaan proses pembelajaran memiliki silabus, perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”.¹¹⁰

Secara terperinci, rumusan penyusunan komponen perangkat perencanaan pembelajaran antara lain:

- a) Merumuskan tujuan khusus. Rumusan tujuan pembelajaran harus mencakup tiga aspek penting yang di istilahkan oleh Bloom (1956) merupakan domain kognitif, afektif dan domain psikomotorik.
- b) Pengalaman belajar. Langkah kedua dalam merencanakan pembelajaran adalah memilih pengalaman belajar yang harus dilakukan mahasiswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman.
- c) Kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai, pada dasarnya kita dapat merancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individu.
- d) Orang-orang yang terlibat. Peran dosen dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran. Dalam pelaksanaan peran tersebut diantaranya dosen berfungsi sebagai penyampai

¹⁰⁹ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran...*, 17.

¹¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 15.

informasi. Agar dosen dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik, maka dosen harus memiliki kemampuan untuk berbicara serta berkomunikasi, menggunakan berbagai media seperti, OHP, LCD, papan tulis dan lain sebagainya.

- e) Bahan dan alat. Pemilihan bahan dan alat juga merupakan bagian dari system perencanaan pembelajaran.
- f) Fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran.
- g) Perencanaan evaluasi dan pengembangan. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam sebuah sistem perencanaan pembelajaran. Melalui evaluasi kita dapat melihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran.¹¹¹

2) Fungsi Pengorganisasian Pembelajaran Matakuliah Pendidikan

Antikorupsi

Selain fungsi perencanaan, terdapat pula fungsi pengorganisasian dalam kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan untuk menentukan pelaksana tugas dengan jelas kepada setiap personil lembaga pendidikan sesuai bidang, wewenang, mata pelajaran, dan tanggung jawabnya. Menurut Hick dan Gullet,¹¹² pengorganisasian adalah kegiatan membagi tugas dan tanggung jawab dan wewenang sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

¹¹¹ Sarwan, *Manajemen Pembelajaran PAI*, (Jember: IAIN Jember, 2016), 114.

¹¹² Herbert Hicks and Ray Gullett, C., *Organization: Theory and Behavior*, (London: Mc Graw Hill, 1981), 321.

Pengorganisasian pembelajaran menurut Syaiful Sagala meliputi beberapa aspek:

- a) Menyediakan fasilitas, perlengkapan dan personel yang diperlukan untuk penyusunan kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui suatu proses penetapan pelaksanaan pembelajaran yang diperlukan untuk menyelesaikannya.
- b) Mengelompokkan komponen pembelajaran dalam struktur lembaga pendidikan secara teratur.
- c) Membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran.
- d) Merumuskan dan menetapkan metode dan prosedur pembelajaran.
- e) Pengorganisasian pembelajaran ini memberikan gambaran bahwa kegiatan belajar dan mengajar mempunyai arah dan penanggungjawab yang jelas. Artinya dilihat dari komponen yang terkait dengan pembelajaran pada institusi lembaga pendidikan memberi gambaran bahwa jelas kedudukan kepala lembaga pendidikan dalam memberikan fasilitas dan kelengkapan pembelajaran, dan kedudukan dosen untuk menentukan dan mendesain pembelajaran dengan mengorganisasikan alokasi waktu, desain kurikulum, media dan kelengkapan pembelajaran, dan lainnya yang berkaitan dengan suksesnya penyelenggaraan kegiatan belajar. Kemudian jelas kedudukan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan belajar baik di kelas maupun

belajar di rumah, dibawah koordinasi dosen dan juga orang tua mahasiswa yang berkaitan dengan belajar. Pengorganisasian pembelajaran ini dimaksudkan agar materi dan bahan ajaran yang sudah direncanakan dapat disampaikan secara maksimal.¹¹³

3) Fungsi Pelaksanaan Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan di lembaga pendidikan. Jadi pelaksanaan pengajaran adalah interaksi dosen dengan murid dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada mahasiswa dan untuk mencapai tujuan pengajaran.

Dalam fungsi pelaksanaan ini memuat kegiatan pengelolaan dan kepemimpinan pembelajaran yang dilakukan dosen di kelas dan pengelolaan peserta didik. Oleh karena itu dalam hal pelaksanaan pembelajaran mencakup dua hal yaitu: *pertama*, pengelolaan kelas dan peserta didik. Pengelolaan kelas adalah satu upaya memperdayakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran.¹¹⁴ Berkenaan dengan pengelolaan kelas sedikitnya terdapat tujuh hal yang harus diperhatikan, yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, penerangan, suhu,

¹¹³ Syaiful Sagala. *Konsep dan Makna Pembelajaran...*, 143.

¹¹⁴ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak didik...*, 173.

pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari (pembentukan dan pengembangan kompetensi) dan bina suasana dalam pembelajaran.¹¹⁵ Dosen dapat mengatur dan merencanakan segala sesuatunya, situasi yang ada ketika proses belajar mengajar berlangsung. Menurut Nana Sudjana yang dikutip oleh Suryobroto¹¹⁶ pelaksanaan proses belajar mengajar meliputi tahap pra-instruksional, tahap instruksional, dan tahap evaluasi serta tindak lanjut. Adapun penjelasannya yaitu di bawah ini:

- a) Tahap pra-instruksional. Tahap yang ditempuh pada saat memulai sesuatu proses belajar mengajar: Dosen menanyakan kehadiran mahasiswa dan mencatat mahasiswa yang tidak hadir; Bertanya kepada mahasiswa sampai dimana pembahasan sebelumnya; Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya dari pelajaran yang sudah disampaikan; Mengulang bahan pelajaran yang lain secara singkat.
- b) Tahap instruksional. Tahap pemberian bahan pelajaran yang dapat diidentifikasi beberapa kegiatan sebagai berikut: menjelaskan kepada mahasiswa tujuan pengajaran yang harus dicapai mahasiswa; menjelaskan pokok materi yang akan dibahas; membahas pokok materi yang sudah dituliskan; pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh yang kongkret, pertanyaan, tugas; Penggunaan alat bantu pengajaran

¹¹⁵ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran...*, 165.

¹¹⁶ Suryobroto, *Proses Belajar Mengajar...*, 30-31.

untuk memperjelas pembahasan pada setiap materi pelajaran; menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi.

- c) Tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan tahap instruksional, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu: Mengajukan pertanyaan kepada kelas atau kepada beberapa murid mengenai semua aspek pokok materi yang telah dibahas pada tahap instruksional; Apabila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh mahasiswa (kurang dari 70%), maka dosen harus mengulang pengajaran; Untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa mengenai materi yang dibahas, dosen dapat memberikan tugas atau PR; Akhiri pelajaran dengan menjelaskan atau memberitahukan pokok materi yang akan dibahas pada pelajaran berikutnya.¹¹⁷

Kedua, pengelolaan dosen. Pelaksanaan sebagai fungsi manajemen diterapkan oleh kepala lembaga pendidikan bersama dosen dalam pembelajaran agar mahasiswa melakukan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Sehubungan dengan itu, peran kepala lembaga pendidikan memegang peranan penting untuk menggerakkan para dosen dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai manajer di dalam kelas.

¹¹⁷ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), 173.

Sedangkan menurut Zulaichah Ahmad,¹¹⁸ Dalam pembelajaran, tugas dosen yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Umumnya pelaksanaan pembelajaran mencakup tiga hal, yaitu: *pertama*, pre tes; pre tes (tes awal) pada umumnya pelaksanaan proses pembelajaran dimulai dengan pre tes, pre tes berguna untuk menjajaki proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. *Kedua*, proses (pembentukan kompetensi); proses yang dimaksudkan adalah pelaksanaan proses pembelajaran, yakni bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan. Proses pembelajaran perlu dilakukan dengan tenang dan menyenangkan, hal tersebut tentu saja menuntut aktivitas dan kreativitas dosen dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Proses pembelajaran dikatakan aktif apabila seluruh peserta didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik dan sosialnya. *Ketiga*, post tes. Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran diakhiri dengan post tes, sama halnya dengan pre tes, post tes juga memiliki banyak kegunaan; terutama dalam melihat keberhasilan pembelajaran.

Sarwan¹¹⁹ juga berpendapat bahwa secara umum ada tiga pokok tahapan pembelajaran yakni tahap permulaan pembelajaran, tahap pembelajaran, dan tahap penilaian dan tindak lanjut. Ketiga tahapan di atas, harus dilaksanakan dalam pembelajaran. Jika salah satu tahapan ditinggalkan, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi proses pembelajaran.

Adapun diskripsi tiap-tiap tahap pembelajaran tersebut yaitu: *pertama*: tahap

¹¹⁸ Zulaichah Ahmad, *Perencanaan Pembelajaran PAI*, (Jember: Madania Center Press, 2008), 35-38.

¹¹⁹ Sarwan, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 91-94.

pra pembelajaran. Tahap pra pembelajaran merupakan tahapan yang ditempuh dosen pada saat ia memulai proses pembelajaran. Beberapa kegiatan yang dilakukan dosen atau mahasiswa pada tahapan ini:

- a) Dosen menanyakan kehadiran mahasiswa dan mencatat siapa yang tidak hadir. Kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran dapat dijadikan salah satu tolak ukur kemampuan dosen dalam mengajar. Ketidakhadiran mahasiswa, disebabkan kondisi mahasiswa yang bersangkutan (sakit, malas, bolos, dan lain-lain), tetapi terjadi karena penyampaian dosen tidak menyenangkan, sikapnya tidak disukai mahasiswa, atau karena tindakan dosen waktu mengajar dianggap merugikan mahasiswa (penilaian tidak adil, memberi hukuman yang menyebabkan frustrasi) dan sebagainya.
- b) Mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa di kelas, atau mahasiswa tertentu tentang bahan pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sampai di mana pemahaman tentang materi yang telah diberikan.
- c) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya dari pengajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- d) Mengulang kembali bahan pelajaran yang lalu (*remedial teaching*) secara singkat tapi mencakup semua bahan yang telah dibahas sebelumnya.

- e) Tujuan tahapan ini adalah mengungkapkan kembali tanggapan mahasiswa terhadap bahan yang telah diterima dan menumbuhkan kondisi belajar dalam hubungannya dengan pelajaran yang berlangsung.

Kedua, tahap pembelajaran. Tahap kedua merupakan tahap inti yakni tahapan memberikan bahan pelajaran yang telah disusun dosen sebelumnya.

Secara umum dapat diidentifikasi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a) Menjelaskan pada mahasiswa tujuan pembelajaran yang harus dicapai mahasiswa.
- b) Membahas pokok materi yang ditempuh dua cara yakni: (1) pembahasan dimulai dari umum menuju ke topik secara khusus yang disebut strategi deduktif, (2) dimulai dari topik khusus menuju ke topik umum yang disebut induktif.
- c) Pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh konkret. Demikian pula mahasiswa harus diberikan pertanyaan atau tugas, untuk mengetahui tingkat pemahaman dari setiap pokok materi yang telah dibahas.
- d) Penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan setiap pokok materi sangat diperlukan.
- e) Menyimpulkan hasil pembahasan pokok materi. Kesimpulan dibuat oleh dosen dan sebaiknya pokok-pokoknya ditulis dipapan tulis untuk dicatat mahasiswa. Kesimpulan dapat pula dibuat

dosen bersama-sama mahasiswa, bahkan kalau mungkin diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa.

Ketiga, tahap penutup. Tujuan tahapan ini ialah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pembelajaran. Ketiga tahap di atas merupakan serangkaian kegiatan yang terpadu dan tidak terpisahkan satu sama lain. Dosen dituntut untuk mampu dan mengatur waktu kegiatan secara fleksibel, sehingga ketiga rangkaian tersebut diterima oleh mahasiswa secara utuh. Di sinilah letak keterampilan profesional seorang dosen dalam melaksanakan strategi mengajar. Kemampuan mengajar seperti dilukiskan dalam uraian di atas secara teoritis mudah dikuasai, namun dalam praktiknya tidak semudah dilaksanakan. Hanya dengan latihan dan kebiasaan yang terencana, kemampuan itu dapat diperoleh.

4) Fungsi Mengawasi dan Mengevaluasi Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

Konsepsi pemantauan secara umum menunjuk pada upaya mengamati dan pengendalian kegiatan agar sesuai dengan rencana. Pemantauan dalam konteks kegiatan pembelajaran orang dewasa pada hakekatnya sama saja. Namun tekanannya pada situasi dan kondisi warga belajar dalam melakukan tugas belajar.¹²⁰ Adapun pengawasan dalam konteks pembelajaran dilakukan oleh kepala lembaga pendidikan terhadap kegiatan pembelajaran pada seluruh kelas, termasuk mengawasi pihak-pihak terkait sehubungan dengan pemberian pelayanan kebutuhan pembelajaran secara sungguh-

¹²⁰ Ratna Wilis Dahar, *Teori-Teori Belajar*, 52.

sungguh. Untuk keperluan pengawasan ini, dosen mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi kegiatan belajar, serta memanfaatkannya untuk mengendalikan pembelajaran sehingga tercapai tujuan belajar yang telah direncanakan.¹²¹

Sedangkan evaluasi proses pembelajaran merupakan suatu upaya untuk mengetahui berapa banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh mahasiswa dari hal-hal yang telah diajarkan oleh dosen. Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menekankan pada diperolehnya informasi tentang seberapa banyak perolehan mahasiswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan.

Dalam Permendiknas No. 41 Tahun 2007,¹²² evaluasi pembelajaran ada dua, yaitu: evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran.

Pertama, evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar mahasiswa melalui kegiatan penilaian dan atau pengukuran hasil belajar. Tujuan utama evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan yang tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. Apabila tujuan utama kegiatan evaluasi hasil belajar ini sudah terealisasi maka hasilnya dapat difungsikan untuk berbagai keperluan tertentu.¹²³

¹²¹ Syaiful sagala, *Supervisi Pengajaran...*, 133.

¹²² Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses.

¹²³ Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses.

Menurut Suryobroto,¹²⁴ adapun bentuk langkah-langkah evaluasi hasil pembelajaran meliputi: (1) evaluasi formatif. Evaluasi formatif seringkali diartikan sebagai kegiatan evaluasi yang dilakukan pada akhir pembahasan setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan.¹²⁵ Evaluasi ini yakni diselenggarakan pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar, yang diselenggarakan secara periodik, isinya mencakup semua unit pengajaran yang telah diajarkan, dan (2) evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang diselenggarakan oleh dosen setelah jangka waktu tertentu pada akhir semesteran. Penilaian sumatif berguna untuk memperoleh informasi tentang keberhasilan belajar pada mahasiswa, yang dipakai sebagai masukan utama untuk menentukan nilai rapor akhir semester.¹²⁶

Kedua, evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran yakni untuk menentukan kualitas dari suatu program pembelajaran secara keseluruhan yakni dari mulai tahap proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi ini memusatkan pada keseluruhan kinerja dosen dalam proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara:

- a) Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan dosen dengan standard proses.
- b) Mengidentifikasi kinerja dosen dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi dosen. Sebagai implikasi dari evaluasi

¹²⁴ Suryobroto, *Proses Belajar...*, 53.

¹²⁵ Indah Komsiyah, *Belajar dan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 125.

¹²⁶ Suryobroto, *Proses Belajar...*, 44.

proses pembelajaran yang dilakukan dosen maupun kepala sekolah dapat dijadikan umpan balik untuk program pembelajaran selanjutnya.¹²⁷ Jadi, evaluasi pada program pembelajaran meliputi: (1) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dibanding dengan rencana; (2) melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi dan merumuskan tindakan koreksi, menyusun standar-standar pembelajaran dan sasaran-sasaran; dan (3) menilai pekerjaan dan melakukan tindakan terhadap penyimpangan-penyimpangan baik institusional satuan pendidikan maupun proses pembelajaran.¹²⁸

Adapun alat evaluasi pembelajaran diantaranya sebagai berikut: (1) tes hasil belajar. Untuk mengukur keberhasilan belajar mahasiswa atau dikenal dengan istilah Penilaian Acuan Patokan (PAP). PAP bisa digunakan bila dosen menggunakan tes seperti: tes prasyarat (*entry-behavior test*), tes awal (*pre test*), tes akhir (*post tes*), dan tes pengukur kemajuan (*progress test*); (2) kriteria test. Sebagai alat ukur dalam evaluasi, tes harus memiliki dua kriteria, yaitu validitas dan realibilitas; dan (3) jenis-jenis tes. Tes berdasarkan jumlah mahasiswa, ada tes kelompok atau tes individual. Sedangkan dari cara pelaksanaan, tes dapat dibedakan menjadi tes lisan, tes tulisan dan tes perbuatan.¹²⁹

¹²⁷ Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.

¹²⁸ Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran...*, 146

¹²⁹ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain*, 232-234

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif manusia adalah sebagai sumber data utama dan hasil penelitiannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya (alamiah). Hal ini sesuai dengan pendapat Denzin dan Lincoln yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹³⁰

Penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, sebab dalam studi atau penelitian ini memerlukan penghayatan dan interpretasi terhadap perilaku kepala pengasuh, ketua yayasan dan pendukung lainnya. Selanjutnya mengenai penelitian kualitatif menurut Marriam dan Simpson dalam buku Sardjan yang dijelaskan dalam penelitian Maidatul Jannah terdapat enam jenis, yaitu: (1) etnografi, (2) studi kasus; (3) grounded teori; (4) interaktif; (5) ekologi dan (6) *future*.¹³¹

Dari enam rancangan penelitian tersebut yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) yang menurut Bogdan adalah suatu strategi penelitian yang mengkaji secara rinci suatu latar atau suatu subyek atau suatu tempat penyimpanan dokumen atau suatu peristiwa tertentu. Menurut Donal

¹³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 5.

¹³¹ Asrop Syafi'i, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Elkaf, 2005), 46.

Ary studi kasus adalah: *“In case study the investigator attempt to examine an individual or unit in depth. The investigator tries to discover all the variables that are important in the history or development of the subject”*.¹³²

Tentang jenis dan ragam studi kasus menurut Lingfood yang dikutip oleh Maidatul Jannah dalam penelitiannya menyebutkan terdapat tiga macam studi kasus, yaitu studi kasus tunggal, studi multi kasus dan studi kasus perbandingan. Studi ini menggunakan studi kasus tunggal untuk mendeskripsikan Manajemen Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016, Sehingga dalam konteks ini peneliti memahami proses tersebut dengan menggunakan sudut pandang persepsi *emik*, yang menurut Moeleong adalah suatu pendekatan yang berusaha memahami suatu fenomena yang berangkat titik dari dalam (internal atau domestik).¹³³

Sasaran studi ini adalah perilaku atau tindakan-tindakan, yang dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris Jurusan Tarbiyah dan dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah dalam melakukan proses manajemen pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pendekatan penelitian kualitatif yang sesuai adalah fenomenologik naturalistik.¹³⁴

Penelitian fenomenologi menurut Moeleong bermakna memahami peristiwa dalam kaitannya dengan orang dalam situasi tertentu.¹³⁵ Penelitian ini memahami fenomena-fenomena yang terjadi tentang proses manajemen pembelajaran mulai

¹³² Donal Ary, *An Invitation to Research in Social Education*, (Baverly Hills: Sage Publication, 2002), 424, 425.

¹³³ Lexy, J. Moeleong, Lexy J. Moeleong. *Metodologi Penelitian ...*, .: 55

¹³⁴ Lexy J. Moeleong. *Metodologi Penelitian.....*; 58

¹³⁵ Lexy J. Moeleong. *Metodologi Penelitian... .*; 61

dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada evaluasi dalam Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di yaitu Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember. Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember berada dalam naungan STAI Al-Qodiri Jember. Alasan pemilihan jurusan tarbiyah dijadikan sebagai lokasi penelitian untuk meneliti tentang manajemen pendidikan antikorupsi disebabkan di Jurusan Tarbiyah perencanaannya tidak hanya berpatokan pada sumber buku saja, tapi juga dengan hasil diskusi dengan dosen-dosen lainnya dan pelaksanaan perkuliahan pendidikan antikorupsi diimplementasikan dengan memposisikan mahasiswa lebih banyak berperan aktif dalam perkuliahan, bahkan mahasiswanya diwajibkan mensosialisasikan pendidikan antikorupsi di lembaga pendidikan formal MA dan SMK Al-Qodiri Jember.

C. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kirk dan Miller dalam Nurul menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental

bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasan dan peristiwa.¹³⁶

Kehadiran peneliti merupakan salah satu unsur penting dalam penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang proses manajemen pembelajaran pada matakuliah pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan peneliti, sehingga manusia sebagai instrumen penelitian menjadi suatu keharusan, bahkan dalam penelitian kualitatif, posisi peneliti menjadi instrumen kunci.¹³⁷ Peneliti dalam hal ini adalah sebagai instrumen utama, sehingga kehadiran peneliti adalah merupakan hal yang mutlak. Peneliti bertindak langsung sebagai perencana, pemberi tindakan, mengumpulkan data, menganalisis data dan sebagai pelapor hasil dari penelitian

Peneliti selaku instrumen utama masuk ke latar penelitian agar dapat berhubungan langsung dengan informan, dapat memahami secara alami kenyataan yang ada di latar penelitian, berusaha mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Peneliti berusaha melakukan interaksi dengan informan penelitian secara wajar dan menyikapi segala perubahan yang terjadi di lapangan, berusaha menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lokasi penelitian. Hubungan baik yang tercipta antara peneliti dengan informan penelitian selama berada di lapangan adalah kunci utama keberhasilan pengumpulan data. Hubungan yang

¹³⁶ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), .92

¹³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 21, (Bandung: Alfabeta, 2014), 223.

baik dapat menjamin kepercayaan dan saling pengertian. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan membantu kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap. Peneliti harus menghindari kesan-kesan yang merugikan informan. Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan harus diketahui secara terbuka oleh subjek penelitian.

Dalam kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang berasal dari lapangan, seorang peneliti biasanya menggunakan instrumen yang dan mampu mengambil informasi dari objek atau subjek yang diteliti. Untuk mencapai tujuan tersebut seorang peneliti dapat membuat instrumen.¹³⁸ Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data.¹³⁹ Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen kunci atau utama, sebagai instrumen kunci, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan instrumen tambahan berupa pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi. Pedoman wawancara merupakan lembar acuan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang dirancang oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana proses manajemen pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember

Sedangkan pedoman observasi merupakan alat untuk memudahkan peneliti dalam mengamati data secara lengkap pada waktu berlangsungnya proses penelitian. Pedoman observasi ini digunakan untuk mengetahui kondisi sarana prasarana, suasana aktivitas kegiatan, serta lingkungan pendidikan yang mengarah pada penciptaan suasana yang kondusif di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri

¹³⁸Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2005), 121

¹³⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), 177.

Jember. Adapun pedoman dokumentasi digunakan untuk menggali data terkait dengan sejarah, profil Pesantren dan dokumen lain yang dianggap penting seperti struktur organisasi Pesantren, uraian tugas dan mekanisme kerja pengelola dan tenaga administrasi serta hal-hal yang terkait dengan penelitian ini.

D. Subjek Penelitian

Kemudian, untuk memilih dan menentukan informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel bertujuan dan teknik *snowball sampling*. Penggunaan teknik *purposive sampling* dimaksudkan sebagai teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan. Sementara itu, penggunaan *snowball sampling* ini diibaratkan sebagai bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Sehingga proses penelitian ini baru berhenti setelah informasi yang diperoleh di antara informan yang satu dengan yang lainnya mempunyai kesamaan. Adapun subjek penelitian adalah ketua dan sekretaris Jurusan, dosen matakuliah pendidikan antikorupsi prodi PAI dan mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember.

E. Sumber Data

Data dalam penelitian adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat di jadikan bukti dan bahan dasar kajian. Sedangkan sumber data adalah subyek di mana data di peroleh.¹⁴⁰ Sedangkan menurut Moelong sumber data utama adalah

¹⁴⁰Ibid., 79.

kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data dokumen lain dan data tambahan.¹⁴¹

Adapun data yang terkait dengan penelitian ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersifat langsung di kumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.¹⁴² Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau kata kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan) berkaitan dengan supervisi pengajaran. Sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen, foto foto, dan benda-benda yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil interview dengan: ketua dan sekretaris Jurusan, dosen matakuliah pendidikan antikorupsi prodi PAI dan mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang sudah ada.¹⁴³ Bentuk data sekunder seperti tulisan-tulisan, rekaman-rekaman, gambar-gambar atau foto-foto yang berhubungan dengan supervisi pengajaran. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manusia/orang dan bukan manusia.

Sumber data manusia berfungsi sebagai subjek atau informan kunci (key

¹⁴¹ Lexy Moeloeng *Metode Penelitian Kualitatif...*, 112.

¹⁴² Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian* (Raja Grafindo: Jakarta, 1998.), 84.

informants). Sedangkan sumber data bukan manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto, catatan rapat atau tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Dalam hal ini data digali dengan melihat data-data dokumen di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember.

F. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu: teknik wawancara mendalam, teknik pengamatan peran serta, dan teknik dokumentasi:

1. Teknik Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Hal mendasar yang ingin diperoleh melalui teknik wawancara mendalam adalah minat informan/subjek penelitian dalam memahami orang-orang lain, dan bagaimana mereka memberi makna terhadap pengalaman-pengalaman dalam mereka berinteraksi tersebut. Wawancara secara mendalam memerlukan pedoman wawancara. Pedoman yang digunakan peneliti adalah pedoman wawancara tidak terstruktur karena pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang ditanyakan sehingga kreatifitas peneliti sangat diperlukan.¹⁴⁴

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan informan penelitian, yaitu orang-orang yang dianggap potensial, dalam arti orang-orang tersebut memiliki banyak informasi mengenai masalah yang diteliti.¹⁴⁵ Adapun secara

¹⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek...*, 22.

¹⁴⁵ Bogdan, Biklen, *Qualitative Reseach for Education; an introduction to theory and methods* (Boston: Allyn and Bacon, 1998), 95.

umum data yang akan diperoleh dalam teknik wawancara ini adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dalam mata kuliah pendidikan antikorupsi
- b. Langkah-langkah pengorganisasian pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dalam mata kuliah pendidikan antikorupsi
- c. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dalam mata kuliah pendidikan antikorupsi
- d. Upaya evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dalam mata kuliah pendidikan antikorupsi

2. Teknik Pengamatan Peran Serta (*Participant Observation*)

Observasi partisipan digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang diberikan oleh informan yang kemungkinan belum holistik atau belum mampu menggambarkan segala macam situasi.¹⁴⁶

Teknik pengamatan peran serta dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan subyek. Oleh karena itu, teknik ini disebut observasi peran serta/*participant observation*. Kegiatan pengamatan peran serta yang dilakukan selama penelitian dimulai dari *grand tour observation* (kegiatan observasi menyeluruh). Tujuannya adalah untuk mengetahui semua kegiatan yang berhubungan dengan manajemen pembelajaran baik pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

¹⁴⁶ Lincoln, Guba. *Naturalistic Inquiry*. (New Delhi: Sage Publication, inc, 1995), 124

evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember.

3. Teknik Dokumentasi

Di samping metode wawancara dan observasi partisipasi, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Data dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi partisipasi. Yang dimaksud dengan dokumen menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip oleh Rulam Ahmadi di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara. Dokumen dapat pula berupa usulan, kode etik, buku tahunan, selebaran berita, surat pembaca (di surat kabar, majalah) dan karangan di surat kabar.¹⁴⁷

Data dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi peran serta. Salah satu cara yang dilakukan adalah menelaah rekaman dan dokumen mengenai manajemen pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember.

¹⁴⁷ Rulam Ahmadi, 2005, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Universitas Negeri Malang, Malang) :114

Tabel 3.1
Dokumentasi

No	Jenis Dokumen Keterangan	Keterangan
1	Data Ketenagaan: a. Pendosens Yayasan c. Pendosens Pesantren (tingkat pendidikan, tugas dan sebagainya)	
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan: a. Denah lokasi dan bangunan b. Gedung dan ruangan yang ada c. Fasilitas seperti perpustakaan, Unit Usaha dll d. Sarana pembelajaran lainnya	
3	Manajemen pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi a. RPP b. Silabus c. Jadwal d. Foto dan video pembelajaran e. Dll	

G. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif (berupa kata-kata bukan angka) model interaktif dari Milles dan Hunberman. Menurut Milles dan Hunberman¹⁴⁸ dalam analisis data kualitatif data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka. Data tersebut mungkin telah dikumpulkan dalam berbagai cara seperti observasi, wawancara, atau intisari rekaman yang kemudian “di proses” melalui perencanaan, pengetikan atau pengaturan kembali. yakni dengan menggunakan tiga langkah, yaitu;

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, perumusan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dalam arti, reduksi data merupakan bentuk analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasikannya, sehingga kesimpulan akhir dapat dirumuskan, menyeleksi data secara ketat, membuat ringkasan dan rangkuman inti, merupakan kegiatan-kegiatan mereduksi data. Dengan demikian reduksi data ini akan berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian data

¹⁴⁸ Miles, M.B.& Huberman. *Qualitative Data Analysis: a Source Book of New Methods*. (California: Sage Publication Inc, 1984), 21-22.

Penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Hal ini dimaksudkan untuk memaparkan data secara rinci dan sistematis setelah dianalisis ke dalam format yang disiapkan untuk itu. Namun data yang disajikan masih dalam bentuk data sementara untuk kepentingan peneliti dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut secara cermat, sehingga diperoleh tingkat keabsahannya. Jika ternyata data yang disajikan telah teruji kebenarannya maka akan bisa dilanjutkan pada tahap pemeriksaan kesimpulan-kesimpulan sementara. Akan tetapi jika ternyata data yang disajikan belum sesuai, maka konsekuensinya belum dapat ditarik kesimpulan melainkan harus dilakukan reduksi data kembali.

3. Penarikan kesimpulan

Hal ini dimaksudkan untuk memberi arti atau memakai data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi.¹⁴⁹ Kesimpulan dalam hal ini dimaksudkan untuk pencarian makna data dan penjelasannya, dan makna-makna yang muncul dari data yang diperoleh dilapangan untuk menarik kesimpulan yang tepat dan benar.

H. Uji Keabsahan Data

Adapun uji valliditas data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kredibilitas. Kriteria kredibilitas data digunakan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran, baik bagi pembaca pada

¹⁴⁹ Ibid., 21-23.

umumnya maupun subjek penelitian. Untuk menjamin kesahihan data, ada lima teknik pencapaian kredibilitas data; perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dan pengecekan anggota:

1. Perpanjangan Pengamatan

Hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber karena telah memercayai peneliti. Selain itu, perpanjangan pengamatan dan mendalam dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran data yang telah diperoleh. Perpanjangan waktu pengamatan dapat diakhiri apabila pengecekan kembali data di lapangan telah kredibel.

2. Meningkatkan Ketekunan

Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Ini dimaksudkan guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh. Dengan demikian, peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Ini merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan perbandingan terhadap data yang telah ada.

4. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Dengan demikian temuan penelitian menjadi lebih kredibel.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan yang dimaksud dapat berupa alat perekam suara, kamera, *handycam* dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh peneliti selama melakukan penelitian. Bahan referensi yang dimaksud ini sangat mendukung kredibilitas data.

6. Mengadakan *Membercheck*

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau informan. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid. Pelaksanaan *membercheck* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan.¹⁵⁰

I. Tahapan-Tahapan Penelitian

¹⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...* , 270-276.

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan tiga tahap penelitian sebagaimana pendapat Moleong yaitu: 1) tahap pralapangan (orientasi), 2) tahap pekerjaan lapangan, dan 3) tahap analisis data.¹⁵¹ Ketiga tahapan tersebut berlangsung secara sistematis, artinya tidak bisa menggunakan tahap kedua sebelum tahap pertama dilakukan dan begitu juga sebaliknya serta tidak dapat menggunakan tahap ketiga sebelum tahap kedua dilakukan dan seterusnya.

1. Tahap Pralapangan/Orientasi

Dalam tahap orientasi ini, peneliti melakukan observasi ke lokasi penelitian, yaitu di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember. Selanjutnya, peneliti mulai menggali informasi pada orang-orang yang terlibat (sivitas Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember), yang dapat memberikan beberapa informasi penting tentang manajemen pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi. Berbagai aktivitas penelitian yang peneliti lakukan antara lain: menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mendosens surat-surat yang berkaitan dengan penelitian, memilih dan menentukan informan serta menyiapkan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini, peneliti melakukan berbagai aktivitas penelitian yang terkait dengan fokus penelitian yaitu manajemen pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember. Beberapa aktivitas tersebut yaitu: memahami latar penelitian dan

¹⁵¹ Lexy Moeloeng *Metode Penelitian Kualitatif...*, 85-103.

mempersiapkan diri, memasuki lapangan dan mengumpulkan data/informasi yang dibutuhkan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam mengumpulkan data penulis menggunakan tiga teknik, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti mengawalinya dengan mengadakan pengecekan data dengan para informan dan subjek penelitian serta dokumen-dokumen yang ada untuk membuktikan keabsahan data yang diperoleh. Selanjutnya, peneliti melakukan berbagai perbaikan data yang terkait dengan bahasa, sistematika penulisan maupun penyederhanaan data agar laporan penelitian ini komunikatif dan dapat dipertanggung jawabkan.

Analisis data yang penulis lakukan mengikuti model analisis *interactive*, sebagaimana yang diajukan oleh Miles dan Huberman, dimana prosesnya dari data yang sudah terkumpul, dikomunikasikan (*crosscheck*) dan selanjutnya dilakukan reduksi data untuk memilih data yang sesuai dan bermakna.¹⁵²

4. Tahap penulisan laporan.

Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data.

¹⁵² Ibid. 16.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data dan Hasil Analisis Data

1. Perencanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016

Pelaksanaan suatu kegiatan pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi di lembaga perguruan tinggi termasuk juga di STAI Al-Qodiri Jember membutuhkan suatu perencanaan yang baik. Sampai saat ini, perencanaan pembelajaran di STAI Al-Qodiri Jember sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Ketua STAI Al-Qodiri Jember Asmad Hanisy, S.Pd.I, MM mengatakan: “Selama ini dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah merencanakan pembelajaran dengan baik dan juga sering merencanakan kegiatan pembelajaran di luar jam baik melalui mahasiswa dan lembaga MA dan SMK kelas III, sehingga sampai saat ini tidak ada hambatan.”¹⁵³

Sebagaimana hasil observasi di lapangan, sebelum dosen matakuliah pendidikan anti korupsi mengajar atau masuk kelas, dosen sudah merencanakan dengan ketentuan yang berlaku. Dosen mempersiapkan metode pembelajaran, materi, media dan sebagainya. Bahkan, dosen tersebut terkadang masih mendiskusikan materi dan proses pembelajarannya agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien.¹⁵⁴

¹⁵³Wawancara dengan Ketua STAI Al-Qodiri Jember Asmad Hanisy, S.Pd.I, MM., tanggal 18 April 2016.

¹⁵⁴ Observasi pada tanggal 4 April – 23 Mei 2016 di STAI Al-Qodiri Jember.

Di samping sudah direncanakan dengan baik, perencanaan pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi belum banyak masalah dan hambatan yang terjadi. Kenyataan ini diakui oleh Ketua Jurusan Tarbiyah Nurul Anam, M.Pd.¹⁵⁵

Dia mengatakan:

Seperti biasanya, saya menekankan pada semua termasuk dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi untuk merumuskan penyusunan komponen perangkat perencanaan pembelajaran yang ada di dalam silabus dan SAP. Salah satu yang harus dirumuskan antara lain: 1) merumuskan standar pencapaian, KD dan Indikator tentang pendidikan antikorupsi yang mencakup dan mengarah pada aspek domain kognitif, afektif dan psikomotorik; 2) mendesain proses pembelajaran baik pada aspek pengalaman maupun pada aspek kegiatan pembelajaran; 3) menentukan partisipasi dosen dalam mensukseskan proses pembelajaran; 4) menentukan salah satu sarana dan prasana termasuk di dalamnya media pembelajaran yang akan digunakan dosen dalam kegiatan pembelajaran; 5) merumuskan evaluasi hasil pembelajaran dan pengembangan pembelajaran setelah melakukan keseluruhan proses baik dari awal sampai akhir.

Selama ini, saya tidak melihat ada hambatan yang berarti dalam perencanaan matakuliah pendidikan antikorupsi, karena setelah saya memantau perkuliahan pendidikan antikorupsi dan berdiskusi dengan dosen-dosen pendidikan antikorupsi ternyata perencanaan yang dilakukan atau dirumuskan sudah berjalan dengan baik, apalagi kondisi kampus yang berada di pondok pesantren memudahkan para dosen untuk merumuskan perencanaan pembelajarannya.

Ketua Prodi Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA) M. Ansori, M.Pd.I¹⁵⁶ juga menegaskan dan menambahkan:

Dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah merencanakan pembelajaran dengan baik, bahkan dikategorikan sangat baik, dikarenakan sebelum melaksanakan perkuliahan dosen yang bersangkutan/ pengampu MK. Pend. Anti korupsi sudah mempelajari silabus dan membuat Satuan Acara Perkuliahan (SAP) selama 1 semester kedepan dan diserahkan ke saya sebagai Ketua Prodi PGRA untuk dievaluasi dan diberikan masukan di dalamnya.

... 1 Bulan sebelum dosen tersebut ditunjuk dan diberikan edaran tentang surat tugas mengajar sebagai dosen pengampu tugas Matakuliah Pendidikan

¹⁵⁵ Wawancara dengan Ketua Jurusan Tarbiyah Nurul Anam, M.Pd., tanggal 21 April 2016.

¹⁵⁶ Wawancara dengan Ketua Prodi Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA) M. Ansori, M.Pd.I, tanggal 25 April 2016.

Anti Korupsi, yang bersangkutan sudah kami minta untuk membaca silabus / buku panduan akademik STAI Al-Qodiri Jember, sehingga waktu 1 bulan menjadi waktu yang maksimal dirasa untuk merancang SAP MK. Pend. Anti Korupsi, dan itu sudah dibuktikan kepada saya oleh dosen yang bersangkutan.

Salah satu hambatan yang dihadapi dosen tersebut adalah 1) perencanaan SAP, dikarenakan MK. tersebut tergolong baru, 2) praktek di lapangan terjun di lembaga pendidikan, ex : MTs/ MA/ SMK. 3) membuat evaluasi mahasiswa, apakah benar-benar nilai-nilai yang diharapkan sudah tertanam dalam diri mahasiswa apa tidak.

Selain itu, dosen matakuliah pendidikan antikorupsi Dina Tsalist Wildana, LLM¹⁵⁷ menjelaskan:

Pemberi pengajaran dan memberi kesempatan praktik. Dalam hal ini secara kognitif dan afektif mahasiswa diberikan informasi mengenai bentuk-bentuk korupsi baik secara normatif maupun secara sosiologis. Kemudian mengingat Al-Qodiri merupakan pondok pesantren yang di dalamnya memiliki lembaga pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi maka dalam hal psikomotorik mahasiswa mempraktikkan pengetahuannya tentang karakter anti korupsi di berbagai lembaga tersebut.

Tujuan saya memberikan matakuliah ini, selain karena tanggungjawab yang diberikan oleh pihak kampus, juga untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang korupsi, bentuk-bentuknya penyebab serta cara menganggulangnya. Untuk itu perlu mengenal pendidikan karakter anti korupsi yang meliputi: kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Yang kesemuanya ini sulit dijumpai baik di mahasiswa, maupun para siswa. Tujuan pendidikan ini adalah mengingatkan, membangkitkan dan menyebarluaskan karakter anti korupsi ini baik di tingkat mahasiswa dan lembaga pendidikan lain di bawahnya.

Langkah-langkah proses belajar: a) menentukan tujuan pembelajaran, b) memanfaatkan *resources*, c) memilih materi, d) mengembangkan materi, e) evaluasi. Mahasiswa merupakan calon guru yang menempuh pendidikan di STAI Al-Qodiri, yang mana Al-Qodiri memiliki lembaga pendidikan mulai dari TK hingga perguruan Tinggi. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mempraktikkan ilmunya di lembaga pendidikan tersebut.

Pendekatan yang dilakukan adalah gabungan antara individu dan kelompok. Pendekatan individu dilakukan terhadap penanaman aspek kognitif dan afektif. Dan pendekatan kelompok dilakukan dalam hal penerapan psikomotorik. Fasilitas-fasilitas tersebut digunakan dan ditambah dengan penggunaan film dokumenter dan praktik di kelas. Evaluasi dan

¹⁵⁷ Wawancara dengan Dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi Dina Tsalist Wildana, LLM, tanggal 27 April 2016.

pengembangan dilakukan melalui ujian tertulis dan praktikum. Dengan cara memanfaatkan *resources* yang ada, mengingat proses pembelajaran tiap daerah berbeda. Di Jawa dan di luar Jawa pun berbeda, justru ketika disamakan akan mencari-cari yang tidak ada dan mensia-siakan sumber daya yang melimpah. Untuk itu perlu membaca peluang dan tantangan yang ada

Sedangkan Sitatul Maimunah¹⁵⁸ sebagai mahasiswa semester 8 STAI Al-Qodiri Jember mengatakan:

Dosen dengan matakuliah pendidikan anti korupsi sudah melaksanakan perencanaan pembelajaran dengan baik karena mahasiswa tidak hanya diajarkan teori saja tapi juga langsung dengan prakteknya. Seperti melakukan praktek dengan cara mendiskusikan problema yang telah sering terjadi di negara kita dan dari dosen sendiri mencontohkan seperti di kemenag.

Dengan demikian, dalam mempersiapkan perencanaan matakuliah pendidikan antikorupsi, dosen sudah melaksanakan perencanaan pembelajaran dengan ketentuan yang sudah ditetapkan karena mahasiswa tidak hanya diajarkan teori saja tapi juga langsung dengan prakteknya. Seperti melakukan praktek dengan cara mendiskusikan problema yang telah sering terjadi di negara kita dan dari dosen sendiri mencontohkan seperti di kemenag.

Sebagaimana hasil dokumentasi di *out line* perkuliahan dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP), perencanaan perkuliahan dipersiapkan dengan baik, seperti penentuan standar pencapaian, KD, indikator perkuliahan, materi perkuliahan, tujuan perkuliahan, strategi dan metode perkuliahan, kegiatan perkuliahan,

¹⁵⁸ Wawancara dengan mahasiswa semester 8 Sitatul Maimunah Prodi PAI STAI Al-Qodiri Jember, tanggal 29 April 2016.

referensi dan penilaiannya. Dengan demikian, perkuliahan yang dilangsungkan oleh dosen dipersiapkan dengan baik sebelum perkuliahan berlangsung.¹⁵⁹

2. Pengorganisasian Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016

Pada langkah kedua manajemen pembelajaran adalah pengorganisasian. Langkah kedua ini juga dilakukan oleh dosen yang mengampu mata kuliah pendidikan antikorupsi. Ketua Jurusan STAI Al-Qodiri Jember Nurul Anam, M. Pd.,¹⁶⁰ mengatakan:

Setelah merumuskan perencanaan pembelajaran, langkah yang harus dilakukan oleh dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi adalah: 1) menyediakan beberapa sarana dan prasana kampus yang digunakan dan personel yang diperlukan untuk penyusunan kerangka yang efektif dan efisien; 2) mengelompokkan komponen pembelajaran dalam struktur lembaga pendidikan secara teratur, 3) membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran, baik antara dosen, mahasiswa maupun personel lainnya; dan 4) menetapkan metode dan prosedur pembelajaran secara sistematis dari awal sampai berakhirnya kegiatan pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi ini akan memberikan gambaran bahwa kegiatan belajar dan mengajar mempunyai arah dan penanggungjawab yang jelas. Dari pengorganisasian ini akan jelas kedudukan ketua STAI Al-Qodiri Jember dalam memberikan fasilitas dan kelengkapan pembelajaran, kedudukan mahasiswa baik di kelas maupun di luar kelas, kedudukan dosen untuk menentukan dan mendesain pembelajaran dengan mengorganisasikan alokasi waktu, desain kurikulum, media dan kelengkapan pembelajaran, dan lainnya yang berkaitan dengan suksesnya penyelenggaraan kegiatan belajar. Pengorganisasian pembelajaran bertujuan agar semua yang sudah direncanakan dapat disampaikan secara maksimal. Pengorganisasian pembelajaran berjalan dengan baik, karena kampus memberikan kesempatan yang luas untuk mengorganisir pembelajaran. Kampus juga menyediakan fasilitas yang diinginkan oleh dosen matakuliah pendidikan antikorupsi.

¹⁵⁹ Dokumentasi *out line* perkuliahan dan SAP Matakuliah Pendidikan Antikorupsi, diambil tanggal 4 April 2016.

¹⁶⁰ Wawancara dengan Ketua Jurusan Tarbiyah Nurul Anam, M.Pd., tanggal 21 April 2016.

Sebagaimana hasil observasi, dosen matakuliah pendidikan antikorupsi mengorganisir pembelajaran dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Sebelum perkuliahan di mulai, dosen sudah mengorganisir kewenangan dirinya dan siswa ketika berada di kelas. Dia juga mengorganisir kegiatan prosedur pembelajaran dengan sistematis sebagaimana terlihat rancangan pelaksanaan pembelajaran yang disusun dengan memperhatikan konteks, suasana, dan tujuan dari pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi.¹⁶¹

Di samping itu, Bapak M. Ansori, M.Pd.I sebagai Ketua Prodi PGRA menyatakan sebagai berikut:

Cara pengorganisasian pembelajaran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan adanya perencanaan Pembelajaran yang ada di SAP dengan realitas pembelajaran yang dilaksanakan dosen Pendidikan Antikorupsi sudah sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh Prodi Jurusan Tarbiyah yakni 3x45 Menit.

Kendalah yang dihadapi dari dosen tersebut adalah, dia (dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi) merasa waktu tersebut masih kurang, mengingat materi dan cara aplikasi teori Pendidikan Antikorupsi tidak cukup dengan waktu tersebut saja, makanya dosen tersebut lalu menemui saya untuk meminta waktu lebih di luar waktu untuk mengadakan pemantapan/penyempurnaan materi yang belum selesai disampaikan di kelas.¹⁶²

Sebagai dosen pendidikan antikorupsi, Dina Tsalist Wildana, LLM menjelaskan bahwa dia sudah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyediakan fasilitas, perlengkapan dan personel yang diperlukan untuk penyusunan kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui suatu proses penetapan pelaksanaan pembelajaran yang diperlukan untuk menyelesaikannya.
- b. Mengelompokkan komponen pembelajaran dalam struktur lembaga pendidikan secara teratur.
- c. Membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran.

¹⁶¹ Observasi pada tanggal 4 April – 23 Mei 2016 di STAI Al-Qodiri Jember.

¹⁶² Wawancara dengan Ketua Prodi Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA) M. Ansori, M.Pd.I, tanggal 25 April 2016.

d. Merumuskan dan menetapkan metode dan prosedur pembelajaran.¹⁶³

Pada waktu Ibu Dina¹⁶⁴ mau mengajar, dia juga menyediakan memanfaatkan berbagai media pembelajaran, interaksi yang variatif dan beberapa metode pembelajaran. Dia mengatakan:

... Membuat media pembelajaran (*power point*), mempersiapkan peraturan perundang-undangan, studi kasus serta film dokumenter. Kemudian membagiannya kedalam silabus. Mekanisme pembelajaran dilakukan secara variatif, ada kalanya bersifat satu arah dalam hal menjelaskan korupsi secara normatif, dan ada saatnya berdialog dua arah, (*dialogis*) antara mahasiswa dan dosen pada saat menceritakan pengalaman masing-masing terkait budaya korupsi yang sering dijumpai di masyarakat. Metode yang digunakan: ceramah, dialigis, analisis kasus, dan refleksi film dokumenter.

Sedangkan menurut mahasiswa Matakuliah Pendidikan Antikorupsi Sitatul Maimunah menjelaskan:

Selama ini, dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah mengorganisasi pembelajaran secara efektif, karena melihat dari proses pembelajaran yang telah terlaksana sudah sesuai dengan RPP yang telah direncanakan. Selama ini dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah mengorganisasi pembelajaran secara efisien, karena dosen mengajarkan matakuliah atikorupsi dosen harus selalu efisien, tapi dikarenakan memang sudah dari kepribadian dosen dan dari kepribadiannya tersebut dosen terapkan dalam sistem KBM dan juga selalu menganjurkan pada mahasiswa untuk tidak korupsi dalam hal apapun.¹⁶⁵

¹⁶³ Wawancara dengan Dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi Dina Tsalist Wildana, LLM, tanggal 27 April 2016.

¹⁶⁴ Ibid.

¹⁶⁵ Wawancara dengan mahasiswa semester 8 Sitatul Maimunah Prodi PAI STAI Al-Qodiri Jember, tanggal 29 April 2016.

3. Pelaksanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember dilaksanakan variatif. Dosen matakuliah pendidikan antikorupsi tidak hanya melaksanakan pendidikan di dalam kampus dan tidak hanya sesuai dengan jam perkuliahan matakuliah tersebut. Ketua STAI Al-Qodiri Jember Asmad Hanisy, S.Pd.I, MM mengatakan:

Selama ini dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, karena materi tersebut sering dilaksanakan bahkan dosen bersangkutan selalu izin bila melibatkan instansi-instansi di luar kampus. juga sering mengadakan kegiatan di luar jam baik melalui mahasiswa dan lembaga MA dan SMK kelas III. Hambatan tidak terlalu banyak karena tradisi pondok antara halal dan haram sudah jelas. Pengaruh ke STAI Al-Qodiri sangat pengaruh, karena tradisi pondok ada *culture ghasab*, maka adanya matakuliah ini menjadi motivasi bagi mereka atau berbuat lebih baik.¹⁶⁶

Sedangkan Ketua Jurusan Tarbiyah Nurul Anam, M.Pd menjelaskan sebagai berikut:

Saya melihat pelaksanaan pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan dan pengorganisasian yang telah dilakukan oleh dosen. Pelaksanaan pembelajaran berjalan secara variatif dengan menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Semua tahap pembelajaran mulai dari pra intruksional/pendahuluan, tahap intrksional/inti pembelajaran, dan penutup sudah dijalankan dengan baik. Selama ini, dosen tidak hanya menggunakan kelas sebagai tempat pembelajaran tapi juga di luar kelas atau bahkan di auditorium STAI Al-Qodiri Jember dengan mengadakan seminar antikorupsi. Pada acara tersebut, audiennya merupakan anak MA dan SMK Al-Qodiri Jember dan mahasiswa sebagai panitia dan penyaji sosialisasi pendidikan antikorupsi.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Wawancara dengan Ketua STAI Al-Qodiri Jember Asmad Hanisy, S.Pd.I, MM., tanggal 18 April 2016.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Ketua Jurusan Tarbiyah Nurul Anam, M.Pd., tanggal 21 April 2016.

Pelaksanaan matakuliah pendidikan antikorupsi yang berjalan dengan baik juga diakui oleh Ketua Prodi PGRA M. Ansori, M.Pd.I. Dia menjelaskan sebagai berikut:

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember sudah baik, karena antara SAP yang disusun dan kesesuaian waktu yang ditentukan sudah sesuai dan selama ini berjalan baik. Meski lagi-lagi waktu 2 jam masih gak cukup. Selain belajar dikelas, diakhir perkuliahan materi ini menuntut mahasiswa harus bisa praktek lapangan berupa mensosialisasikan ke siswa di bawahnya (tingkat MTs/ MA/ SMK), tentang pentingnya Pendidikan Anti Korupsi itu.¹⁶⁸

Sedangkan dalam setiap pertemuan, pada awal perkuliahannya dilakukan *pre test*, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari dosen dan mahasiswa, serta terakhir terdapat evaluasi. Dina Tsalist Wildana, LLM¹⁶⁹ sebagai dosen matakuliah pendidikan antikorupsi mengatakan:

Pre test tentang materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengungkapkan kembali materi sebelumnya dengan menggunakan bahasa mereka masing-masing dan memberikan penjelasan mengenai materi berikut contoh. Dalam hal ini mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mencari kenyataan yang terjadi di masyarakat. Juga mahasiswa diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan, diberikan kesempatan kepada mahasiswa lain untuk menjawab kemudian dosen memberikan penjelasan terkait pertanyaan dan argumen mahasiswa. Evaluasi dilakukan melalui ujian pada saat UTS dan praktikum dikelas yang merupakan tugas akhir UAS.

Selain itu, tanggapan siswa terhadap pelaksanaan mata kuliah pendidikan antikorupsi sangat positif. Sebagai mahasiswa pada mata kuliah pendidikan antikorupsi Sitatul Maimunah mengatakan:

¹⁶⁸ Wawancara dengan Ketua Prodi Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA) M. Ansori, M.Pd.I, tanggal 25 April 2016.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi Dina Tsalist Wildana, LLM, tanggal 25 April 2016.

Dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, karena melihat dari proses KBM yang telah berlangsung selama ini... Dalam proses KBM, beliau sedikit. banyak mahasiswa lebih aktif dan juga dari penjelasan beliau mudah ditanggapi mereka masing-masing. Metode yang digunakan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Antusias mahasiswa sangat besar dalam matakuliah pendidikan antikorupsi.¹⁷⁰

Sedangkan menurut Mashuri¹⁷¹ sebagai mahasiswa matakuliah pendidikan antikorupsi menjelaskan:

Dosen materi pendidikan antikorupsi sudah berupaya penuh, baik dari segi disiplin waktu, dan pemberian materi-materi yang memenuhi waktu. Mungkin banyak strategi/metode, di antaranya: 1) ceramah (dosen memberi materi dan penjelasannya secara lisan), 2) tanya jawab, 3) demonstrasi dengan proyektor dan presentasi dengan kemudian tanya jawab antar mahasiswa.

Sebagaimana hasil observasi menunjukkan bahwa proses pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi dilaksanakan dengan baik. Dosen matakuliah pendidikan antikorupsi menggunakan banyak strategi atau metode, seperti *group to group*, pembelajaran berbasis masalah, inquiri, sosialisasi, ceramah, diskusi dan sebagainya. Dosen juga memberikan kesempatan yang sangat besar terhadap mahasiswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, bahkan pada waktu sosialisasi pendidikan antikorupsi pada para siswa MA dan SMK Al-Qodiri Jember, mahasiswa lebih aktif dan menjadi leader dalam sosialisasi tersebut. Proses pembelajarannya juga sesuai dengan keinginan dosen seperti yang sudah tertera dalam outline pembelajaran mata kuliah pendidikan antikorupsi. Selain proses pembelajaran di kelas dan sosialisasi pendidikan anti korupsi, dosen

¹⁷⁰ Wawancara dengan mahasiswa semester 8 Sitatul Maimunah Prodi PAI STAI Al-Qodiri Jember, tanggal 29 April 2016.

¹⁷¹ Wawancara dengan Mashuri mahasiswa semester 8 Prodi PAI STAI Al-Qodiri Jember, tanggal 29 April 2016.

pendidikan antikorupsi juga membudayakan dengan membiasakan mahasiswa untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi dari hal yang sederhana, seperti menghentikan kebiasaan *ghasab* sandal, disiplin dalam belajar dan sebagainya.¹⁷²

Hasil observasi dan wawancara di atas juga diperkuat oleh hasil dokumentasi, seperti dalam *out line* dan SAP dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi. Di dalam dua dokumen tersebut didiskripsikan tentang kegiatan perkuliahan yang dilakukan dengan tiga tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Dosen matakuliah pendidikan antikorupsi menggunakan banyak strategi atau metode, seperti *group to group*, pembelajaran berbasis masalah, inquiri, sosialisasi, ceramah, diskusi dan sebagainya.¹⁷³

4. Evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016

Pelaksanaan evaluasi matakuliah pendidikan antikorupsi sangat penting dilakukan dalam pembelajaran di Jurusan Tarbiyah. Selama ini, pelaksanaannya berjalan dengan baik karena didukung juga oleh suasana pesantren. Pernyataan ini dijelaskan oleh Ketua STAI Al-Qodiri Jember Asmad Hanisy, S.Pd.I, MM,¹⁷⁴

yakni sebagai berikut:

Saya kira pelaksanaan evaluasi sudah dilaksanakan dengan baik. Evaluasi merupakan hal sangat penting dilakukan oleh dosen terutama materi yang telah disampaikan. Hambatan tidak terlalu besar dalam mengevaluasi mahasiswa, karena budaya lingkungan pesantren yang sangat mendukung untuk menerapkan materi pendidikan anti korupsi.

¹⁷² Observasi pada tanggal 4 April – 23 Mei 2016 di STAI Al-Qodiri Jember.

¹⁷³ Dokumentasi *out line* perkuliahan dan SAP Matakuliah Pendidikan Antikorupsi, diambil tanggal 4 April 2016.

¹⁷⁴ Wawancara dengan Ketua STAI Al-Qodiri Jember Asmad Hanisy, S.Pd.I, MM., tanggal 18 April 2016.

Sedangkan Ketua Jurusan Tarbiyah Nurul Anam, M.Pd.,¹⁷⁵ juga menambahkan penjelasan evaluasi pendidikan antikorupsi, sebagai berikut:

Evaluasi pembelajaran juga dilakukan oleh dosen matakuliah pendidikan antikorupsi baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar mahasiswa ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan oleh dosen dalam pembelajaran baik itu berbentuk formatif maupun sumatif. Ketika dosen tersebut telah melakukan evaluasi formatif, dosen tersebut kadang mengembangkan materi dan berdiskusi dengan dosen lainnya serta dengan saya sebagai kajar untuk mengembangkan semua unit baik dari materi, metode, waktu maupun yang lainnya. Begitu juga pada waktu dosen tersebut melakukan evaluasi sumatif. Dosen tersebut juga mengembangkan referensi berdiskusi dengan dosen lainnya serta dengan saya untuk menilai apa proses pembelajaran yang telah dilalui membuat mahasiswa sudah mampu mengembangkan tiga ranah tersebut yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.

Sedangkan pada tahap evaluasi proses pembelajaran, dosen matakuliah pendidikan antikorupsi juga telah melakukan. Dosen tersebut melakukan evaluasi setelah proses pembelajaran selesai. Seperti contohnya, pada waktu tahun pertama mengajar, dosen tersebut masih belum banyak melakukan pengembangan pembelajaran, tetapi setelah tahun kedua banyak inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh dosen tersebut terutama dalam proses evaluasi pembelajaran, seperti tugas menulis kisah nyata yang berkaitan dengan korupsi. Tugas ini untuk menggugah afeksi, kreatifitas menulis dan kemampuan mahasiswa. Selain itu, ada tugas sosialisasi pendidikan antikorupsi ke lembaga pendidikan MTs, MA dan SMK Al-Qodiri yang tiada lain untuk mengetahui apa mahasiswa tersebut sudah menguasai terutama konsep pendidikan antikorupsi terhadap apa yang telah dia pelajari.

Dari dua evaluasi tersebut, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaiannya semakin berkembang dengan baik. Evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi yang dilakukan oleh dosen tersebut tidak monoton hanya pada tes tulis yang berbentuk esay saja. Evaluasi proses juga dilakukan oleh dosen, baik yang berbentuk keaktifan dalam kelas, diskusi, portofolio, menulis esay dan menanggapi berita dinamika korupsi di koran, majalah atau internet. Dari beberapa penilaian di atas, Alhamdulillah hasil evaluasi yang dilakukan oleh dosen berjalan dengan baik dan rata-rata mahasiswa mendapatkan nilai di atas 80 ke atas. Hanya beberapa saja yang mendapat di bawah nilai 80. Ini menunjukkan keberhasilan dosen tersebut dalam melaksanakan proses pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember. Dengan demikian,

¹⁷⁵ Wawancara dengan Ketua Jurusan Tarbiyah Nurul Anam, M.Pd., tanggal 21 April 2016.

langkah-langkah yang ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses sudah dilakukan oleh dosen matakuliah pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember.

Kelancaran pelaksanaan evaluasi matakuliah pendidikan antikorupsi juga diakui oleh Ketua Prodi PGRA M. Ansori, M.Pd.I. Dia menjelaskan sebagai berikut:

... Dosen yang bersangkutan sudah mengevaluasi kegiatan perkuliahan tersebut dengan baik, hal ini dilakukan oleh dosen yang bersangkutan dengan cara, penilaian yang berorientasi pada tiga aspek (kognitif, afektif dan psikomotorik) yang aspek penilaian tersebut akan dikeluarkan dosen yang bersangkutan bilamana mahasiswa benar-benar sudah melaksanakan praktek di lapangan (MTs, MA/ SMK).¹⁷⁶

Pak Ansori menambahkan bahwa pelaksanaan evaluasi matakuliah pendidikan antikorupsi mempunyai pengaruh yang positif. Dia mengatakan:

... Jelas punya pengaruh positif, terbukti ketika setelah mengikuti proses Pendidikan Antikorupsi nilai mata kuliah yang lain ikut naik, dan ketika saya tanyakan ke salah satu mahasiswa yang pernah mengikuti mata kuliah ini, dia (mahasiswa) merasa belajarnya lebih semangat, dan tidak/ takut untuk mencontek.“ Mencontek itu sebagian dari tindak pidana korupsi lho Pak”, itu kata mahasiswa.¹⁷⁷

Selain itu, dosen matakuliah pendidikan antikorupsi Ibu Dina Tsalist Wildana, LLM¹⁷⁸ mengatakan sebagai berikut:

Evaluasi matakuliah pendidikan antikorupsi berupa 2 bentuk: a) ujian untuk menilai penguasaan mahasiswa di bidang kognitif dan psikomotorik. Dilakukan ketika UTS, b) ujian dalam bentuk praktikum untuk menilai penguasaan mahasiswa di bidang kognitif, afektif dan psikomotorik. Dilakukan saat proses perkuliahan, sosialisasi pendidikan antikorupsi dan UAS. Suasana ujian yang mencerminkan 9 nilai anti korupsi yaitu

¹⁷⁶ Wawancara dengan Ketua Prodi Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA) M. Ansori, M.Pd.I, tanggal 25 April 2016.

¹⁷⁷ Ibid.

¹⁷⁸ Wawancara dengan Dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi Dina Tsalist Wildana, LLM, tanggal 27 April 2016.

kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Setidaknya karakter ini bisa terbentuk dengan menciptakan suasana yang kondusif misalnya: ketika ujian berbagai catatan, hp dan tas dikumpulkan di depan ruangan, sanksi yang tegas terhadap mahasiswa yang melakukan kerjasama dalam kecurangan.

Beberapa pernyataan di atas mendapat respon juga dari mahasiswa. Sitatul

Maimunah¹⁷⁹ sebagai mahasiswa mata kuliah pendidikan antikorupsi menjelaskan:

Selama ini dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah mengevaluasi pembelajaran dengan baik, karena dosen mengevaluasi materi sesuai dengan yang dosen rencanakan. Pelaksanaan evaluasi dan proses pembelajaran mata kuliah pendidikan antikorupsi mempunyai pengaruh yang baik bagi peningkatan hasil belajar mahasiswa di STAI Al-Qodiri Jember, karena mahasiswa lebih kritis dalam menanggapi masalah politik dan ekonomi terutama dalam menanggapi masalah politik dan ekonomi terutama dalam negara dan lembaga-lembaga politik di negara.

Sebagaimana hasil observasi, evaluasi matakuliah pendidikan antikorupsi tidak hanya terpaku pada evaluasi akhir saja, tetapi juga pada evaluasi proses. Dosen tidak hanya menggunakan bentuk esay untuk mengetahui kemampuan yang sudah dimiliki mahasiswa, dosen juga menggunakan bentuk evaluasi lain seperti portofolio, membuat tulisan yang berisi tanggapan tentang berita korupsi yang ada di koran, majalah dan internet. Dosen mengevaluasi juga ketika mahasiswa tersebut sosialisasi pendidikan antikorupsi kepada siswa MA dan SMK Al-Qodiri Jember apakah mahasiswa tersebut menguasai tentang pendidikan antikorupsi yang telah dia pelajari di kampus. Pada saat itu, mahasiswa yang menyampaikan pada para siswa tentang pendidikan antikorupsi.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Wawancara dengan mahasiswa semester 8 Sitatul Maimunah Prodi PAI STAI Al-Qodiri Jember, tanggal 29 April 2016.

¹⁸⁰ Observasi pada tanggal 4 April – 23 Mei 2016 di STAI Al-Qodiri Jember.

Demikian juga dari hasil dokumentasi, seperti dalam *out line* dan SAP dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi. Dosen tidak hanya menggunakan bentuk esay untuk mengetahui kemampuan yang sudah dimiliki mahasiswa, dosen juga menggunakan bentuk evaluasi lain seperti portofolio, observasi, membuat tulisan yang berisi tanggapan tentang berita korupsi yang ada di koran, majalah dan internet.¹⁸¹

B. Hasil Penelitian

A. Perencanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember

Suatu kegiatan pembelajaran akan mengalami kesuksesan apabila terdapat suatu perencanaan yang bagus termasuk dalam kegiatan pembelajaran pada matakuliah pendidikan antikorupsi di STAI Al-Qodiri Jember. Sampai saat ini, perencanaan pembelajaran di STAI Al-Qodiri Jember sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Sebelum dosen matakuliah pendidikan anti korupsi mengajar atau masuk kelas, dosen sudah merencanakan dengan baik. Dosen mempersiapkan metode pembelajaran, materi, media dan sebagainya. Bahkan, dosen tersebut terkadang masih mendiskusikan materi dan proses pembelajarannya agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien.

Semua dosen termasuk dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi telah merumuskan perencanaan pembelajaran. Salah satu yang dirumuskan antara lain:

1) merumuskan SK, KD dan Indikator tentang pendidikan antikorupsi yang

¹⁸¹ Dokumentasi *out line* perkuliahan dan SAP Matakuliah Pendidikan Antikorupsi, diambil tanggal 4 April 2016.

mencakup dan mengarah pada aspek domain kognitif, afektif dan psikomotorik; 2) mendesain proses pembelajaran baik pada aspek pengalaman maupun pada aspek kegiatan pembelajaran; 3) menentukan partisipasi dosen dalam mensukseskan proses pembelajaran; 4) menentukan salah satu sarana dan prasana termasuk di dalamnya media pembelajaran yang akan digunakan dosen dalam kegiatan pembelajaran; 5) merumuskan evaluasi hasil pembelajaran dan pengembangan pembelajaran setelah melakukan keseluruhan proses baik dari awal sampai akhir.

Semua itu terangkum dalam komponen perangkat perencanaan pembelajaran yang ada di dalam silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Sebelum melaksanakan perkuliahan dosen yang bersangkutan/pengampu Matakuliah Pendidikan Anti korupsi sudah mempelajari silabus dan membuat SAP selama 1 semester kedepan dan diserahkan ke ketua prodi untuk dievaluasi dan diberikan masukan didalamnya. Sebelum merumuskan Silabus dan SAP matakuliah pendidikan antikorupsi, satu bulan sebelumnya, dosen tersebut ditunjuk dan diberikan edaran tentang surat tugas mengajar sebagai dosen pengampu tugas Matakuliah Pendidikan Anti Korupsi. Dosen yang bersangkutan dimintai untuk membaca silabus, mengembangkan silabus yang suda ada, dan membaca buku panduan akademik kurikulum matakuliah pendidikan antikorupsi, sehingga waktu 1 bulan menjadi waktu yang maksimal untuk merancang silabus dan SAP Matakuliah Pendidikan Antikorupsi.

Dalam merancang rumusan SK, KD dan Indikator tentang pendidikan antikorupsi yang mengarah pada aspek domain kognitif, afektif dan psikomotorik

terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Salah satu langkah tersebut adalah pada aspek kognitif dan afektif, mahasiswa diberikan informasi mengenai bentuk-bentuk korupsi baik secara normatif maupun secara sosiologis. Kemudian mengingat Al-Qodiri merupakan pondok pesantren yang di dalamnya memiliki lembaga pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi maka dalam hal psikomotorik mahasiswa mempraktikkan pengetahuannya tentang karakter anti korupsi di berbagai lembaga tersebut.

Adapun rumusan tujuan matakuliah pendidikan antikorupsi adalah untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang korupsi, bentuk-bentuknya penyebab serta cara menganggulangnya. Untuk itu perlu mengenal pendidikan karakter anti korupsi yang meliputi: kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Yang kesemuanya ini sulit dijumpai baik di mahasiswa, maupun para siswa. Tujuan pendidikan ini adalah mengingatkan, membangkitkan dan menyebarluaskan karakter anti korupsi ini baik di tingkat mahasiswa dan lembaga pendidikan lain di bawahnya.

Sedangkan perencanaan langkah-langkah proses belajar di antaranya meliputi: a) menentukan tujuan pembelajaran, b) memanfaatkan *resources*, c) memilih materi, d) mengembangkan materi, e) evaluasi. Mahasiswa merupakan calon guru yang menempuh pendidikan di STAI Al-Qodiri, yang mana Al-Qodiri memiliki lembaga pendidikan mulai dari TK hingga perguruan Tinggi. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mempraktikkan ilmunya di lembaga pendidikan tersebut. Pendekatan yang dilakukan adalah gabungan antara individu dan kelompok. Pendekatan individu dilakukan terhadap penanaman

aspek kognitif dan afektif. Pendekatan kelompok dilakukan dalam hal penerapan psikomotorik. Fasilitas-fasilitas tersebut digunakan dan ditambah dengan penggunaan film dokumenter dan praktik di kelas. Evaluasi dan pengembangan dilakukan melalui ujian tertulis dan praktikum dengan cara memanfaatkan *resources* yang ada.

Dalam merencanakan matakuliah pendidikan antikorupsi, dosen Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember tidak mengalami hambatan yang banyak, karena perkuliahan pendidikan antikorupsi sudah berjalan dengan baik, apalagi kondisi kampus yang berada di pondok pesantren, sehingga hal ini memudahkan para dosen untuk merumuskan perencanaan pembelajarannya. Salah satu kegiatan yang ada hambatan atau rintangannya yaitu: 1) perencanaan SAP, dikarenakan matakuliah tersebut tergolong baru, 2) praktek di lapangan dengan terjun di lembaga pendidikan, seperti di MTs/ MA/ SMK. 3) evaluasi pembelajaran mahasiswa. Sesuatu yang sangat diperhatikan dosen adalah apakah benar-benar nilai-nilai yang diharapkan sudah tertanam dalam diri mahasiswa apa tidak. Tuntutan ini yang selalu diperhatikan dosen dan dicari format evaluasi yang ideal dan realistis untuk diterapkan kepada mahasiswa.

B. Pengorganisasian Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember

Pada langkah kedua manajemen pembelajaran adalah pengorganisasian. Setelah merumuskan perencanaan pembelajaran, langkah-langkah yang dilakukan oleh dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi adalah: 1) menyediakan beberapa

sarana dan prasana kampus yang digunakan dan personel yang diperlukan untuk penyusunan kerangka yang efektif dan efisien; 2) mengelompokkan komponen pembelajaran dalam struktur lembaga pendidikan secara teratur, 3) membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran, baik antara dosen, mahasiswa maupun personel lainnya; dan 4) menetapkan metode dan prosedur pembelajaran secara sistematis dari awal sampai berakhirnya kegiatan pembelajaran.

Pengorganisasian pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi ini akan memberikan gambaran bahwa kegiatan belajar dan mengajar mempunyai arah dan penanggungjawab yang jelas. Dari pengorganisasian ini akan jelas kedudukan ketua STAI Al-Qodiri Jember dalam memberikan fasilitas dan kelengkapan pembelajaran, kedudukan mahasiswa baik di kelas maupun di luar kelas, kedudukan dosen untuk menentukan dan mendesain pembelajaran dengan mengorganisasikan alokasi waktu, desain kurikulum, media dan kelengkapan pembelajaran, dan lainnya yang berkaitan dengan suksesnya penyelenggaraan kegiatan belajar. Pengorganisasian pembelajaran bertujuan agar semua yang sudah direncanakan dapat disampaikan secara maksimal. Pengorganisasian pembelajaran berjalan dengan baik, karena kampus memberikan kesempatan yang luas untuk mengorganisir pembelajaran. Kampus juga menyediakan fasilitas yang diinginkan oleh dosen matakuliah pendidikan antikorupsi.

Pengorganisasian dilakukan sebelum perkuliahan dimulai. Pada waktu itu, dosen sudah mengorganisir semua yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran, seperti antara lain kewenangan dirinya dan siswa ketika berada di kelas. Dia juga

mengorganisir kegiatan prosedur pembelajaran dengan sistematis sebagaimana terlihat rancangan pelaksanaan pembelajaran yang disusun dengan memperhatikan konteks, suasana, dan tujuan dari pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi. Dosen juga menyediakan atau bahkan membuat media pembelajaran (*power point*), mempersiapkan peraturan perundang-undangan, studi kasus serta film dokumenter. Kemudian membagiannya kedalam silabus. Mekanisme pembelajaran dilakukan secara variatif, ada kalanya bersifat satu arah dalam hal menjelaskan korupsi secara normatif, dan ada saatnya berdialog dua arah, (*dialogis*) antara mahasiswa dan dosen pada saat menceritakan pengalaman masing-masing terkait budaya korupsi yang sering dijumpai di masyarakat. Metode yang digunakan: ceramah, dialogis, analisis kasus, dan refleksi film dokumenter.

Selama ini, dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah mengorganisasi pembelajaran secara efektif, karena melihat dari proses pembelajaran yang telah terlaksana sudah sesuai dengan RPP yang telah direncanakan. Selama ini dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah mengorganisasi pembelajaran secara efisien, karena dosen mengajarkan matakuliah atikorupsi dosen harus selalu efisien, tapi dikarenakan memang sudah dari kepribadian dosen dan dari kepribadiannya tersebut dosen terapkan dalam sistem KBM dan juga selalu menganjurkan pada mahasiswa untuk tidak korupsi dalam hal apapun.

Salah satu kendala yang yang dialami dosen matakuliah pendidikan antikorupsi adalah persoalan waktu. Waktu 2 jam masih kurang bagi dosen matakuliah pendidikan antikorupsi, mengingat materi dan cara aplikasi teori

Pendidikan Antikorupsi tidak cukup dengan waktu 2 jam saja, makanya dosen tersebut menambah jam pelajaran di luar waktu untuk mengadakan pemantapan/ penyempurnaan materi yang belum selesai disampaikan di kelas, seperti mengadakan sosialisasi pendidikan antikorupsi pada lembaga di MTS, MA dan SMK.

C. Pelaksanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember dilaksanakan variatif. Dosen matakuliah pendidikan antikorupsi tidak hanya melaksanakan pendidikan di dalam kampus dan tidak hanya sesuai dengan jam perkuliahan matakuliah tersebut. Materi tersebut juga kadang dilaksanakan di luar kelas dengan menggunakan berbagai elemen sumber belajar. Selain itu, dosen juga sering mengadakan kegiatan di luar jam baik melalui mahasiswa dan lembaga MA dan SMK. Pada acara tersebut, audiennya merupakan anak MA dan SMK Al-Qodiri Jember dan mahasiswa sebagai panitia dan penyaji sosialisasi pendidikan antikorupsi.

Pelaksanaan pembelajaran berjalan secara aktif dengan menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Semua tahap pembelajaran mulai dari pra intruksional/pendahuluan, tahap intruksional/inti pembelajara, dan penutup sudah dijalankan dengan baik. Dengan kata lain, sebagaimana yang disampaikan dosen matakuliah pendidikan antikorupsi, setiap pertemuan pada awal perkuliahannya dilakukan *pre test*, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari dosen dan

mahasiswa, serta terakhir terdapat evaluasi. Pre test tentang materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengungkapkan kembali materi sebelumnya dengan menggunakan bahasa mereka masing-masing dan memberikan penjelasan mengenai materi berikut contoh. Dalam hal ini mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mencari kenyataan yang terjadi di masyarakat. Juga mahasiswa diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan, diberikan kesempatan kepada mahasiswa lain untuk menjawab kemudian dosen memberikan penjelasan terkait pertanyaan dan argumen mahasiswa. Evaluasi dilakukan melalui penilaian proses, ujian pada saat UTS dan UAS.

Dalam proses pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi, terdapat beberapa strategi atau metode yang digunakan. Beberapa metode yang digunakan yaitu antara lain: 1) ceramah (dosen memberi materi dan penjelasannya secara lisan), 2) tanya jawab, 3) demonstrasi dengan proyektor dan presentasi dengan kemudian tanya jawab antar mahasiswa, 4) diskusi, 5) *group to group*, 6) pembelajaran berbasis masalah, 7) inquiri, 8) sosialisasi, dan sebagainya. Dosen juga memberikan kesempatan yang sangat besar terhadap mahasiswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, bahkan pada waktu sosialisasi pendidikan antikorupsi pada para siswa MA dan SMK Al-Qodiri Jember, mahasiswa lebih aktif dan menjadi leader dalam sosialisasi tersebut. Proses pembelajarannya juga sesuai dengan keinginan dosen seperti yang sudah tertera dalam outline pembelajaran mata kuliah pendidikan antikorupsi.

Selain tahapan proses pembelajaran di kelas dan sosialisasi pendidikan anti korupsi yang didiskripsikan di atas sebagai upaya untuk mencetak generasi anti korupsi, ternyata dosen pendidikan antikorupsi juga berusaha untuk membudayakan dan membiasakan mahasiswa untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi dari hal yang sederhana, seperti menghentikan kebiasaan *ghasab* sandal, disiplin dalam belajar dan sebagainya. Dengan adanya pelaksanaan pembelajaran ini, tradisi atau kebiasaan *ghasab* tidak dilakukan lagi oleh mahasiswa dan mahasiswa selalu disiplin dalam setiap pembelajaran yang dilakukannya baik ketika di kelas maupun sosialisasi ke lembaga MA dan SMK. Agar pembudayaan ini biasa dilakukan oleh mahasiswa, ternyata dosen matakuliah pendidikan antikorupsi memberikan contoh yang baik seperti dosen berupaya penuh untuk selalu memperhatikan disiplin waktu baik pada waktu masuk maupun pada waktu keluar.

D. Evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember

Pelaksanaan evaluasi matakuliah pendidikan antikorupsi sangat penting dilakukan dalam pembelajaran di Jurusan Tarbiyah. Selama ini, pelaksanaannya berjalan dengan baik karena didukung juga oleh suasana pesantren. Selain itu, ada dua langkah yang dilakukan oleh dosen matakuliah pendidikan antikorupsi yaitu evaluasi hasil belajar maupun evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar mahasiswa ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan oleh dosen dalam pembelajaran, baik itu berbentuk formatif maupun sumatif. Ketika

dosen tersebut telah melakukan evaluasi formatif, dosen tersebut, kadang mengembangkan materi dan berdiskusi dengan dosen lainnya termasuk juga dengan Ketua Jurusan Tarbiyah untuk mengembangkan semua unit pembelajaran yang telah diajarkan, mulai dari materi, metode, waktu sampai uni-unit yang lainnya. Begitu juga pada waktu dosen tersebut melakukan evaluasi sumatif. Dosen tersebut juga mengembangkan referensi dan berdiskusi dengan dosen lainnya untuk menilai apa proses pembelajaran yang telah dilalui membuat mahasiswa sudah mampu mengembangkan tiga ranah tersebut yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.

Di sisi lain, pada tahap evaluasi proses pembelajaran, dosen matakuliah pendidikan antikorupsi juga telah melakukan. Pada waktu tahun pertama mengajar, dosen tersebut masih belum banyak melakukan pengembangan pembelajaran, tetapi setelah tahun kedua banyak inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh dosen tersebut terutama dalam proses evaluasi pembelajaran, seperti tugas menulis kisah nyata yang berkaitan dengan korupsi. Tugas ini untuk menggugah afeksi, kreatifitas menulis dan kemampuan mahasiswa. Selain itu, ada tugas sosialisasi pendidikan antikorupsi ke lembaga pendidikan MTs, MA dan SMK Al-Qodiri yang tiada lain untuk mengetahui apa mahasiswa tersebut sudah menguasai terutama konsep pendidikan antikorupsi terhadap apa yang telah dia pelajari. Dengan demikian, langkah-langkah yang ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses sudah dilakukan oleh dosen matakuliah pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember.

Dengan mengaplikasikan dua evaluasi pembelajaran tersebut, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaiannya semakin berkembang dengan baik. Evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi yang dilakukan oleh dosen tersebut tidak menoton hanya pada tes tulis yang berbentuk esay saja. Evaluasi proses juga dilakukan oleh dosen, baik yang berbentuk keaktifan dalam kelas, diskusi, portofolio, menulis esay dan menanggapi berita dinamika korupsi di koran, majalah atau internet. Dari beberapa penilaian di atas, hasil evaluasi yang dilakukan oleh dosen berjalan dengan baik dan rata-rata mahasiswa mendapatkan nilai di atas 80 ke atas. Hanya beberapa saja yang mendapat di bawah nilai 80. Ini menunjukkan keberhasilan dosen tersebut dalam melaksanakan proses pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember.

Dosen mengevaluasi kegiatan perkuliahan tersebut mengarah pada tiga aspek, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Evaluasi matakuliah pendidikan antikorupsi berupa 2 bentuk: *pertama*, ujian untuk menilai penguasaan mahasiswa di bidang kognitif dan psikomotorik. Evaluasi matakuliah pendidikan antikorupsi tidak hanya terpaku pada evaluasi akhir saja, tetapi juga pada evaluasi proses. Dosen tidak hanya menggunakan bentuk esay untuk mengetahui kemampuan yang sudah dimiliki mahasiswa, dosen juga menggunakan bentuk evaluasi lain seperti portofolio, observasi, membuat tulisan yang berisi tanggapan tentang berita korupsi yang ada di koran, majalah dan internet.

Kedua, ujian dalam bentuk praktikum untuk menilai penguasaan mahasiswa di bidang kognitif, afektif dan psikomotorik. Dilakukan saat proses perkuliahan,

sosialisasi pendidikan antikorupsi dan UAS. Suasana ujian mencerminkan 9 nilai anti korupsi yaitu kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Setidaknya karakter ini bisa terbentuk dengan menciptakan suasana yang kondusif misalnya: ketika ujian berbagai catatan, hp dan tas dikumpulkan di depan ruangan, sanksi yang tegas terhadap mahasiswa yang melakukan kerjasama dalam kecurangan.

Di samping itu, dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan yang dosen rencanakan. Pelaksanaan evaluasi dan proses pembelajaran mata kuliah pendidikan antikorupsi mempunyai pengaruh yang baik bagi peningkatan hasil belajar mahasiswa di STAI Al-Qodiri Jember, karena mahasiswa lebih kritis dalam menanggapi masalah politik dan ekonomi terutama dalam menanggapi masalah politik dan ekonomi terutama dalam negara dan lembaga-lembaga politik di negara.

Tabel 4.1

Hasil Penelitian

No	Fokus Penelitian	Temuan Penelitian
1	Perencanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan SK, KD dan Indikator tentang pendidikan antikorupsi yang mencakup dan mengarah pada aspek domain kognitif, afektif dan psikomotorik; 2. Mendesain proses pembelajaran baik pada aspek pengalaman maupun pada

		<p>aspek kegiatan pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menentukan partisipasi dosen dalam mensukseskan proses pembelajaran 4. Menentukan salah satu sarana dan prasana termasuk di dalamnya media pembelajaran yang akan digunakan dosen dalam kegiatan pembelajaran 5. Merumuskan evaluasi hasil pembelajaran dan pengembangan pembelajaran setelah melakukan keseluruhan proses baik dari awal sampai akhir. Semua ini terangkum dalam komponen perangkat perencanaan pembelajaran.
2	<p>Pengorganisasian Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan beberapa sarana dan prasana kampus yang digunakan dan personel yang diperlukan untuk penyusunan kerangka yang efektif dan efisien 2. Mengelompokkan komponen pembelajaran dalam struktur lembaga pendidikan secara teratur 3. Membentuk struktur wewenang dan

		<p>mekanisme koordinasi pembelajaran, baik antara dosen, mahasiswa maupun personel lainnya</p> <p>4. Menetapkan metode dan prosedur pembelajaran secara sistematis dari awal sampai berakhirnya kegiatan pembelajaran.</p>
3	<p>Pelaksanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember</p>	<p>1. Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember dilaksanakan variatif.</p> <p>2. Pelaksanaan pembelajaran berjalan secara aktif dengan menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Semua tahap pembelajaran mulai dari pra intruksional/pendahuluan, tahap intrksional/inti pembelajara, dan penutup sudah dijalankan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.</p>
4	<p>Evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember</p>	<p>1. Pelaksanaan evaluasi matakuliah pendidikan antikorupsi dilakukan dengan dua langkah, yaitu: evaluasi hasil belajar maupun evaluasi proses pembelajaran.</p>

	<p>2. Evaluasi hasil belajar mahasiswa ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan oleh dosen dalam pembelajaran, baik itu berbentuk formatif maupun sumatif.</p> <p>3. Evaluasi proses pembelajaran setelah selesai proses pembelajaran. Selama ini, hasil evaluasi proses pembelajaran sangat nampak ketika matakuliah itu diajarkan kembali pada semester depan.</p>
--	---



BAB V

PEMBAHASAN

A. Perencanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

Dalam konteks pembelajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan.¹⁸² PP. RI No. 19 Th. 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 20 menjelaskan bahwa; "Perencanaan proses pembelajaran memiliki silabus, perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar".¹⁸³

Dengan demikian, kegiatan pembelajaran akan mencapai tujuan pembelajaran jika terdapat suatu perencanaan yang bagus termasuk dalam kegiatan pembelajaran pada matakuliah pendidikan antikorupsi di STAI Al-Qodiri Jember. Sampai saat ini, perencanaan pembelajaran di STAI Al-Qodiri Jember sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Sebelum dosen matakuliah pendidikan anti korupsi mengajar atau masuk kelas, dosen sudah merencanakan dengan baik. Dosen mempersiapkan metode pembelajaran, materi, media dan sebagainya. Bahkan, dosen tersebut terkadang masih mendiskusikan

¹⁸² Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 17.

¹⁸³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 15.

materi dan proses pembelajarannya agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien.

Secara teoritis, langkah-langkah perencanaan pembelajaran yaitu sebagai berikut:

1. Merumuskan tujuan khusus. Rumusan tujuan pembelajaran harus mencakup tiga aspek penting yang diistilahkan oleh Bloom (1956) merupakan domain kognitif, afektif dan domain psikomotorik.
2. Pengalaman belajar. Langkah kedua dalam merencanakan pembelajaran adalah memilih pengalaman belajar yang harus dilakukan mahasiswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman.
3. Kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai, pada dasarnya kita dapat merancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individu.
4. Orang-orang yang terlibat. Peran dosen dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran. Dalam pelaksanaan peran tersebut diantaranya dosen berfungsi sebagai penyampai informasi. Agar dosen dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik, maka dosen harus memiliki kemampuan untuk berbicara serta berkomunikasi, menggunakan berbagai media seperti, OHP, LCD, papan tulis dan lain sebagainya.
5. Bahan dan alat. Pemilihan bahan dan alat juga merupakan bagian dari sistem perencanaan pembelajaran.

6. Fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran.
7. Perencanaan evaluasi dan pengembangan. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam sebuah sistem perencanaan pembelajaran. Melalui evaluasi kita dapat melihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran.¹⁸⁴

Langkah di atas juga dilakukan oleh dosen matakuliah pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember. Dia telah merumuskan perencanaan pembelajaran. Salah satu yang dirumuskan antara lain: 1) merumuskan standar pencapaian, KD dan Indikator tentang pendidikan antikorupsi yang mencakup dan mengarah pada aspek domain kognitif, afektif dan psikomotorik; 2) mendesain proses pembelajaran baik pada aspek pengalaman maupun pada aspek kegiatan pembelajaran; 3) menentukan partisipasi dosen dalam mensukseskan proses pembelajaran; 4) menentukan salah satu sarana dan prasana termasuk di dalamnya media pembelajaran yang akan digunakan dosen dalam kegiatan pembelajaran; 5) merumuskan evaluasi hasil pembelajaran dan pengembangan pembelajaran setelah melakukan keseluruhan proses baik dari awal sampai akhir.

Semua itu terangkum dalam komponen perangkat perencanaan pembelajaran yang ada di dalam silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Sebelum melaksanakan perkuliahan dosen yang bersangkutan/pengampu Matakuliah Pendidikan Anti korupsi sudah mempelajari silabus dan membuat SAP selama 1 semester kedepan dan diserahkan ke ketua prodi untuk dievaluasi

¹⁸⁴ Sarwan, *Manajemen Pembelajaran PAI*, (Jember: IAIN Jember, 2016), 114.

dan diberikan masukan di dalamnya. Sebelum merumuskan Silabus dan SAP matakuliah pendidikan antikorupsi, satu bulan sebelumnya, dosen tersebut ditunjuk dan diberikan edaran tentang surat tugas mengajar sebagai dosen pengampu tugas Matakuliah Pendidikan Anti Korupsi. Dosen yang bersangkutan dimintai untuk membaca silabus, mengembangkan silabus yang suda ada, dan membaca buku panduan akademik kurikulum matakuliah pendidikan antikorupsi, sehingga waktu 1 bulan menjadi waktu yang maksimal untuk merancang silabus dan SAP Matakuliah Pendidikan Antikorupsi.

Dalam merancang rumusan SK, KD dan Indikator tentang pendidikan antikorupsi yang mengarah pada aspek domain kognitif, afektif dan psikomotorik terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Salah satu langkah tersebut adalah pada aspek kognitif dan afektif, mahasiswa diberikan informasi mengenai bentuk-bentuk korupsi baik secara normatif maupun secara sosiologis. Kemudian mengingat Al-Qodiri merupakan pondok pesantren yang di dalamnya memiliki lembaga pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi maka dalam hal psikomotorik mahasiswa mempraktikkan pengetahuannya tentang karakter anti korupsi di berbagai lembaga tersebut.

Dengan diajarkannya materi-materi tersebut, maka rumusan diskriptif tujuan pendidikan antikorupsi dari matakuliah Antikorupsi adalah membentuk kepribadian antikorupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat

dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.¹⁸⁵

Adapun rumusan tujuan matakuliah pendidikan antikorupsi adalah untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang korupsi, bentuk-bentuknya penyebab serta cara menganggulangnya. Untuk itu perlu mengenal pendidikan karakter anti korupsi yang meliputi: kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Semua ini sulit dijumpai baik di mahasiswa. Tujuan pendidikan ini adalah mengingatkan, membangkitkan dan menyebarkan karakter anti korupsi ini baik di tingkat mahasiswa dan lembaga pendidikan lain di bawahnya.

Maka dari itu, rumusan tujuan pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember tersebut selaras dengan rumusan yang ditetapkan oleh Kemdikbud, yaitu sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual competence*).
2. Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut.
3. Mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi (dan melaporkannya kepada penegak hukum). Adapun penjelasan adalah sebagai berikut :
 - a. Kompetensi individual dimulai dari mahasiswa memiliki persepsi negatif mengenai korupsi dan persepsi positif mengenai antikorupsi,

¹⁸⁵ Kemdikbud, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian, 2011), 5.

menguatnya kesadaran (*awareness*) terhadap adanya potensi tindak korupsi. Mahasiswa akhirnya memiliki sikap antikorupsi dalam arti berusaha untuk tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun.

- b. Sikap antikorupsi ini kemudian memberikan efek-tular ke lingkungan sekitar dimana mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun, termasuk mampu memberikan informasi kepada orang lain mengenai hal-hal terkait korupsi dan antikorupsi.
- c. Kompetensi selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu tindak korupsi secara komprehensif mulai dari bentuk, proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian/dampak yang ditimbulkan; selanjutnya mampu menghasilkan penyelesaian masalah (*problem solving*). Melaporkan kepada penegak hukum mungkin saja dilakukan, namun harus memiliki bukti-bukti yang valid.¹⁸⁶

Sedangkan perencanaan langkah-langkah proses belajar di antaranya meliputi: 1) menentukan tujuan pembelajaran, 2) memanfaatkan *resources*, 3) memilih materi, 4) mengembangkan materi, 5) evaluasi. Mahasiswa merupakan calon guru yang menempuh pendidikan di STAI Al-Qodiri, yang mana Al-Qodiri memiliki lembaga pendidikan mulai dari TK hingga perguruan Tinggi. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mempraktikkan ilmunya di lembaga pendidikan tersebut. Pendekatan yang dilakukan adalah gabungan antara individu dan kelompok. Pendekatan individu dilakukan terhadap penanaman

¹⁸⁶ Ibid.

aspek kognitif dan afektif. Pendekatan kelompok dilakukan dalam hal penerapan psikomotorik. Fasilitas-fasilitas tersebut digunakan dan ditambah dengan penggunaan film dokumenter dan praktik di kelas. Evaluasi dan pengembangan dilakukan melalui ujian tertulis dan praktikum dengan cara memanfaatkan *resources* yang ada.

Dalam merencanakan matakuliah pendidikan antikorupsi, dosen Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember tidak mengalami hambatan yang banyak, karena perkuliahan pendidikan antikorupsi sudah berjalan dengan baik, apalagi kondisi kampus yang berada di pondok pesantren, sehingga hal ini memudahkan para dosen untuk merumuskan perencanaan pembelajarannya. Salah satu kegiatan yang ada hambatan atau rintangannya yaitu: 1) perencanaan SAP, dikarenakan matakuliah tersebut tergolong baru, 2) praktek di lapangan dengan terjun di lembaga pendidikan, seperti di MTs/ MA/ SMK. 3) evaluasi pembelajaran mahasiswa. Sesuatu yang sangat diperhatikan dosen adalah apakah benar-benar nilai-nilai yang diharapkan sudah tertanam dalam diri mahasiswa apa tidak. Tuntutan ini yang selalu diperhatikan dosen dan dicari format evaluasi yang ideal dan realistis untuk diterapkan kepada mahasiswa.

Dengan perencanaan tersebut di atas, maka STAI Al-Qodiri Jember mulai berusaha untuk melakukan pemberantasan korupsi melalui pendidikan. Perencanaan tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan keinginan KPK, Kemenag dan Kementerian Dikti dan Iptek. Sebagaimana menurut Sjahrudin¹⁸⁷, selama ini upaya menumbuhkan generasi yang bersih dan antikorupsi ini telah

¹⁸⁷ *Ibid.*

dilakukan melalui kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga pemerintah, Depdikdasmen, Depdikti, Kemenag RI dan lembaga pendidikan sebagai pelaksanaan pasal 13 UU. No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu bahwa KPK menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi bekerja sama dengan Depdikdasmen, Depdikti dan Kemenag RI pada setiap jenjang pendidikan melalui sosialisasi, komunikasi, dan pendidikan.

Di dalam penyelenggaraan tersebut, terdapat beberapa tujuan pendidikan antikorupsi. Salah satunya tujuan pendidikan antikorupsi adalah: 1) pada saat terjun ke masyarakat siswa telah mendapat bekal yang cukup untuk dapat memahami etika di setiap level “ social leaders ” yang dijalaninya, 2) memahami secara komprehensif pentingnya etika baik di sektor publik maupun di sector privat, 3) mengenali dan memahami dampak buruk korupsi terhadap kepercayaan masyarakat dan persaingan di dunia internasional, dan 4) memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk memberantas korupsi.¹⁸⁸ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam¹⁸⁹ menyebutkan bahwa pendidikan antikorupsi dilakukan sebagai koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Dalam pendidikan antikorupsi harus mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik).

¹⁸⁸ Ibid.

¹⁸⁹ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah* (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), 6.

B. Pengorganisasian Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

Setelah merencanakan pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi, dosen tersebut melakukan pengorganisasian. Menurut Hick dan Gullet,¹⁹⁰ pengorganisasian adalah kegiatan membagi tugas dan tanggung jawab dan wewenang sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, fungsi pengorganisasian dalam kegiatan pembelajaran merupakan upaya untuk menentukan pelaksana tugas dengan jelas kepada setiap personil lembaga pendidikan sesuai bidang, wewenang, mata pelajaran, dan tanggung jawabnya.

Di dalam pengorganisasian, langkah yang dilakukan oleh dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember adalah: 1) menyediakan beberapa sarana dan prasana kampus yang digunakan dan personel yang diperlukan untuk penyusunan kerangka yang efektif dan efisien; 2) mengelompokkan komponen pembelajaran dalam struktur lembaga pendidikan secara teratur, 3) membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran, baik antara dosen, mahasiswa maupun personel lainnya; dan 4) menetapkan metode dan prosedur pembelajaran secara sistematis dari awal sampai berakhirnya kegiatan pembelajaran.

Pengorganisasian pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi ini akan memberikan gambaran bahwa kegiatan belajar dan mengajar mempunyai arah dan penanggungjawab yang jelas. Dari pengorganisasian ini akan jelas kedudukan ketua

¹⁹⁰ Herbert Hicks and Ray Gullett, C., *Organization: Theory and Behavior*, (London: Mc Graw Hill, 1981), 321.

STAI Al-Qodiri Jember dalam memberikan fasilitas dan kelengkapan pembelajaran, kedudukan mahasiswa baik di kelas maupun di luar kelas, kedudukan dosen untuk menentukan dan mendesain pembelajaran dengan mengorganisasikan alokasi waktu, desain kurikulum, media dan kelengkapan pembelajaran, dan lainnya yang berkaitan dengan suksesnya penyelenggaraan kegiatan belajar. Pengorganisasian pembelajaran bertujuan agar semua yang sudah direncanakan dapat disampaikan secara maksimal. Pengorganisasian pembelajaran berjalan dengan baik, karena kampus memberikan kesempatan yang luas untuk mengorganisir pembelajaran. Kampus juga menyediakan fasilitas yang diinginkan oleh dosen matakuliah pendidikan antikorupsi.

Pengorganisasian dilakukan sebelum perkuliahan dimulai. Pada waktu itu, dosen sudah mengorganisir semua yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran, seperti antara lain kewenangan dirinya dan siswa ketika berada di kelas. Dia juga mengorganisir kegiatan prosedur pembelajaran dengan sistematis sebagaimana terlihat rancangan pelaksanaan pembelajaran yang disusun dengan memperhatikan konteks, suasana, dan tujuan dari pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi. Dosen juga menyediakan atau bahkan membuat media pembelajaran (*power point*), mempersiapkan peraturan perundang-undangan, studi kasus serta film dokumenter. Kemudian membagiannya kedalam silabus. Mekanisme pembelajaran dilakukan secara variatif, ada kalanya bersifat satu arah dalam hal menjelaskan korupsi secara normatif, dan ada saatnya berdialog dua arah, (dialogis) antara mahasiswa dan dosen pada saat menceritakan pengalaman masing-masing terkait budaya korupsi yang sering dijumpai di masyarakat.

Metode yang digunakan: ceramah, dialogis, analisis kasus, dan refleksi film dokumenter.

Diskripsi langkah-langkah perumusan di atas sesuai secara teoritis yang dijelaskan oleh Syaiful Sagala. Dia merumuskan pengorganisasian pembelajaran meliputi beberapa aspek:

1. Menyediakan fasilitas, perlengkapan dan personel yang diperlukan dalam Matakuliah Pendidikan Antikorupsi untuk penyusunan kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui suatu proses penetapan pelaksanaan pembelajaran yang diperlukan untuk menyelesaikannya.
2. Mengelompokkan komponen pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi dalam struktur lembaga pendidikan secara teratur.
3. Membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi.
4. Merumuskan dan menetapkan metode dan prosedur pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi.¹⁹¹

Pengorganisasian pembelajaran ini memberikan gambaran bahwa kegiatan belajar dan mengajar Matakuliah Pendidikan Antikorupsi mempunyai arah dan penanggungjawab yang jelas. Artinya dilihat dari komponen yang terkait dengan pembelajaran pada institusi lembaga pendidikan memberi gambaran bahwa jelas kedudukan kepala lembaga pendidikan dalam memberikan fasilitas dan kelengkapan pembelajaran, dan kedudukan dosen untuk menentukan

¹⁹¹ Syaiful Sagala. *Konsep dan Makna Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 143.

dan mendesain pembelajaran dengan mengorganisasikan alokasi waktu, desain kurikulum, media dan kelengkapan pembelajaran, dan lainnya yang berkaitan dengan suksesnya penyelenggaraan kegiatan belajar. Kemudian jelas kedudukan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar baik di kelas maupun belajar di rumah, dibawah koordinasi dosen dan juga orang tua siswa yang berkaitan dengan belajar. Pengorganisasian pembelajaran ini dimaksudkan agar materi dan bahan ajaran yang sudah direncanakan dapat disampaikan secara maksimal.

Di samping itu, selama ini dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah mengorganisasi pembelajaran secara efektif, karena melihat dari proses pembelajaran yang telah terlaksana sudah sesuai dengan RPP yang telah direncanakan. Selama ini dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah mengorganisasi pembelajaran secara efisien, karena dosen mengajarkan matakuliah atikorupsi dosen harus selalu efisien, tapi dikarenakan memang sudah dari kepribadian dosen dan dari kepribadiannya tersebut dosen terapkan dalam sistem KBM dan juga selalu menganjurkan pada mahasiswa untuk tidak korupsi dalam hal apapun.

Salah satu kendala yang yang dialami dosen matakuliah pendidikan antikorupsi adalah persoalan waktu. Waktu 2 jam masih kurang bagi dosen matakuliah pendidikan antikorupsi, mengingat materi dan cara aplikasi teori Pendidikan Antikorupsi tidak cukup dengan waktu 2 jam saja, makanya dosen tersebut menambah jam pelajaran di luar waktu untuk mengadakan pemantapan/ penyempurnaan materi yang belum selesai disampaikan di kelas, seperti

mengadakan sosialisasi pendidikan antikorupsi pada lembaga di MTS, MA dan SMK.

C. Pelaksanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

Implementasi atau *directing*, yaitu proses pelaksanaan program pembelajaran agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam lembaga pendidikan serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.¹⁹² Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan di lembaga pendidikan.

Di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember, pelaksanaan pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi dilaksanakan secara variatif dan tidak hanya bertumpu di dalam kelas. Dosen matakuliah pendidikan antikorupsi tidak hanya melaksanakan pendidikan di dalam kampus dan tidak hanya sesuai dengan jam perkuliahan matakuliah tersebut. Materi tersebut juga dilaksanakan di luar kelas dengan melibatkan instansi-instansi di luar kampus. Selain itu, dosen juga mengadakan kegiatan di luar jam baik melalui mahasiswa dan lembaga MA dan SMK. Pada acara tersebut, audiennya merupakan anak MA dan SMK Al-Qodiri Jember dan mahasiswa sebagai panitia dan penyaji sosialisasi pendidikan antikorupsi.

Pelaksanaan pembelajaran berjalan secara variatif dengan menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Semua tahap pembelajaran mulai dari pra

¹⁹² Abdul Rohman, *Pengertian dan Fungsi Manajemen*, Makalah 2011, 3.

intruksional/pendahuluan, tahap intruksional/inti pembelajara, dan penutup sudah dijalankan dengan baik.

Tahapan ini sesuai dengan perspektif Nana Sudjana yang dikutip oleh Suryobroto. Pelaksanaan proses belajar mengajar meliputi tahap pra instruksional, tahap instruksional, dan tahap evaluasi serta tindak lanjut.¹⁹³ Adapun penjelasannya yaitu di bawah ini:

1. Tahap pra instruksional. Tahap yang ditempuh pada saat memulai sesuatu proses belajar mengajar: Dosen menanyakan kehadiran mahasiswa dan mencatat mahasiswa yang tidak hadir; Bertanya kepada mahasiswa sampai dimana pembahasan sebelumnya; Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya dari pelajaran yang sudah disampaikan; Mengulang bahan pelajaran yang lain secara singkat.
2. Tahap instruksional. Tahap pemberian bahan pelajaran yang dapat diidentifikasi beberapa kegiatan sebagai berikut: menjelaskan kepada mahasiswa tujuan pengajaran yang harus dicapai mahasiswa; menjelaskan pokok materi yang akan dibahas; membahas pokok materi yang sudah dituliskan; pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh yang kongkret, pertanyaan, tugas; Penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan pada setiap materi pelajaran; menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi.

¹⁹³ Suryobroto, *Proses Belajar Mengajar...*, 30-31.

3. Tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan tahap instruksional, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu: Mengajukan pertanyaan kepada kelas atau kepada beberapa murid mengenai semua aspek pokok materi yang telah dibahas pada tahap instruksional; Apabila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh mahasiswa (kurang dari 70%), maka dosen harus mengulang pengajaran; Untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa mengenai materi yang dibahas, dosen dapat memberikan tugas atau PR; Akhiri pelajaran dengan menjelaskan atau memberitahukan pokok materi yang akan dibahas pada pelajaran berikutnya.¹⁹⁴

Di samping itu dalam perspektif dosen matakuliah pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember, setiap pertemuan, pada awal perkuliahannya dilakukan *pre test*, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari dosen dan mahasiswa, serta terakhir terdapat evaluasi. Pada hakikatnya penjelasan ini sama dengan di atas, tapi beda dalam membahaskan dan pendekatan yang digunakan.

Penjelasan tentang tahapan pembelajaran di atas sesuai dengan langkah yang diungkapkan oleh Zulaichah Ahmad. Dalam pembelajaran, tugas dosen yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahanperilaku bagi peserta didik. Umumnya pelaksanaan pembelajaran mencakup tiga hal, yaitu: *pertama*, *pre tes*; *pre tes* (tes awal) pada umumnya pelaksanaan proses pembelajaran dimulai dengan *pre tes*, *pre tes* berguna untuk

¹⁹⁴ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), 173.

menjajaki proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. *Kedua*, proses (pembentukan kompetensi); proses yang dimaksudkan adalah pelaksanaan proses pembelajaran, yakni bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan. Proses pembelajaran perlu dilakukan dengan tenang dan menyenangkan, hal tersebut tentu saja menuntut aktivitas dan kreativitas dosen dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Proses pembelajaran dikatakan aktif apabila seluruh peserta didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik dan sosialnya. *Ketiga*, *post tes*. Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran diakhiri dengan *post tes*, sama halnya dengan *pre tes*, *post tes* juga memiliki banyak kegunaan; terutama dalam melihat keberhasilan pembelajaran.¹⁹⁵

Dalam tahapan *pre test* perkuliahan yang dilaksanakan oleh dosen STAI Al-Qodiri Jember, tahapan ini berisi tentang materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengungkapkan kembali materi sebelumnya dengan menggunakan bahasa mereka masing-masing dan memberikan penjelasan mengenai materi berikut contoh. Dalam hal ini mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mencari kenyataan yang terjadi di masyarakat dan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan, diberikan kesempatan kepada mahasiswa lain untuk menjawab kemudian dosen memberikan penjelasan terkait pertanyaan dan argumen mahasiswa.

Dalam proses pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi, terdapat beberapa strategi atau metode yang digunakan. Beberapa metode yang

¹⁹⁵ Zulaichah Ahmad, *Perencanaan Pembelajaran PAI*, (Jember: Madania Center Press, 2008), 35-38.

digunakan yaitu antara lain: 1) ceramah (dosen memberi materi dan penjelasannya secara lisan), 2) tanya jawab, 3) demonstrasi dengan proyektor dan presentasi dengan kemudian tanya jawab antar mahasiswa, 4) diskusi, 5) *group to group*, 6) pembelajaran berbasis masalah, 7) inquiri, 8) sosialisasi, dan sebagainya. Dosen juga memberikan kesempatan yang sangat besar terhadap mahasiswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, bahkan pada waktu sosialisasi pendidikan antikorupsi pada para siswa MA dan SMK Al-Qodiri Jember, mahasiswa lebih aktif dan menjadi leader dalam sosialisasi tersebut. Proses pembelajarannya juga sesuai dengan keinginan dosen seperti yang sudah tertera dalam outline pembelajaran mata kuliah pendidikan antikorupsi.

Strategi atau metode yang digunakan STAI Al-Qodiri Jember sudah menerapkan sebagian metode yang ditawarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam dan Dikti. Dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi di Madrasah Dirjen Pendidikan Islam¹⁹⁶, ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan anti korupsi, yaitu sebagai berikut: 1) metode inquiry. Metode inquiry menekankan pencarian secara bebas dan penghayatan nilai-nilai hidup dengan langsung melibatkan siswa untuk menemukan nilai-nilai tersebut dalam pendampingan dan pengarahan guru; 2) metode pencarian bersama (*collaborative*). Metode ini menekankan pada pencarian bersama yang melibatkan siswa dan guru. Pencarian bersama lebih berorientasi pada diskusi atas soal-soal yang aktual dalam masyarakat, di mana proses ini diharapkan menumbuhkan sikap berpikir logis, analitis, sistematis, argumentatif untuk dapat

¹⁹⁶ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah* (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), 13-17.

mengambil nilai-nilai hidup dari masalah yang diolah bersama; 3) metode siswa aktif atau aktivitas bersama. Metode ini menekankan pada proses yang melibatkan siswa sejak awal pembelajaran. Guru memberikan pokok bahasan dan siswa dalam kelompok mencari dan mengembangkan proses selanjutnya. Siswa membuat pengamatan, pembahasan analisis sampai proses penyimpulan atas kegiatan mereka. Metode ini mendorong siswa untuk mempunyai kreativitas, ketelitian, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, kerja sama, kejujuran, dan daya juang; 4) metode keteladanan (pemodelan). Dalam dunia pendidikan, apa yang terjadi dan tertangkap oleh siswa bisa jadi tanpa disaring akan langsung dilakukan. Proses pembentukan kepribadian pada siswa akan dimulai dengan melihat orang yang akan diteladani. Guru dapat menjadi tokoh idola dan panutan bagi siswa. Dengan keteladanan guru dapat membimbing siswa untuk membentuk sikap yang kokoh; 5) Metode *Live In*. Metode *Live in* dimaksudkan agar siswa mempunyai pengalaman hidup bersama orang lain langsung dengan situasi yang sangat berbeda dari kehidupan sehari-harinya. Dengan pengalaman langsung siswa dapat mengenal lingkungan hidup yang berbeda dalam cara berpikir, tantangan, permasalahan, termasuk tentang nilai-nilai hidupnya; dan 6) metode penjernihan nilai atau klarifikasi nilai. Teknik mengklarifikasi nilai atau penjernihan nilai dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa.

Selain itu, dalam buku panduan dikti disebutkan, setiap metode matakuliah pendidikan antikorupsi pada dasarnya harus memberikan aspek *problem-based learning* bagi mahasiswa, bahkan membawa pada *problem solving* terhadap setiap masalah yang dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. *In-class discussion*. Tujuannya untuk menumbuhkan kepekaan (awareness) dan membangun kerangka berfikir (*framework of thinking*)
2. *Case study*. Tujuannya untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap kasus korupsi serta mampu menganalisa atas dasar konsep-konsep yang diberikan.
3. Skenario perbaikan sistem (*improvement system scenario*). Tujuan metode ini untuk memberikan rangsangan kepada mahasiswa agar memikirkan penyelesaian masalah secara nyata (*problem solving*).
4. Kuliah umum (*General lecture*). Tujuannya adalah untuk belajar dari praktisi atau orang-orang di lapangan yang mampu menginspirasi dan dapat menjadi role model bagi mahasiswa.
5. Diskusi film. Tujuan: menggunakan media film sebagai media pembelajaran melalui kekuatan audiovisual.
6. *Investigative report*. Tujuannya adalah mahasiswa memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi dan menganalisis sebuah tindak korupsi yang nyata terjadi di lingkungan sekitar atau daerah setempat, serta membuat laporan korupsi yang efektif dan *impactful*.

7. *Thematic exploration*. Tujuannya adalah untuk membangun cara berfikir (*way of thinking*) yang komprehensif dalam menggali sebuah kasus.
8. *Prototype*. Tujuan metode ini sebagai penerapan keilmuan atau ciri khas perguruan tinggi terkait atau ciri khas lokal dalam konteks anti korupsi; atau mengeksplorasi korupsi dan anti korupsi. Kegiatan: mahasiswa membuat prototype teknologi terkait cara-cara penanggulangan korupsi.
9. *Prove the government policy*. Tujuannya adalah untuk memantau realisasi janji pemerintah sebagai bentuk integritas.
10. *Education tools*. Tujuannya adalah untuk menciptakan media pembelajaran yang kreatif untuk segmen pendidikan formal maupun publik dalam rangka gerakan anti korupsi.¹⁹⁷

Dari diskripsi pelaksanaan pembelajaran pendidikan antikorupsi di atas, maka STAI Al-Qodiri Jember menggunakan beberapa model pembudayaan pendidikan anti korupsi yang dirumuskan Dirjen Dikti Kemendikbud. Di dalam buku pedoman Dirjen Dikti Kemendikbud¹⁹⁸ model yang digunakan dengan memposisikan mata kuliah anti korupsi yang berdiri sendiri (*independen*), yang diselenggarakan secara reguler dalam 14–16 pertemuan selama satu semester. Mata kuliah ini dapat ditetapkan sebagai mata kuliah yang bersifat wajib maupun

¹⁹⁷ Kemendikbud, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian, 2011), 10-17.

¹⁹⁸ Kemendikbud, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian, 2011), 3.

pilihan di dalam kurikulum perguruan tinggi. Tentu tidak menutup kemungkinan materi dan metode pembelajaran ini nantinya diterapkan juga pada bentuk-bentuk pendidikan diluar mata kuliah independen. Materi Anti korupsi dapat disampaikan dalam satu atau beberapa pertemuan (insersi) dalam sebuah mata kuliah tertentu, atau dalam bentuk pelatihan, kampanye, seminar dan sebagainya. Metode yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan keterbatasan ruang, waktu dan kondisi.

Sedangkan dalam Pedoman Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi Dirjen Diktis Kementerian Agama RI 2013¹⁹⁹, pembudayaan Pendidikan Anti korupsi di STAI Al-Qodiri menggunakan beberapa pendekatan yang diterapkan dalam kurikulum pendidikan antikorupsi yaitu sebagai berikut:

Pertama, model sebagai matakuliah tersendiri. Pendidikan anti korupsi disampaikan sebagai mata pelajaran tersendiri seperti bidang studi yang lain. Dalam hal ini guru bidang studi pembelajaran anti korupsi harus membuat Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP), Satuan Pelajaran (SP), Rencana Pengajaran (RP), metodologi pengajaran, dan evaluasi pengajaran. Selain itu, pembelajaran anti korupsi sebagai mata pelajaran harus masuk dalam jadwal yang terstruktur. Keunggulan pendidikan anti korupsi sebagai mata pelajaran adalah materi lebih terfokus dan terencana dengan matang. Dengan demikian, pelajaran lebih terstruktur dan terukur sebagai informasi. Ada jam yang sudah ditentukan sebagai kesempatan untuk memberikan informasi secara pasti. Guru dapat membuat

¹⁹⁹ Kementerian Agama, *Pedoman Model Integrasi Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2013*, (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), 5-9.

perencanaan dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya.

Kedua, model di luar pembelajaran. Penanaman nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya. Di STAI Al-Qodiri Jember, kegiatan ini berbentuk sosialisasi pendidikan antikorupsi di MA dan SMK Al-Qodiri Jember.

Selain tahapan proses pembelajaran di kelas dan sosialisasi pendidikan anti korupsi yang dideskripsikan di atas sebagai upaya untuk mencetak generasi anti korupsi, ternyata dosen pendidikan antikorupsi juga berusaha untuk membudayakan dan membiasakan mahasiswa untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi dari hal yang sederhana, seperti menghentikan kebiasaan *ghasab* sandal, disiplin dalam belajar dan sebagainya. Dengan adanya pelaksanaan pembelajaran ini, tradisi atau kebiasaan *ghasab* tidak dilakukan lagi oleh mahasiswa dan mahasiswa selalu disiplin dalam setiap pembelajaran yang dilakukannya baik ketika di kelas maupun sosialisasi ke lembaga MA dan SMK. Agar pembudayaan ini biasa dilakukan oleh mahasiswa, ternyata dosen matakuliah pendidikan antikorupsi memberikan contoh yang baik seperti dosen berupaya penuh untuk selalu memperhatikan disiplin waktu baik pada waktu masuk maupun pada waktu keluar.

Implementasi pembudayaan antikorupsi ini sejalan dengan harapan dari Dikti Kemendikbud dan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI. Di dalam buku pedoman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal DIKTI²⁰⁰ disebutkan bahwa peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Untuk keperluan perkuliahan dipandang perlu untuk membuat sebuah Buku Ajar yang berisikan materi dasar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

²⁰⁰ Kemendikbud, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi....*, v.

Sedangkan Dirjen Pendidikan Islam²⁰¹ menjelaskan bahwa penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana lembaga pendidikan. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Pembiasaan adalah alat pendidikan. Berdasarkan pembiasaan itulah mahasiswa terbiasa menurut dan taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat, setelah mendapatkan pendidikan pembiasaan yang baik di perguruan tinggi pengaruhnya juga terbawa dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sampai dewasa nanti. Karena itu adalah penting, mahasiswa, menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik dan jangan sekali-kali mendidik mahasiswa berdusta, tidak disiplin, menyontek dalam ulangan dan sebagainya.

D. Evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

Pelaksanaan evaluasi pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi sangat penting dilakukan dalam pembelajaran di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember. Evaluasi proses pembelajaran merupakan suatu upaya untuk mengetahui berapa banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh mahasiswa dari hal-hal yang telah diajarkan oleh dosen. Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menekankan pada diperolehnya informasi tentang seberapa jauh perolehan mahasiswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan.

²⁰¹ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi*, 11.

Dalam Permendiknas No. 41 Tahun 2007,²⁰² evaluasi pembelajaran ada dua, yaitu: evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran. *Pertama*, evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar mahasiswa melalui kegiatan penilaian dan atau pengukuran hasil belajar. Tujuan utama evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan yang tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. Apabila tujuan utama kegiatan evaluasi hasil belajar ini sudah terealisasi maka hasilnya dapat difungsikan untuk berbagai keperluan tertentu.²⁰³

Kedua evaluasi pembelajaran sudah dilaksanakan dalam pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember. Evaluasi hasil belajar mahasiswa ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan oleh dosen dalam pembelajaran, baik itu berbentuk formatif maupun sumatif. Ketika dosen tersebut telah melakukan evaluasi formatif, dosen tersebut, kadang mengembangkan materi dan berdiskusi dengan dosen lainnya termasuk juga dengan Ketua Jurusan Tarbiyah untuk mengembangkan semua unit pembelajaran yang telah diajarkan, mulai dari materi, metode, waktu sampai unit-unit yang lainnya. Begitu juga pada waktu dosen tersebut melakukan evaluasi sumatif. Dosen tersebut juga mengembangkan referensi dan berdiskusi dengan dosen lainnya untuk menilai apa proses pembelajaran yang telah dilalui membuat

²⁰² Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses.

²⁰³ Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses.

mahasiswa sudah mampu mengembangkan tiga ranah tersebut yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.

Bentuk pertama evaluasi yang dilakukan dalam pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember sesuai dengan perspektif Suryobroto.²⁰⁴ Adapun bentuk langkah-langkah evaluasi hasil pembelajaran meliputi: (1) evaluasi formatif. Evaluasi formatif seringkali diartikan sebagai kegiatan evaluasi yang dilakukan pada akhir pembahasan setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan.²⁰⁵ Evaluasi ini yakni diselenggarakan pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar, yang diselenggarakan secara periodik, isinya mencakup semua unit pengajaran yang telah diajarkan, dan (2) evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang diselenggarakan oleh dosen setelah jangka waktu tertentu pada akhir semesteran. Penilaian sumatif berguna untuk memperoleh informasi tentang keberhasilan belajar pada mahasiswa, yang dipakai sebagai masukan utama untuk menentukan nilai rapor akhir semester.²⁰⁶

Sedangkan pada tahap evaluasi proses pembelajaran, dosen matakuliah pendidikan antikorupsi juga telah melakukan. Pada waktu tahun pertama mengajar, dosen tersebut masih belum banyak melakukan pengembangan pembelajaran, tetapi setelah tahun kedua banyak inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh dosen tersebut terutama dalam proses evaluasi pembelajaran, seperti tugas menulis kisah nyata yang berkaitan dengan korupsi. Tugas ini untuk menggugah afeksi, kreatifitas menulis dan kemampuan mahasiswa. Selain itu, ada

²⁰⁴ Suryobroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, Cet. II, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 53.

²⁰⁵ Indah Komsiyah, *Belajar dan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 125.

²⁰⁶ Suryobroto, *Proses Belajar...*, 44.

tugas sosialisasi pendidikan antikorupsi ke lembaga pendidikan MTs, MA dan SMK Al-Qodiri yang tiada lain untuk mengetahui apa mahasiswa tersebut sudah menguasai terutama konsep pendidikan antikorupsi terhadap apa yang telah dia pelajari.

Dengan mengaplikasikan dua evaluasi pembelajaran tersebut, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaiannya semakin berkembang dengan baik. Implementasi evaluasi ini sesuai dengan langkah teoritis baik Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses maupun pendapat para tokoh/pengamat pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran yakni untuk menentukan kualitas dari suatu program pembelajaran secara keseluruhan yakni dari mulai tahap proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi ini memusatkan pada keseluruhan kinerja dosen dalam proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara:

1. Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan dosen dengan standard proses.
2. Mengidentifikasi kinerja dosen dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi dosen. Sebagai implikasi dari evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan dosen maupun kepala sekolah dapat dijadikan umpan balik untuk program pembelajaran selanjutnya.²⁰⁷ Jadi, evaluasi pada program pembelajaran meliputi: (a) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dibanding dengan rencana; (b) melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi dan merumuskan tindakan koreksi, menyusun standar-standar

²⁰⁷ Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses.

pembelajaran dan sasaran-sasaran; dan (c) menilai pekerjaan dan melakukan tindakan terhadap penyimpangan-penyimpangan baik institusional satuan pendidikan maupun proses pembelajaran.²⁰⁸

Evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi yang dilakukan oleh dosen tersebut tidak menoton hanya pada tes tulis yang berbentuk esay saja. Evaluasi proses juga dilakukan oleh dosen, baik yang berbentuk keaktifan dalam kelas, diskusi, portofolio, menulis esay dan menanggapi berita dinamika korupsi di koran, majalah atau internet. Dari beberapa penilaian di atas, hasil evaluasi yang dilakukan oleh dosen berjalan dengan baik dan rata-rata mahasiswa mendapatkan nilai di atas 80 ke atas. Hanya beberapa saja yang mendapat di bawah nilai 80. Ini menunjukkan keberhasilan dosen tersebut dalam melaksanakan proses pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember.

Dosen mengevaluasi kegiatan perkuliahan tersebut mengarah pada tiga aspek, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Evaluasi matakuliah pendidikan antikorupsi dilakukan beberapa cara yaitu: *pertama*, ujian untuk menilai penguasaan mahasiswa di bidang kognitif dan psikomotorik. Evaluasi matakuliah pendidikan antikorupsi tidak hanya terpaku pada evaluasi akhir saja, tetapi juga pada evaluasi proses. Dosen tidak hanya menggunakan bentuk esay untuk mengetahui kemampuan yang sudah dimiliki mahasiswa, dosen juga menggunakan bentuk evaluasi lain seperti portofolio, observasi, membuat tulisan

²⁰⁸ Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran...*, 146

yang berisi tanggapan tentang berita korupsi yang ada di koran, majalah dan internet.

Penilaian yang digunakan oleh dosen STAI Al-Qodiri Jember sudah sesuai dengan evaluasi yang diinginkan oleh Sedangkan pada aspek evaluasi, dalam panduan Dirjen Pendis Madrasah Kemenag RI. Dalam buku Dirjen Pendis Madrasah Kemenag RI²⁰⁹, penilaian yang layak untuk digunakan matakuliah pendidikan anti korupsi adalah internal. Penilaian kelas merupakan bagian dari penilaian internal (*internal assessment*) untuk mengetahui hasil belajar peserta didik terhadap penguasaan kompetensi yang diajarkan oleh guru. Tujuannya adalah untuk menilai tingkat pencapaian kompetensi peserta didik yang dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung dan akhir pembelajaran. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan oleh guru untuk memantau proses, kemajuan, perkembangan hasil belajar peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan. Penilaian dapat memberikan umpan balik kepada guru agar dapat menyempurnakan perencanaan dan proses pembelajaran. Berkaitan dengan pendidikan anti korupsi model *assessment* dan evaluasi yang perlu dikembangkan adalah portofolio. Portofolio sebagai *assessment* berarti mengandung makna bahwa dalam pendidikan anti korupsi alat untuk mengukur keberhasilan siswa adalah dengan menggunakan kumpulan hasil kerja (karya) terbaik siswa yang berisi berbagai pengalaman dan prestasi yang disusun berdasarkan urutan waktu dan kegiatan.

²⁰⁹ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2013), 18-19.

Kedua, ujian dalam bentuk praktikum untuk menilai penguasaan mahasiswa di bidang kognitif, afektif dan psikomotorik. Dilakukan saat proses perkuliahan, sosialisasi pendidikan antikorupsi dan UAS. Suasana ujian mencerminkan 9 nilai anti korupsi yaitu kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Setidaknya karakter ini bisa terbentuk dengan menciptakan suasana yang kondusif misalnya: ketika ujian berbagai catatan, hp dan tas dikumpulkan di depan ruangan, sanksi yang tegas terhadap mahasiswa yang melakukan kerjasama dalam kecurangan.

Di samping itu, dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan yang dosen rencanakan. Pelaksanaan evaluasi dan proses pembelajaran mata kuliah pendidikan antikorupsi mempunyai pengaruh yang baik bagi peningkatan hasil belajar mahasiswa di STAI Al-Qodiri Jember, karena mahasiswa lebih kritis dalam menanggapi masalah politik dan ekonomi terutama dalam menanggapi masalah politik dan ekonomi terutama dalam negara dan lembaga-lembaga politik di negara.

IAIN JEMBER

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perencanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember

Dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi merumuskan perencanaan pembelajaran. Salah satu yang dirumuskan antara lain: a) merumuskan KD dan Indikator tentang pendidikan antikorupsi yang mencakup dan mengarah pada aspek domain kognitif, afektif dan psikomotorik; b) mendesain proses pembelajaran baik pada aspek pengalaman maupun pada aspek kegiatan pembelajaran; c) menentukan partisipasi dosen dalam mensukseskan proses pembelajaran; d) menentukan salah satu sarana dan prasana termasuk di dalamnya media pembelajaran yang akan digunakan dosen dalam kegiatan pembelajaran; e) merumuskan evaluasi hasil pembelajaran dan pengembangan pembelajaran setelah melakukan keseluruhan proses baik dari awal sampai akhir. Semua itu terangkum dalam komponen perangkat perencanaan pembelajaran.

2. Pengorganisasian Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember

Pada langkah kedua manajemen pembelajaran adalah pengorganisasian. Setelah merumuskan perencanaan pembelajaran, langkah-langkah yang dilakukan oleh dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi adalah: a) menyediakan beberapa sarana dan prasana kampus yang digunakan dan personel yang diperlukan untuk

penyusunan kerangka yang efektif dan efisien; b) mengelompokkan komponen pembelajaran dalam struktur lembaga pendidikan secara teratur, c) membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran, baik antara dosen, mahasiswa maupun personel lainnya; dan d) menetapkan metode dan prosedur pembelajaran secara sistematis dari awal sampai berakhirnya kegiatan pembelajaran.

3. Pelaksanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember dilaksanakan variatif. Dosen matakuliah pendidikan antikorupsi tidak hanya melaksanakan pendidikan di dalam kampus dan tidak hanya sesuai dengan jam perkuliahan matakuliah tersebut. Materi tersebut juga kadang dilaksanakan di luar kelas dengan menggunakan berbagai elemen sumber belajar. Selain itu, dosen juga mengadakan kegiatan di luar jam baik melalui mahasiswa dan lembaga MA dan SMK. Pada acara tersebut, audiennya merupakan anak MA dan SMK Al-Qodiri Jember dan mahasiswa sebagai panitia dan penyaji sosialisasi pendidikan antikorupsi. Pelaksanaan pembelajaran berjalan secara aktif dengan menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Semua tahap pembelajaran mulai dari pra intruksional/pendahuluan, tahap intruksional/inti pembelajara, dan penutup sudah dijalankan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

4. Evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember

Pelaksanaan evaluasi matakuliah pendidikan antikorupsi dilakukan dengan dua langkah, yaitu: evaluasi hasil belajar maupun evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar mahasiswa ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan oleh dosen dalam pembelajaran, baik itu berbentuk formatif maupun sumatif. Ketika dosen tersebut telah melakukan evaluasi formatif, dosen tersebut, kadang mengembangkan materi dan berdiskusi dengan dosen lainnya termasuk juga dengan Ketua Jurusan Tarbiyah untuk mengembangkan semua unit pembelajaran yang telah diajarkan, mulai dari materi, metode, waktu sampai unit-unit yang lainnya. Begitu juga pada waktu dosen tersebut melakukan evaluasi sumatif. Dosen tersebut juga mengembangkan referensi dan berdiskusi dengan dosen lainnya untuk menilai apa proses pembelajaran yang telah dilalui membuat mahasiswa sudah mampu mengembangkan tiga ranah tersebut yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Sedangkan pada tahap evaluasi proses pembelajaran, dosen matakuliah pendidikan antikorupsi juga telah melakukan. Dosen tersebut melakukan evaluasi setelah proses pembelajaran selesai. Seperti contohnya, pada waktu tahun pertama mengajar, dosen tersebut masih belum banyak melakukan pengembangan pembelajaran, tetapi setelah tahun kedua banyak inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh dosen tersebut terutama dalam proses evaluasi pembelajaran, seperti tugas menulis kisah nyata yang berkaitan dengan korupsi. Tugas ini untuk menggugah afeksi, kreatifitas menulis dan kemampuan mahasiswa. Selain itu, ada tugas sosialisasi pendidikan antikorupsi ke lembaga

pendidikan MTs, MA dan SMK Al-Qodiri yang tiada lain untuk mengetahui apa mahasiswa tersebut sudah menguasai terutama konsep pendidikan antikorupsi terhadap apa yang telah dia pelajari.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Dosen matakuliah pendidikan antikorupsi, hendaknya semakin termotivasi, bersikap optimistis, ulet dan selalu melakukan inovasi dalam pelaksanaan semua fungsi manajemen pendidikan antikorupsi.
2. Mahasiswa, hendaknya belajar lebih giat, aktif, kreatif dan inovatif sesuai dengan manajemen pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh dosen pendidikan antikorupsi.
3. STAI Al-Qodiri Jember, hendaknya pimpinan selalu mendukung dan menciptakan suasana yang ilmiah untuk mendukung kesuksesan kegiatan pembelajaran termasuk juga pembelajaran dalam matakuliah pendidikan antikorupsi pada aspek pelaksanaan manajemen pembelajaran pendidikan antikorupsi.
4. Masyarakat terutama peneliti lainnya, hendaknya penelitian ini menjadi bahan masukan yang bermanfaat untuk penelitian yang lebih komprehensif dan konstruktif.

DAFTAR RUJUKAN

- Anam, Nurul. 2013. *Pendidikan Antikorupsi di Pesantren: Konsep Nilai dan Desain Pembelajaran*, (Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM)).
- Arifin, Mike S. 1996. *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang: Kalimatussahada Press.
- Arikunto, Suharsimi dan Lia Yuliana. 2009. *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bafadal, Ibrahim. 2004. *Manajemen Perlengkapan Lembaga pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Bahari, Adib dan Khotibul Umam. 2009. *Komisi Pemberantasan Korupsi, dari A sampai Z*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Bogdan, Robert C., et.al. 1998. *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods*, London: Allyn and Bacon Inc.
- Cahaya, Arifah. 2013. *Peta Korupsi Di Indonesia: Fakta dan Data terkait Korupsi di Indonesia*, Diambil Tanggal 20 Januari 2014 dalam <http://arifahcahaya11.blogspot.com/2013/03/peta-korupsi-di-indonesia.html>
- Dahar, Ratna Wilis. 1989. *Teori-teori Belajar*, Jakarta: Erlangga.
- Danim, Sudarwan. 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka, 2002.

- Djamarah, Syaiful Bahri. 2000. *Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Effendy, Mochtar. 1986. *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Agama Islam*, Jakarta: PT. Bharata Karya Aksara.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Griffin, R. 2006. *Business*, 8th Edition. NJ: Prentice Hall.
- Hamalik, Oemar. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hamdani, Anwar. 2012. *Model Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa SLTA di Wilayah Kota Surakarta*, Makalah Penelitian.
- Handoyo, Eko dkk. Tt. *Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Antikorupsi Di Sma 6 Kota Semarang*, Hasil Penelitian Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
- Hasibuan, Malayu S. 2005. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen; Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hicks, Herbert and Ray Gullett, C. 1981. *Organization: Theory and Behavior*, London: Mc Graw Hill.
- Hicks, Herbert and Ray Gullett, C. 1981. *Organization: Theory and Behavior*, London: Mc Graw Hill.

Kemendikbud. 2011. *Pendidikan Antikorupsi untuk Per dosenan Tinggi*, Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian.

Kementerian Agama. 2013. *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah*, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

----- . *Pedoman Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Per dosenan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2013*, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Ki Supriyoko. 2006. *Peran Pendidikan dalam Mencegah Timbulnya Mental Korupsi Anak Bangsa Indonesia*, dalam Buku, “Agama sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global”, Ed. Moh. Asror Yusuf, Yogyakarta: IRCISoD.

Koentjoroningrat. 1938. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia.

Komsiyah, Indah. 2012. *Belajar dan Pembelajaran*, Yogyakarta: Teras.

KPK. *Tt. Pahami Dulu Baru Lawan: Buku Saku Mengenali Korupsi*, (Jakarta: KPK.

Kurdi, Syeb dan Abdul Aziz. 2006. *Model Pembelajaran Efektif Pendidikan Agama Islam di SD dan MI*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

- Madany, A. Malik. 2007. "Korupsi Sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Islam", dalam artikel di www.nu-anti-korupsi.or.id, diakses pada 5 Maret 2007.
- Majid, Abdul. 2005. *Perencanaan Pembelajaran : Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Majid, Abdul. 2005. *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Dosen*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Makmun, Abin Syamsudin. 2010. *Pengelolaan Pendidikan*, Bandung: Pustaka Eduka.
- Mannulang. 1976. *Dasar-dasar Mangemen*, Jakarta: Ghalia.
- Manzini, E. 1996. *Sustainable Product Services Development; Workshop Organized by UNEP-WG-SPD en Pioneer industries on Sustainable Services*, Amsterdam: In The INNES Conference challenge of Sustainable Development.
- Manzini, E. 1996. *Sustainable Product Services Development; Workshop Organized by UNEP-WG-SPD en Pioneer industries on Sustainable Services*, Amsterdam: In The INNES Conference challenge of Sustainable Development.
- Miles, M.B.& Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis: a Source Book of New Methods*. California: Sage Publication Inc.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian*, Bandung : PT Rema Rosda Karya.
- Mulyasa, E. 2002. *Manajemen Berbasis Lembaga pendidikan, Konse Strategi, dan Implementasi*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya.

- Mulyasa, E. 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawir, Ahmad Warson. 1884. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Ponpes Krpyak al-Munawwir, 1884.
- Musfah, Jejen. 20015. *Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muzadi, Hasyim. 2007. “Merubah Perilaku Korup Melalui Moral Keagamaan”, dalam artikel di www.nu-anti.korupsi.or.id , diakses pada 5 Maret 2007.
- Nazarudin. 2007. *Manajemen Pembelajaran: Implementasi Konsep, Karakteristik dan Metodologi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum*, Yogyakarta: Teras.
- Nurdin, Muhamad. 2014. *Pendidikan Antikorupsi: Strategi Internalisasi Nilai-nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Lembaga pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permendiknas, No 41 tahun 2007 *tentang Standar Proses*.
- Pidarta, Made. 2004. *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Plunkett, Warren R., dkk. 2005. *Management: Meeting and Exceeding Customer Expectations*. 8 Edition. USA: Thomson South-Western Co.
- Sagala, Syaiful. 2010. *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Bandung: Alfabeta.

- Saksono, Ignas G. 2010. *Tantangan Pendidik(an) Memecahkan Problem Bangsa: Tanggapan terhadap Pembatalan UU BHP*, Yogyakarta: Forkoma PMKRI.
- Sanjaya, Wina. 2008. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Cet 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sanjaya, Wina. 2011. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Cet 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Scott, James C. 1990. *Korupsi Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Wajib Belajar*.
- Setiawan, Benni. 2008. *Agenda Pendidikan Nasional*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Sholikhin dan Nurul Anam. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi: Konsep dan Aplikasi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah dan Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IAIN Jember Press.
- Singgih. 2002. *Dunia Pun Memerangi Korupsi: Beberapa Catatan dari International Anti Corruption Conference I – X dan Dokumen PBB tentang Pemberantasan Korupsi*, Tangerang: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pellita Harapan.
- Soesilo. 2008. *Korupsi Refleksi Zaman Edan*, Malang: Yayasan “Yusula”, 2008.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 21 Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2008. *Manajemen Pendidikan: Suatu Pengantar bagi Calon Dosen*, Surakarta: LPP UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS.

- Sukardi. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi da Praktiknya*, Jakarta: Bumi Akasara.
- Sulistiawan, Bhayu. 2008. *Nilai-Nilai Anti korupsi dalam Pendidikan Islam (Tinjauan Normatif Aspek Kurikulum Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan Anti korupsi)*, Skripsi di Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2008.
- Sumiarti. 2007. *Pendidikan Antikorupsi*, P3M STAIN Purwokerto: INSANIA, Vol. 12, No. 2, 8 Mei-Ags 2007.
- Suryabrata, Sumardi. 1998. *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo: Jakarta.
- Suryobroto. 2009. *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, Cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sutopo. 1999. *Administrasi Manajemen dan Organisasi*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Syafi'i, Asrop. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Elkap.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang. 1989. *Administrasi Pendidikan*, Cetakan Kedua, Malang: IKIP Malang.
- Tim Penulis. 2011. *Pendidikan Antikorupsi untuk Perdosenan Tinggi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian.
- Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001
tentang Tindak Pidana Korupsi;

Undang Uundang No. 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Wahab, Abdul. 1999. *Menulis Karya Ilmiah* Surabaya: Airlangga University
Press.

Wibowo, Agus. 2012. *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter
Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wojowarsito, Purwodarminto. 1974. *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris*, Jakarta:
Hasta.

Yin, Robert K. 2008. "Case Study Research: Design and Methods",
diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir, *Studi Kasus: Desain dan Metode*.
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Yulaelawati, Ella. 2004. *Kurikulum dan Pembelajaran. Filosofi Teori dan
Aplikasi*, Jakarta: Pakar Raya.

Zuhriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta :
Bumia Aksara.

IAIN JEMBER

INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN UNTUK DOSEN MATAKULIAH PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Nama :
Status Jabatan:

1. Bagaimana perencanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016?
 - a. Apa yang dilakukan bapak/ibu dalam merencanakan pembelajaran mata kuliah pendidikan antikorupsi? Apa sesuai dengan langkah di atas?
 - b. Bagaimana merumuskan tujuan pendidikan antikorupsi? dan Apa tujuan dari matakuliah pendidikan antikorupsi yang bapak/ibu susun?
 - c. Bagaimana pengalaman proses belajar yang telah didesain? dan bagaimana langkah-langkahnya?
 - d. Bagaimana rencana kegiatan pembelajaran yang telah bapak/ibu rumuskan? Dan apa merancang pembelajarannya melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individu?
 - e. Apa saja yang terlibat dalam pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi? Apa menggunakan berbagai media seperti, OHP, LCD, papan tulis dan lain sebagainya?
 - f. Bagaimana bapak/ibu merencanakan evaluasi dan pengembangan matakuliah pendidikan antikorupsi?
 - g. Apa ada langkah lain selain secara teoritis di atas?
2. Bagaimana pengorganisasian Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016?
 - a. Apa yang dilakukan bapak/ibu dalam mengorganisasi pembelajaran mata kuliah pendidikan antikorupsi? Apa sesuai dengan langkah di atas?
 - b. Apa bapak/ibu menyusun kerangka/sistematika yang efisien dalam matakuliah pendidikan antikorupsi? seperti apa kerangka materi yang telah bapak/ibu susun?
 - c. Bagaimana struktur wewenang bapak/ibu dalam kegiatan pembelajaran? dan bagaimana mekanisme koordinasi pembelajarannya, apa satu arah, dua arah atau variatif?
 - d. Apa bapak/ibu merumuskan dan menetapkan metode dan prosedur pembelajaran? bagaimana metode pembelajaran dan prosedur pembelajaran yang digunakan?
 - e. Apa ada langkah lain selain secara teoritis di atas?
3. Bagaimana pelaksanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016?
 - a. Apa yang dilakukan bapak/ibu dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah pendidikan antikorupsi? Apa sesuai dengan langkah di atas?
 - b. Apa bapak/ibu lakukan pada tahap pra-pembelajaran?
 - c. Apa bapak/ibu lakukan pada tahap inti pembelajaran?
 - d. Apa bapak/ibu lakukan pada tahap evaluasi pembelajaran?
 - e. Apa ada langkah lain selain secara teoritis di atas?
4. Bagaimana evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016?

- a. Apa yang dilakukan bapak/ibu dalam evaluasi pembelajaran mata kuliah pendidikan antikorupsi? Apa sesuai dengan langkah di atas?
- b. Apa bapak/ibu membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan dosen dengan stbapak/iburd proses pembelajaran?
- c. Apa saja evaluasi pada program pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi?
- d. Apa ada langkah lain selain secara teoritis di atas?



INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN UNTUK KETUA STAIQOD, PK 1, KETUA PRODI&KAJUR TARBIYAH

Nama :
Status Jabatan:

1. Bagaimana perencanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016?

SECARA TEORI:

Secara terperinci, rumusan penyusunan komponen perangkat perencanaan pembelajaran mata kuliah pendidikan antikorupsi antara lain:

- a. Merumuskan tujuan khusus. Rumusan tujuan pembelajaran harus mencakup tiga aspek penting yang di istilahkan oleh Bloom (1956) merupakan domain kognitif, afektif dan domain psikomotorik.
- b. Pengalaman belajar. Langkah kedua dalam merencanakan pembelajaran adalah memilih pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman.
- c. Kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai, pada dasarnya kita dapat merancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individu.
- d. Orang-orang yang terlibat. Peran dosen dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran. Dalam pelaksanaan peran tersebut diantaranya dosen berfungsi sebagai penyampai informasi. Agar dosen dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik, maka dosen harus memiliki kemampuan untuk berbicara serta berkomunikasi, menggunakan berbagai media seperti, OHP, LCD, papan tulis dan lain sebagainya.
- e. Bahan dan alat. Pemilihan bahan dan alat juga merupakan bagian dari sistem perencanaan pembelajaran.
- f. Fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran.
- g. Perencanaan evaluasi dan pengembangan. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam sebuah sistem perencanaan pembelajaran. Melalui evaluasi kita dapat melihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran.

PERTANYAAN PENELITIAN:

- a. Apa selama ini dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah merencanakan pembelajaran dengan baik?, alasannya.
- b. Apa bapak/ibu sudah memberikan waktu pada dosen tersebut untuk merencanakannya?
- c. Apa hambatan atau masalah yang dihadapi dosen tersebut dalam perencanaan pembelajarannya?

2. Bagaimana pengorganisasian Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016?

SECARA TEORI:

Pengorganisasian pembelajaran menurut Syaiful Sagala meliputi beberapa aspek:

- a. Menyediakan fasilitas, perlengkapan dan personel yang diperlukan untuk penyusunan kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui

- suatu proses penetapan pelaksanaan pembelajaran yang diperlukan untuk menyelesaikannya.
- Mengelompokkan komponen pembelajaran dalam struktur lembaga pendidikan secara teratur.
 - Membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran.
 - Merumuskan dan menetapkan metode dan prosedur pembelajaran.

PERTANYAAN PENELITIAN:

- Apa selama ini dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah mengorganisasi pembelajaran dengan baik?, alasannya.
 - Apa yang menjadi kendala dosen tersebut dalam mengordinasikannya?
3. Bagaimana pelaksanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016?

SECARA TEORI:

Langkah pelaksanaan:

- Tahap pra instruksional. Tahap yang ditempuh pada saat memulai sesuatu proses belajar mengajar: Dosen menanyakan kehadiran siswa dan mencatat siswa yang tidak hadir; Bertanya kepada siswa sampai dimana pembahasan sebelumnya; Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya dari pelajaran yang sudah disampaikan; Mengulang bahan pelajaran yang lain secara singkat.
- Tahap instruksional. Tahap pemberian bahan pelajaran yang dapat diidentifikasi beberapa kegiatan sebagai berikut: menjelaskan kepada siswa tujuan pengajaran yang harus dicapai siswa; menjelaskan pokok materi yang akan dibahas; membahas pokok materi yang sudah dituliskan; pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh yang kongkret, pertanyaan, tugas; Penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan pada setiap materi pelajaran; menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi.
- Tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan tahap instruksional, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu: Mengajukan pertanyaan kepada kelas atau kepada beberapa murid mengenai semua aspek pokok materi yang telah dibahas pada tahap instruksional; Apabila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh siswa (kurang dari 70%), maka dosen harus mengulang pengajaran; Untuk memperkaya pengetahuan siswa mengenai materi yang dibahas, dosen dapat memberikan tugas atau PR; Akhiri pelajaran dengan menjelaskan atau memberitahukan pokok materi yang akan dibahas pada pelajaran berikutnya.

PERTANYAAN PENELITIAN:

- Apa selama ini dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik?, alasannya.
 - Apa hambatan atau masalah yang dihadapi dosen tersebut dalam pelaksanaannya?
 - Apa pelaksanaannya mempunyai pengaruh yang baik bagi proses pembelajaran di STAIQOD?
4. Bagaimana evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016?

SECARA TEORI:

Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara:

- a. Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan dosen dengan stbapak/iburd proses.
- b. Evaluasi pada program pembelajaran meliputi: (1) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dibanding dengan rencana; (2) melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi dan merumuskan tindakan koreksi, menyusun stbapak/ibur-stbapak/ibur pembelajaran dan sasaran-sasaran; dan (3) menilai pekerjaan dan melakukan tindakan terhadap penyimpangan-penyimpangan baik institusional satuan pendidikan maupun proses pembelajaran.

PERTANYAAN PENELITIAN:

- a. Apa selama ini dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah mengevaluasi pembelajaran dengan baik?, alasannya.
- b. Apa hambatan atau masalah yang dihadapi dosen tersebut dalam mengevaluasi?
- c. Apa pelaksanaannya mempunyai pengaruh yang baik bagi peningkatan hasil belajar mahasiswa di STAIQOD?



INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN UNTUK KETUA STAIQOD, PK 1, KETUA PRODI&KAJUR TARBIYAH

Nama :
Status Jabatan:

1. Bagaimana perencanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016?

SECARA TEORI:

Secara terperinci, rumusan penyusunan komponen perangkat perencanaan pembelajaran mata kuliah pendidikan antikorupsi antara lain:

- a. Merumuskan tujuan khusus. Rumusan tujuan pembelajaran harus mencakup tiga aspek penting yang di istilahkan oleh Bloom (1956) merupakan domain kognitif, afektif dan domain psikomotorik.
- b. Pengalaman belajar. Langkah kedua dalam merencanakan pembelajaran adalah memilih pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman.
- c. Kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai, pada dasarnya kita dapat merancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individu.
- d. Orang-orang yang terlibat. Peran dosen dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran. Dalam pelaksanaan peran tersebut diantaranya dosen berfungsi sebagai penyampai informasi. Agar dosen dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik, maka dosen harus memiliki kemampuan untuk berbicara serta berkomunikasi, menggunakan berbagai media seperti, OHP, LCD, papan tulis dan lain sebagainya.
- e. Bahan dan alat. Pemilihan bahan dan alat juga merupakan bagian dari sistem perencanaan pembelajaran.
- f. Fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran.
- g. Perencanaan evaluasi dan pengembangan. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam sebuah sistem perencanaan pembelajaran. Melalui evaluasi kita dapat melihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran.

PERTANYAAN PENELITIAN:

- a. Apa selama ini dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah merencanakan pembelajaran dengan baik?, alasannya.

2. Bagaimana pengorganisasian Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016?

SECARA TEORI:

Pengorganisasian pembelajaran menurut Syaiful Sagala meliputi beberapa aspek:

- a. Menyediakan fasilitas, perlengkapan dan personel yang diperlukan untuk penyusunan kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui suatu proses penetapan pelaksanaan pembelajaran yang diperlukan untuk menyelesaikannya.
- b. Mengelompokkan komponen pembelajaran dalam struktur lembaga pendidikan secara teratur.

- c. Membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran.
- d. Merumuskan dan menetapkan metode dan prosedur pembelajaran.

PERTANYAAN PENELITIAN:

- a. Apa selama ini dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah mengorganisasi pembelajaran secara baik dan sistematis?, alasannya.
- b. Apa selama ini dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah mengorganisasi pembelajaran secara efektif?, alasannya.
- c. Apa selama ini dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah mengorganisasi pembelajaran secara efisien?, alasannya.

3. Bagaimana pelaksanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016?

SECARA TEORI:

Langkah pelaksanaan:

- a. Tahap pra instruksional. Tahap yang ditempuh pada saat memulai sesuatu proses belajar mengajar: Dosen menanyakan kehadiran siswa dan mencatat siswa yang tidak hadir; Bertanya kepada siswa sampai dimana pembahasan sebelumnya; Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya dari pelajaran yang sudah disampaikan; Mengulang bahan pelajaran yang lain secara singkat.
- b. Tahap instruksional. Tahap pemberian bahan pelajaran yang dapat diidentifikasi beberapa kegiatan sebagai berikut: menjelaskan kepada siswa tujuan pengajaran yang harus dicapai siswa; menjelaskan pokok materi yang akan dibahas; membahas pokok materi yang sudah dituliskan; pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh yang kongkret, pertanyaan, tugas; Penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan pada setiap materi pelajaran; menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi.
- c. Tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan tahap instruksional, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu: Mengajukan pertanyaan kepada kelas atau kepada beberapa murid mengenai semua aspek pokok materi yang telah dibahas pada tahap instruksional; Apabila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh siswa (kurang dari 70%), maka dosen harus mengulang pengajaran; Untuk memperkaya pengetahuan siswa mengenai materi yang dibahas, dosen dapat memberikan tugas atau PR; Akhiri pelajaran dengan menjelaskan atau memberitahukan pokok materi yang akan dibahas pada pelajaran berikutnya.

PERTANYAAN PENELITIAN:

- a. Apa selama ini dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik?, alasannya.
- b. Apa dosen tersebut menggunakan berbagai strategi atau metode? Apa strategi yang banyak digunakan?
- c. Apa dosen tersebut memberikan waktu yang lebih banyak pada mahasiswa untuk aktif baik bertanya maupun berdiskusi?

4. Bagaimana evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016?

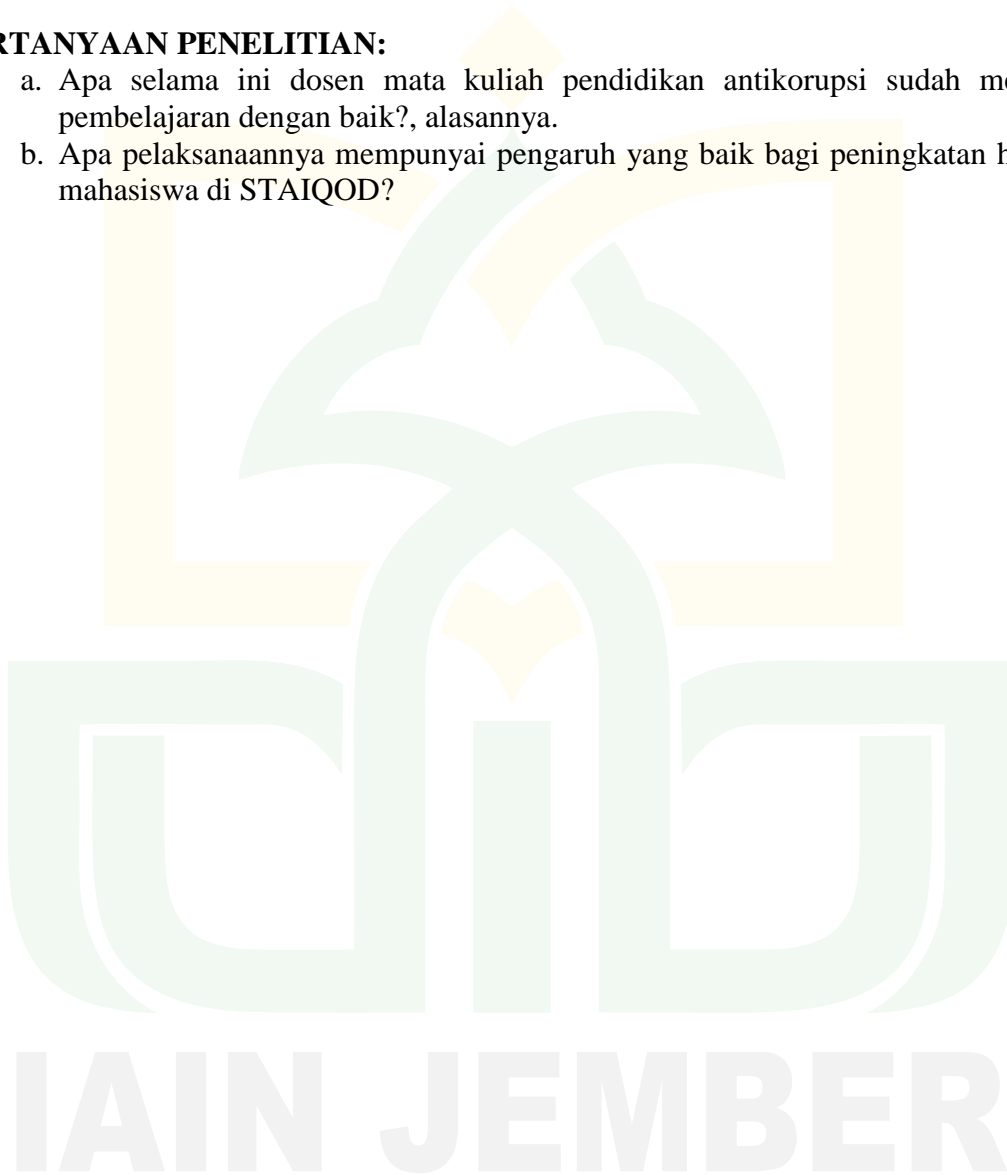
SECARA TEORI:

Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara:

- a. Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan dosen dengan stbapak/iburd proses.
- b. Evaluasi pada program pembelajaran meliputi: (1) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dibanding dengan rencana; (2) melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi dan merumuskan tindakan koreksi, menyusun stbapak/ibur-stbapak/ibur pembelajaran dan sasaran-sasaran; dan (3) menilai pekerjaan dan melakukan tindakan terhadap penyimpangan-penyimpangan baik institusional satuan pendidikan maupun proses pembelajaran.

PERTANYAAN PENELITIAN:

- a. Apa selama ini dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah mengevaluasi pembelajaran dengan baik?, alasannya.
- b. Apa pelaksanaannya mempunyai pengaruh yang baik bagi peningkatan hasil belajar mahasiswa di STAIQOD?



MANAJEMEN PEMBELAJARAN MATAKULIAH PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI JURUSAN TARBIYAH STAI AL-QODIRI JEMBER 2015/2016

Umi Nurhayati¹
uminurhayati@yahoo.com. Hp. 081234618446

ABSTRAK

Pendidikan Antikorupsi (PAK) dilaksanakan di perguruan tinggi. PAK menjadi matakuliah tersendiri. PAK akan berjalan dengan baik, apabila menerapkan manajemen pembelajaran secara efektif dan efisien. Manajemen pembelajaran dalam matakuliah pendidikan antikorupsi sangat penting, karena itu akan mempermudah guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dari yang sudah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan jenis studi kasus. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Prosedur pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam, teknik pengamatan peran serta, dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Milles dan Hunberman. yaitu; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Uji validitas data menggunakan kredibilitas data dengan lima teknik pencapaian, yaitu; perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dan pengecekan anggota.

Hasil penelitian: 1) dosen telah merumuskan perencanaan pembelajaran, yaitu: merumuskan KD dan Indikator, mendesain proses pembelajaran, menentukan partisipasi dosen, salah satu sarana dan prasana serta merumuskan evaluasi hasil pembelajaran dan pengembangan pembelajaran, 2) langkah-langkah perumusan pengorganisasian yaitu: menyediakan beberapa sarana dan prasana dan personel, mengelompokkan komponen pembelajaran, membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran, serta menetapkan prosedur pembelajaran, 3) pelaksanaannya dilaksanakan variatif dengan melaksanakan pendidikan di dalam dan di luar jam perkuliahan seperti salah satunya sosialisasi pendidikan antikorupsi ke MA dan SMK. Pelaksanaan pembelajaran berjalan secara aktif dengan menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Semua tahap pembelajaran mulai dari pra intruksional/pendahuluan, tahap intruksional/inti pembelajara, dan penutup sudah dijalankan dengan baik, dan 4) pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan dua langkah, yaitu: evaluasi hasil belajar maupun evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar berbentuk formatif maupun sumatif. Sedangkan pada tahap evaluasi proses pembelajaran, dosen matakuliah pendidikan antikorupsi juga telah melakukan dengan hasilnya berbentuk inovasi proses pembelajaran.

Kata Kunci: Manajemen Pembelajaran, Matakuliah Pendidikan Antikorupsi.

¹ Guru di Mts Al-Qadiri Jember

ABSTRAC

Anti-Corruption Education (ACE) is implemented in higher educations. ACE is a standalone course. ACE will run well if it applies teaching management effectively and efficiently. The teaching management in ACE course is important because it eases teachers to achieve the learning goals which have already set.

This research aims to describe the plan, organization, implementation and evaluation of Anti-Corruption Education course in Tarbiyah Faculty of STAI Al-Qodiri Jember in academic year of 2015/2016. This research used qualitative method and was designed in study case. The informants was determined by purposive and snowball sampling techniques. Data was obtained from a depth interview, observation and documentation. The obtained data was then analyzed using the interactive model of Miles and Huberman: data reduction, data displays and conclusion drawing or verifying. The data validity was determined by five techniques such as the extension of participation, the persistence of observation, triangulation, peer assessment through discussion and checking by the members.

The research findings show that: 1) teachers design the lesson plans based on SK, KD and indicators, design teaching process, determine teachers' participation and teaching aids, and design the evaluation of learning outcomes and development, 2) the steps to formulate the organization are: providing facilities and personals, grouping learning components, setting the structure of authority and the mechanism of teaching coordination, and determining teaching procedures, 3) the course is implemented variously by providing education both in and out of course time schedule such as socializing ACE to senior high schools (MA and SMK). The teaching was actively carried out in student centered learning. All teaching stages run effectively from opening activities, main activities until closing activities, and 4) the evaluation is taken in two steps: the evaluation of learning outcomes and the evaluation of learning process. The evaluation of learning outcomes is formative and summative. Meanwhile, as a result of the evaluation of learning process, the teachers of ACE course have been doing some innovations in the teaching process.

Keywords: teaching management, anti-corruption education

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai wadah terbaik bagi masa depan suatu bangsa. Melalui proses pendidikan akan tercipta suatu generasi terbaik untuk mengembangkan dan memajukan suatu bangsa termasuk juga bangsa Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 dan 3, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.²

Korupsi bidang pendidikan di Indonesia hampir terjadi di semua level penyelenggaraan pendidikan dengan pola lama dan baru yang dilakukan unsur birokrasi dan lembaga pendidikan, bahkan sekecil apapun dana pendidikan itu selalu menjadi target korupsi akibat pengawasan yang tidak berjalan efektif. Sebagaimana dalam berita Kompas (1 Oktober 2013), dijelaskan bahwa beberapa laporan dugaan korupsi di lembaga pendidikan, Badan Pengawasan Daerah (Banwasda) justru melindungi rezim korup Dinas Pendidikan dan diperparah lagi tidak ada inisiatif reformasi birokrasi untuk mencegah korupsi pendidikan, bahkan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan menemukan transaksi keuangan tidak sah dari sekelas pegawai kemendikbud yang ditengarai memiliki uang sebanyak Rp. 5 Miliar setelah.³ Menurut Soebahar, dalam upaya kelancaran dan mengefektifkan komunikasi dalam proses interaksi antara guru dan siswa dibutuhkan sejumlah alat-alat pendidikan berupa sarana dan prasarana pendidikan.⁴ Menurut Supardi agar terjadi proses pembelajaran yang bermutu perlu didukung sarana-prasarana pendidikan, fasilitas, media dan sumber belajar yang memadai (baik kualitas maupun kuantitasnya), manajemen yang tepat serta lingkungan yang mendukung.⁵

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di lembaga pendidikan tidak hanya di lembaga lembaga pendidikan, tapi juga di perguruan tinggi. Karena pendidikan antikorupsi sangat urgen diterapkan, maka di perguruan tinggi, pendidikan antikorupsi menjadi matakuliah tersendiri. Matakuliah Pendidikan antikorupsi hadir sebagai solusi problem moralitas dan karakter itu dengan menciptakan mahasiswa sebagai generasi antikorupsi. Menurut Nanang T.

² Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Wajib Belajar* (Bandung: Citra Umbara, 2011), 2-3.

³ Kompas, 1 Oktober 2013

⁴ Abd. Halim Soebahar, *Dasar-Dasar Kependidikan* (Jember: Pena Salsabila, 2009), 134.

⁵ Supardi, *Sekolah Efektif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 169.

Puspito dkk, keterlibatan mahasiswa tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum, tapi keterlibatannya difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Salah satu upaya pencegahan korupsi yaitu dengan proses perkuliahan. Pendidikan antikorupsi dalam dalam proses perkuliahan bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi.⁶

Dari diskripsi di atas, maka penelitian ini yang berjudul, “Manajemen Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016”, sangat menarik untuk diteliti.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif manusia adalah sebagai sumber data utama dan hasil penelitiannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya (alamiah). Hal ini sesuai dengan pendapat Denzin dan Lincoln yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁷

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di yaitu Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember. Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember berada dalam naungan STAI Al-Qodiri Jember. Alasan pemilihan jurusan tarbiyah dijadikan sebagai lokasi penelitian untuk meneliti tentang

⁶ Tim Penulis, *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), 23-24.

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 5.

manajemen pendidikan antikorupsi disebabkan di Jurusan Tarbiyah perencanaannya tidak hanya berpatokan pada sumber buku saja, tapi juga dengan hasil diskusi dengan dosen-dosen lainnya dan pelaksanaan perkuliahan pendidikan antikorupsi diimplementasikan dengan memposisikan mahasiswa lebih banyak berperan aktif dalam perkuliahan.

Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan salah satu unsur penting dalam penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang proses manajemen pembelajaran pada matakuliah pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan peneliti, sehingga manusia sebagai instrumen penelitian menjadi suatu keharusan, bahkan dalam penelitian kualitatif, posisi peneliti menjadi instrumen kunci.⁸

Subyek Penelitian

Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel bertujuan dan teknik *snowball sampling*. Penggunaan teknik *purposive sampling* dimaksudkan sebagai teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan. penggunaan *snowball sampling* ini diibaratkan sebagai bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Sehingga proses penelitian ini baru berhenti setelah informasi yang diperoleh di antara informan yang satu dengan yang lainnya mempunyai kesamaan.

Sumber Data

Data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 21, (Bandung: Alfabeta, 2014), 223.

pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti yang biasanya berwujud dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.⁹ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil interview dengan: ketua dan sekretaris Jurusan, dosen matakuliah pendidikan antikorupsi prodi PAI dan mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember. Bentuk data sekunder seperti tulisan-tulisan, rekaman-rekaman, gambar-gambar atau foto-foto yang berhubungan dengan supervisi pengajaran.

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manusia/orang dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai subjek atau informan kunci (key informants). Sedangkan sumber data bukan manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto, catatan rapat atau tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Dalam hal ini data digali dengan melihat data-data dokumen di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember.

Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga tehnik, yaitu:

1. Tehnik wawancara mendalam

Wawancara secara mendalam memerlukan pedoman wawancara. Pedoman yang digunakan peneliti adalah pedoman wawancara tidak terstruktur karena pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang ditanyakan sehingga kreatifitas peneliti sangat diperlukan.¹⁰

⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 91.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek...*, 22.

2. Tehnik pengamatan peran serta

Teknik pengamatan peran serta dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan subyek. Oleh karena itu, teknik ini disebut observasi peran serta/*participant observation*. Kegiatan pengamatan peran serta yang dilakukan selama penelitian dimulai dari *grand tour observation* (kegiatan observasi menyeluruh). Tujuannya adalah untuk mengetahui semua kegiatan yang berhubungan dengan manajemen pembelajaran baik pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember.

3. Tehnik dokumentasi

Yang dimaksud dengan dokumen menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip oleh Rulam Ahmadi di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah obeservasi partisipan atau wawancara. Dokumen dapat pula berupa usulan, kode etik, buku tahunan, selebaran berita, surat pembaca (di surat kabar, majalah) dan karangan di surat kabar.¹¹

Analisis Data

Milles dan Huberman berpendapat analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas proses pencarian data. Data tersebut telah dikumpulkan dalam berbagai cara seperti observasi, wawancara, atau intisari rekam yang

¹¹ Rulam Ahmadi, 2005, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Universitas Negeri Malang, Malang) :114

kemudian diproses melalui perencanaan, pengetikan atau pengaturan kembali.¹² Yakni dengan menggunakan tiga langkah:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang mulcul dari catatan tertulis di lapangan.¹³ Dapat di artikan bahwa reduksi data merupakan proses analisis untuk menggolongkan, mengorganisasikan data, memilah data yang di anggap perlu dan relevan, serta membuang data yang di anggap tidak penting.

2. Penyajian Data

Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif kita dapat melakukan penyajian data dengan menyusun uraian singkat, dan sejenisnya untuk mempermudah peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi untuk kemudian merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁴

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, dimana kesimpulan yang dirumuskan telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas atau remang-remang sehingga setelah diteliti mejadi jelas. Hal ini dimaksudkan untuk

¹² Milles and Hubarman, *Qualitative Data Analysis*. (London: Sage Publication, 1992), 15.

¹³ Milles and Hubarman.....15.

¹⁴ Milles and Hubarman.....17.

memberi arti dan memaknai data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara, ataupun dokumentasi.

Uji Keabsahan Data

Adapun uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kredibilitas. Kriteria kredibilitas data digunakan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran, baik bagi pembaca pada umumnya maupun subjek penelitian. Untuk menjamin kesahihan data, ada lima teknik pencapaian kredibilitas data; perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dan pengecekan anggota.

HASIL PENELITIAN

1. Perencanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember

Dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi merumuskan perencanaan pembelajaran. Salah satu yang dirumuskan antara lain: a) merumuskan KD dan Indikator tentang pendidikan antikorupsi yang mencakup dan mengarah pada aspek domain kognitif, afektif dan psikomotorik; b) mendesain proses pembelajaran baik pada aspek pengalaman maupun pada aspek kegiatan pembelajaran; c) menentukan partisipasi dosen dalam mensukseskan proses pembelajaran; d) menentukan salah satu sarana dan prasana termasuk di dalamnya media pembelajaran yang akan digunakan dosen dalam kegiatan pembelajaran; e) merumuskan evaluasi hasil pembelajaran dan pengembangan pembelajaran setelah melakukan keseluruhan proses baik dari awal sampai akhir. Semua itu terangkum dalam komponen perangkat perencanaan pembelajaran.

2. Pengorganisasian Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember

Pada langkah kedua manajemen pembelajaran adalah pengorganisasian. Setelah merumuskan perencanaan pembelajaran, langkah-langkah yang dilakukan oleh dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi adalah: a) menyediakan beberapa sarana dan prasana kampus yang digunakan dan personel yang diperlukan untuk penyusunan kerangka yang efektif dan efisien; b) mengelompokkan komponen pembelajaran dalam struktur lembaga pendidikan secara teratur, c) membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran, baik antara dosen, mahasiswa maupun personel lainnya; dan d) menetapkan metode dan prosedur pembelajaran secara sistematis dari awal sampai berakhirnya kegiatan pembelajaran.

3. Pelaksanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember dilaksanakan variatif. Dosen matakuliah pendidikan antikorupsi tidak hanya melaksanakan pendidikan di dalam kampus dan tidak hanya sesuai dengan jam perkuliahan matakuliah tersebut. Materi tersebut juga kadang dilaksanakan di luar kelas dengan menggunakan berbagai elemen sumber belajar. Selain itu, dosen juga mengadakan kegiatan di luar jam baik melalui mahasiswa dan lembaga MA dan SMK. Pada acara tersebut, audiennya merupakan anak MA dan SMK Al-Qodiri Jember dan mahasiswa sebagai panitia dan penyaji sosialisasi pendidikan antikorupsi. Pelaksanaan pembelajaran berjalan secara aktif dengan menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Semua tahap pembelajaran mulai dari pra intruksional/pendahuluan, tahap intrksional/inti pembelajara, dan penutup sudah dijalankan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

4. Evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember

Pelaksanaan evaluasi matakuliah pendidikan antikorupsi dilakukan dengan dua langkah, yaitu: evaluasi hasil belajar maupun evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar mahasiswa ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan oleh dosen dalam pembelajaran, baik itu berbentuk formatif maupun sumatif. Ketika dosen tersebut telah melakukan evaluasi formatif, dosen tersebut, kadang mengembangkan materi dan berdiskusi dengan dosen lainnya termasuk juga dengan Ketua Jurusan Tarbiyah untuk mengembangkan semua unit pembelajaran yang telah diajarkan, mulai dari materi, metode, waktu sampai uni-unit yang lainnya. Begitu juga pada waktu dosen tersebut melakukan evaluasi sumatif. Dosen tersebut juga mengembangkan referensi dan berdiskusi dengan dosen lainnya untuk menilai apa proses pembelajaran yang telah dilalui membuat mahasiswa sudah mampu mengembangkan tiga ranah tersebut yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Sedangkan pada tahap evaluasi proses pembelajaran, dosen matakuliah pendidikan antikorupsi juga telah melakukan. Dosen tersebut melakukan evaluasi setelah proses pembelajaran selesai. Seperti contohnya, pada waktu tahun pertama mengajar, dosen tersebut masih belum banyak melakukan pengembangan pembelajaran, tetapi setelah tahun kedua banyak inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh dosen tersebut terutama dalam proses evaluasi pembelajaran, seperti tugas menulis kisah nyata yang berkaitan dengan korupsi. Tugas ini untuk menggugah afeksi, kreatifitas menulis dan kemampuan mahasiswa. Selain itu, ada tugas sosialisasi pendidikan antikorupsi ke lembaga pendidikan MTs, MA dan SMK Al-Qodiri yang tiada lain untuk mengetahui apa mahasiswa tersebut sudah menguasai terutama konsep pendidikan antikorupsi terhadap apa yang telah dia pelajari.

PEMBAHASAN

A. Perencanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016

Dalam mempersiapkan perencanaan matakuliah pendidikan antikorupsi, dosen sudah melaksanakan perencanaan pembelajaran dengan ketentuan yang sudah ditetapkan karena mahasiswa tidak hanya diajarkan teori saja tapi juga langsung dengan prakteknya. Seperti melakukan praktek dengan cara mendiskusikan problema yang telah sering terjadi di negara kita dan dari dosen sendiri mencontohkan seperti di kemenag.

Sebagaimana hasil dokumentasi di *out line* perkuliahan dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP), perencanaan perkuliahan dipersiapkan dengan baik, seperti penentuan standar pencapaian, KD, indikator perkuliahan, materi perkuliahan, tujuan perkuliahan, strategi dan metode perkuliahan, kegiatan perkuliahan, referensi dan penilaiannya. Dengan demikian, perkuliahan yang dilangsungkan oleh dosen dipersiapkan dengan baik sebelum perkuliahan berlangsung.

B. Pengorganisasian Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016

Pada langkah kedua manajemen pembelajaran adalah pengorganisasian. Setelah merumuskan perencanaan pembelajaran, langkah-langkah yang dilakukan oleh dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi adalah: a) menyediakan beberapa sarana dan prasana kampus yang digunakan dan personel yang diperlukan untuk penyusunan kerangka yang efektif dan efisien; b) mengelompokkan komponen pembelajaran dalam struktur lembaga pendidikan secara teratur, c) membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran, baik antara dosen, mahasiswa maupun personel lainnya; dan d) menetapkan

metode dan prosedur pembelajaran secara sistematis dari awal sampai berakhirnya kegiatan pembelajaran.

C. Pelaksanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember dilaksanakan variatif. Dosen matakuliah pendidikan antikorupsi tidak hanya melaksanakan pendidikan di dalam kampus dan tidak hanya sesuai dengan jam perkuliahan matakuliah tersebut. Materi tersebut juga kadang dilaksanakan di luar kelas dengan menggunakan berbagai elemen sumber belajar. Selain itu, dosen juga mengadakan kegiatan di luar jam baik melalui mahasiswa dan lembaga MA dan SMK. Pada acara tersebut, audiennya merupakan anak MA dan SMK Al-Qodiri Jember dan mahasiswa sebagai panitia dan penyaji sosialisasi pendidikan antikorupsi. Pelaksanaan pembelajaran berjalan secara aktif dengan menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Semua tahap pembelajaran mulai dari pra intruksional/pendahuluan, tahap intruksional/inti pembelajara, dan penutup sudah dijalankan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

D. Evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember

Pelaksanaan evaluasi matakuliah pendidikan antikorupsi dilakukan dengan dua langkah, yaitu: evaluasi hasil belajar maupun evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar mahasiswa ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan oleh dosen dalam pembelajaran, baik itu berbentuk formatif maupun sumatif. Ketika dosen tersebut telah melakukan evaluasi formatif, dosen tersebut, kadang mengembangkan materi dan berdiskusi dengan dosen lainnya termasuk juga dengan Ketua Jurusan Tarbiyah untuk mengembangkan semua unit pembelajaran yang telah diajarkan, mulai dari materi, metode, waktu sampai uni-unit yang lainnya. Begitu juga pada waktu dosen tersebut melakukan

evaluasi sumatif. Dosen tersebut juga mengembangkan referensi dan berdiskusi dengan dosen lainnya untuk menilai apa proses pembelajaran yang telah dilalui membuat mahasiswa sudah mampu mengembangkan tiga ranah tersebut yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Sedangkan pada tahap evaluasi proses pembelajaran, dosen matakuliah pendidikan antikorupsi juga telah melakukan. Dosen tersebut melakukan evaluasi setelah proses pembelajaran selesai. Seperti contohnya, pada waktu tahun pertama mengajar, dosen tersebut masih belum banyak melakukan pengembangan pembelajaran, tetapi setelah tahun kedua banyak inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh dosen tersebut terutama dalam proses evaluasi pembelajaran, seperti tugas menulis kisah nyata yang berkaitan dengan korupsi. Tugas ini untuk menggugah afeksi, kreatifitas menulis dan kemampuan mahasiswa. Selain itu, ada tugas sosialisasi pendidikan antikorupsi ke lembaga pendidikan MTs, MA dan SMK Al-Qodiri yang tiada lain untuk mengetahui apa mahasiswa tersebut sudah menguasai terutama konsep pendidikan antikorupsi terhadap apa yang telah dia pelajari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

1. Perencanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember

Dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi merumuskan perencanaan pembelajaran. Salah satu yang dirumuskan antara lain: a) merumuskan KD dan Indikator tentang pendidikan antikorupsi yang mencakup dan mengarah pada aspek domain kognitif, afektif dan psikomotorik; b) mendesain proses pembelajaran baik pada aspek pengalaman maupun pada aspek kegiatan pembelajaran; c) menentukan partisipasi dosen dalam mensukseskan proses pembelajaran; d) menentukan salah satu sarana dan prasana termasuk di dalamnya media pembelajaran yang akan digunakan dosen dalam kegiatan

pembelajaran; e) merumuskan evaluasi hasil pembelajaran dan pengembangan pembelajaran setelah melakukan keseluruhan proses baik dari awal sampai akhir. Semua itu terangkum dalam komponen perangkat perencanaan pembelajaran.

2. Pengorganisasian Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember

Pada langkah kedua manajemen pembelajaran adalah pengorganisasian. Setelah merumuskan perencanaan pembelajaran, langkah-langkah yang dilakukan oleh dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi adalah: a) menyediakan beberapa sarana dan prasana kampus yang digunakan dan personel yang diperlukan untuk penyusunan kerangka yang efektif dan efisien; b) mengelompokkan komponen pembelajaran dalam struktur lembaga pendidikan secara teratur, c) membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran, baik antara dosen, mahasiswa maupun personel lainnya; dan d) menetapkan metode dan prosedur pembelajaran secara sistematis dari awal sampai berakhirnya kegiatan pembelajaran.

3. Pelaksanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember dilaksanakan variatif. Dosen matakuliah pendidikan antikorupsi tidak hanya melaksanakan pendidikan di dalam kampus dan tidak hanya sesuai dengan jam perkuliahan matakuliah tersebut. Materi tersebut juga kadang dilaksanakan di luar kelas dengan menggunakan berbagai elemen sumber belajar. Selain itu, dosen juga mengadakan kegiatan di luar jam baik melalui mahasiswa dan lembaga MA dan SMK. Pada acara tersebut, audiennya merupakan anak MA dan SMK Al-Qodiri Jember dan mahasiswa sebagai panitia dan

penyaji sosialisasi pendidikan antikorupsi. Pelaksanaan pembelajaran berjalan secara aktif dengan menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Semua tahap pembelajaran mulai dari pra intruksional/pendahuluan, tahap intruksional/inti pembelajara, dan penutup sudah dijalankan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

4. Evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember

Pelaksanaan evaluasi matakuliah pendidikan antikorupsi dilakukan dengan dua langkah, yaitu: evaluasi hasil belajar maupun evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar mahasiswa ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan oleh dosen dalam pembelajaran, baik itu berbentuk formatif maupun sumatif. Ketika dosen tersebut telah melakukan evaluasi formatif, dosen tersebut, kadang mengembangkan materi dan berdiskusi dengan dosen lainnya termasuk juga dengan Ketua Jurusan Tarbiyah untuk mengembangkan semua unit pembelajaran yang telah diajarkan, mulai dari materi, metode, waktu sampai uni-unit yang lainnya. Begitu juga pada waktu dosen tersebut melakukan evaluasi sumatif. Dosen tersebut juga mengembangkan referensi dan berdiskusi dengan dosen lainnya untuk menilai apa proses pembelajaran yang telah dilalui membuat mahasiswa sudah mampu mengembangkan tiga ranah tersebut yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Sedangkan pada tahap evaluasi proses pembelajaran, dosen matakuliah pendidikan antikorupsi juga telah melakukan. Dosen tersebut melakukan evaluasi setelah proses pembelajaran selesai. Seperti contohnya, pada waktu tahun pertama mengajar, dosen tersebut masih belum banyak melakukan pengembangan pembelajaran, tetapi setelah tahun kedua banyak inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh dosen tersebut terutama dalam proses evaluasi pembelajaran, seperti tugas menulis kisah nyata yang berkaitan dengan korupsi. Tugas ini untuk menggugah afeksi, kreatifitas menulis dan kemampuan

mahasiswa. Selain itu, ada tugas sosialisasi pendidikan antikorupsi ke lembaga pendidikan MTs, MA dan SMK Al-Qodiri yang tiada lain untuk mengetahui apa mahasiswa tersebut sudah menguasai terutama konsep pendidikan antikorupsi terhadap apa yang telah dia pelajari.

Saran:

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Dosen matakuliah pendidikan antikorupsi, hendaknya semakin termotivasi, bersikap optimistis, ulet dan selalu melakukan inovasi dalam pelaksanaan semua fungsi manajemen pendidikan antikorupsi.
2. Mahasiswa, hendaknya belajar lebih giat, aktif, kreatif dan inovatif sesuai dengan manajemen pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh dosen pendidikan antikorupsi.
3. STAI Al-Qodiri Jember, hendaknya pimpinan selalu mendukung dan menciptakan suasana yang ilmiah untuk mendukung kesuksesan kegiatan pembelajaran termasuk juga pembelajaran dalam matakuliah pendidikan antikorupsi pada aspek pelaksanaan manajemen pembelajaran pendidikan antikorupsi.
4. Masyarakat terutama peneliti lainnya, hendaknya penelitian ini menjadi bahan masukan yang bermanfaat untuk penelitian yang lebih komprehensif dan konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. 2005. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Negeri Malang, Malang.
- Azwar, Saifuddin. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim Soebahar, Abd. 2009. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jember: Pena Salsabila.

J. Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Milles and Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 21. Bandung: Alfabeta.

Supardi. 2013. *Sekolah Efektif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian.

Tim Penulis. 2011. *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan

Tim Redaksi Citra Umbara. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Wajib Belajar*. Bandung: Citra Umbara.

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Umi Nurhayati

NIM : 0849113090

Program : Magister

Institusi : Pascasarjana IAIN Jember

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis/disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 21 Juni 2016

Saya yang menyatakan,



Umi Nurhayati
NIM. 0849113090

PEDOMAN PENELITIAN

DOKUMENETASI

1. Foto kegiatan pembelajaran mahasiswa dan dosen
2. Foto wawancara dengan informan
3. Arsip-arsip pembelajaran yang relevan

OBSERVASI

1. Mengamati kegiatan mahasiswa dan dosen
2. Mengamati pembelajaran mahasiswa dan dosen

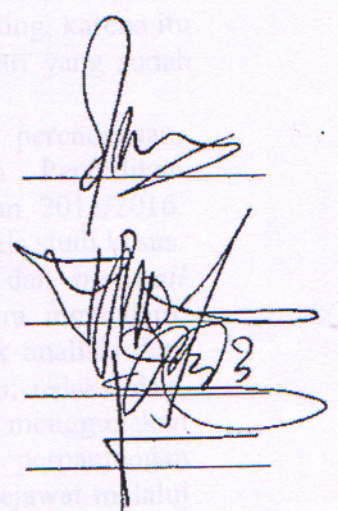


PENGESAHAN

Tesis dengan judul, "Manajemen Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember 2015/2016" ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana IAIN Jember pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. H. Faisol Nasar BM., MA.
2. Anggota :
 - a. Penguji Utama : Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd.
 - b. Penguji/ Pembimbing I : Dr. H. Mundir, M.Pd.
 - c. Penguji/Pembimbing II: Dr. Kasman, M.Fil.I.



Jember, 19 Oktober 2016

Mengesahkan

Pascasarjana IAIN Jember

Direktur,



Prof. Dr.H. Miftah Arifin, M.Ag
NIP. 19750103 199903 1 001

PERSETUJUAN


Tesis dengan judul, "Manajemen Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember 2015/2016" yang ditulis oleh Umi Nurhayati ini, telah distujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 22 Agustus 2016
Pembimbing I



Dr. H. Mundir, M.Pd.
NIP.19631103 199903 1 002

Jember, 22 Agustus 2016
Pembimbing II



Dr. Kasman, M.Fil.I
NIP. 19710426 199703 1 001

**MANAJEMEN PEMBELAJARAN
MATAKULIAH PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
DI JURUSAN TARBIYAH STAI AL-QODIRI
JEMBER 2015/2016**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I)



Oleh:

UMI NURHAYATI

NIM. 0849113090

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA IAIN JEMBER
OKTOBER 2016**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul, “Manajemen Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember 2015/2016” yang ditulis oleh Umi Nurhayati ini, telah distujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 19 Oktober 2016

Pembimbing I

Dr. H. Mundir, M.Pd.

NIP.19631103 199903 1 002

Jember, 19 Oktober 2016

Pembimbing II

Dr. Kasman, M.Fil.I

NIP. 19710426 199703 1 001

IAIN JEMBER

PENGESAHAN

Tesis dengan judul, “Manajemen Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember 2015/2016” ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana STAIN Jember pada hari _____ tanggal _____ dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. H. Faisol Nasar BM., MA. _____
2. Anggota :
 - a. Penguji Utama : Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd. _____
 - b. Penguji/ Pembimbing I : Dr. H. Mundir, M.Pd. _____
 - c. Penguji/Pembimbing II: Dr. Kasman, M.Fil.I. _____

Jember, 19 Oktober 2016

Mengesahkan

Proram Pascasarjana IAIN Jember

Direktur,

IAIN JEMBER

Prof. Dr.H. Miftah Arifin, M.Pd

NIP. 19750103 199903 1 001

ABSTRAK

Nurhayati, Umi, 2013. *Manajemen Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri*. Tesis Program Studi Pendidikan Islam Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Jember. Pembimbing I: Dr. H. Mundir, M.Pd. Pembimbing II: Dr. Kasman, M.Fil.I..

Kata Kunci: Manajemen Pembelajaran, Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan Antikorupsi (PAK) dilaksanakan di perguruan tinggi. PAK menjadi matakuliah tersendiri. PAK akan berjalan dengan baik, apabila menerapkan manajemen pembelajaran secara efektif dan efisien. Manajemen pembelajaran dalam matakuliah pendidikan antikorupsi sangat penting, karena itu akan mempermudah guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dari yang sudah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember Tahun 2015/2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan jenis studi kasus. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Prosedur pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam, teknik pengamatan peran serta, dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Milles dan Hunberman. yaitu; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Uji validitas data menggunakan kredibilitas data dengan lima teknik pencapaian, yaitu; perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dan pengecekan anggota.

Hasil penelitian: 1) dosen telah merumuskan perencanaan pembelajaran, yaitu: merumuskan KD dan Indikator, mendesain proses pembelajaran, menentukan partisipasi dosen, salah satu sarana dan prasana serta merumuskan evaluasi hasil pembelajaran dan pengembangan pembelajaran, 2) langkah-langkah perumusan pengorganisasian yaitu: menyediakan beberapa sarana dan prasana dan personel, mengelompokkan komponen pembelajaran, membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran, serta menetapkan prosedur pembelajaran, 3) pelaksanaannya dilaksanakan variatif dengan melaksanakan pendidikan di dalam dan di luar jam perkuliahan seperti salah satunya sosialisasi pendidikan antikorupsi ke MA dan SMK. Pelaksanaan pembelajaran berjalan secara aktif dengan menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Semua tahap pembelajaran mulai dari pra intruksional/pendahuluan, tahap intruksional/inti pembelajara, dan penutup sudah dijalankan dengan baik, dan 4) pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan dua langkah, yaitu: evaluasi hasil belajar maupun evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar berbentuk formatif maupun sumatif. Sedangkan pada tahap evaluasi proses pembelajaran, dosen matakuliah pendidikan antikorupsi juga telah melakukan dengan hasilnya berbentuk inovasi proses pembelajaran.

ABSTRAK

Nurhayati, Umi, 2013. *Manajemen Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri.* Tesis Program Studi Pendidikan Islam Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Jember. Pembimbing I: Dr. H. Mundir, M.Pd. Pembimbing II: Dr. Kasman, M.Fil.I..

The Teaching Management of Anti-Corruption Education Course in Tarbiyah Faculty of STAI Al-Qodiri.

Keywords: teaching management, anti-corruption education

Anti-Corruption Education (ACE) is implemented in higher educations. ACE is a standalone course. ACE will run well if it applies teaching management effectively and efficiently. The teaching management in ACE course is important because it eases teachers to achieve the learning goals which have already set.

This research aims to describe the plan, organization, implementation and evaluation of Anti-Corruption Education course in Tarbiyah Faculty of STAI Al-Qodiri Jember in academic year of 2015/2016. This research used qualitative method and was designed in study case. The informants was determined by purposive and snowball sampling techniques. Data was obtained from a depth interview, observation and documentation. The obtained data was then analyzed using the interactive model of Miles and Huberman: data reduction, data displays and conclusion drawing or verifying. The data validity was determined by five techniques such as the extension of participation, the persistence of observation, triangulation, peer assessment through discussion and checking by the members.

The research findings show that: 1) teachers design the lesson plans based on SK, KD and indicators, design teaching process, determine teachers' participation and teaching aids, and design the evaluation of learning outcomes and development, 2) the steps to formulate the organization are: providing facilities and personals, grouping learning components, setting the structure of authority and the mechanism of teaching coordination, and determining teaching procedures, 3) the course is implemented variously by providing education both in and out of course time schedule such as socializing ACE to senior high schools (MA and SMK). The teaching was actively carried out in student centered learning. All teaching stages run effectively from opening activities, main activities until closing activities, and 4) the evaluation is taken in two steps: the evaluation of learning outcomes and the evaluation of learning process. The evaluation of learning outcomes is formative and summative. Meanwhile, as a result of the evaluation of learning process, the teachers of ACE course have been doing some innovations in the teaching process.

مستخلص البحث

أمي نور حياتي، ٢٠١٣. الإدارة التعليمية لمادة تعليم مكافحة الفساد في قسم التربية بالجامعة القادري الإسلامية. (البحث في برنامج التعليم الإسلامي شعبة إدارة التعليم الإسلامي، الجامعة الحكومية الإسلامية جمبر). المشرف الأول: الدكتور الحاج منذر و الماجستير المشرف الثاني: الدكتور كسمن الماجستير.

الكلمة الأساسية: الإدارة التعليمية، مادة تعليم مكافحة الفساد.

تعد مادة تعليم مكافحة الفساد إحدى المواد في الجامعة وسوف تكون المادة الحسنة إذا كانت مع تنفيذها الإدارة التعليمية الفعالية لأن بها يسهل الأساتيد للوصول إلى أهداف التعليم المرجو والمقرر. يهدف هذا البحث لوصف التخطيط و التنظيم و التنفيذ و التقويم في مادة تعليم مكافحة الفساد شعبة التربية بجامعة القادري الإسلامية جمبر السنة الدراسية ٢٠١٥/٢٠١٦. وهذا البحث من نوع البحث الكيفي بتخطيط دراسات الحالة، ويعين المخبر بأخذ العينات هادفة و أخذ العينات متعاطمة. وأما طريقة جمع البيانات فبالمقابلة الدقيقة و الملاحظة و الوثائقية. وأما تحليل البيانات الذي استخدمته الباحثة فهو تحليل البيانات من مليس و هوبيرمان (*Miles & Huberman*). وأما صحة البيانات التي استخدمته الباحثة فهو بخمس الطرق الإنجازية وهي المشاركة و المراقبة و التثليث و التقويم بالمناقشة و تفويض الأعضاء. وأما نتيجة هذا البحث فهي: (١) لقد نظم الأساتيد تخطيط التعليم بالتوفير المقرر وهو صيغة معايير الكفاءة و الكفاءة الأساسية و الدلالة، و تصميم عملية التعليم، و تحديد مشاركة الأساتيد و الوسائل التعليمية، و صيغة التقويم و تطوير التعليم. (٢) خطوات صيغة التنظيم هي إعداد الوسائل التعليمية و الأشخاص ثم تنظيم العناصر التعليمية ثم تشكيل هيكل السلطانية و تقنية التنسيق التعليمي ثم توفير الإجراءات العلمية. (٣) التنفيذ متنوع إما أن يكون في خارج الحصة أو في الحصة نفسها كمثل التنشئة الإجتماعية بمادة مكافحة الفساد في المدرسة العالية و المدرسة الأهلية. يكون التنفيذ فعالية بتركيز التعليم إلى أن الطلاب هو مركز تعليمي. و لقد تجري بجيد إجراءات التعليمية كلها من المقدمة و المحتويات حتى الإختتام. (٤)

يجري التقويم بإجراءتين تقويم التعليم و تقويم عملية التعليم. وأما تقويم التعليم فيكون معياريا و تلخيصيا،
وأما تقويم عملية التعليم كما فعله أستاذ مادة مكافحة الفساد فيكون إبتكار عملية التعليم.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga tesis dengan judul “Manajemen Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember 2015/2016” ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do'a *jazaakumullahu ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan tesis/disertasi ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Jember yang telah memberikan motivasi dan kebijakan yang baik dalam penyusunan tesis.
3. Dr. H. Mundir, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
4. Dr. Kasman, M.Fil.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan

dengan lancar sampai selesai.

5. Seluruh Dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
6. H. Asmad Hanisy, S.Pd.I, MM., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Qodiri Jember yang telah bersedia memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian.
7. Bapak dan ibu dosen, mahasiswa dan seluruh civitas akademika STAI Al-Qodiri Jember yang telah berkenan untuk berkerja sama dan memberikan data dan informasi penelitian dalam penyusunan tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana IAIN Jember yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya tesis ini.

Semoga penyusunan Tesis/disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 19 Oktober 2016

Umi Nurhayati

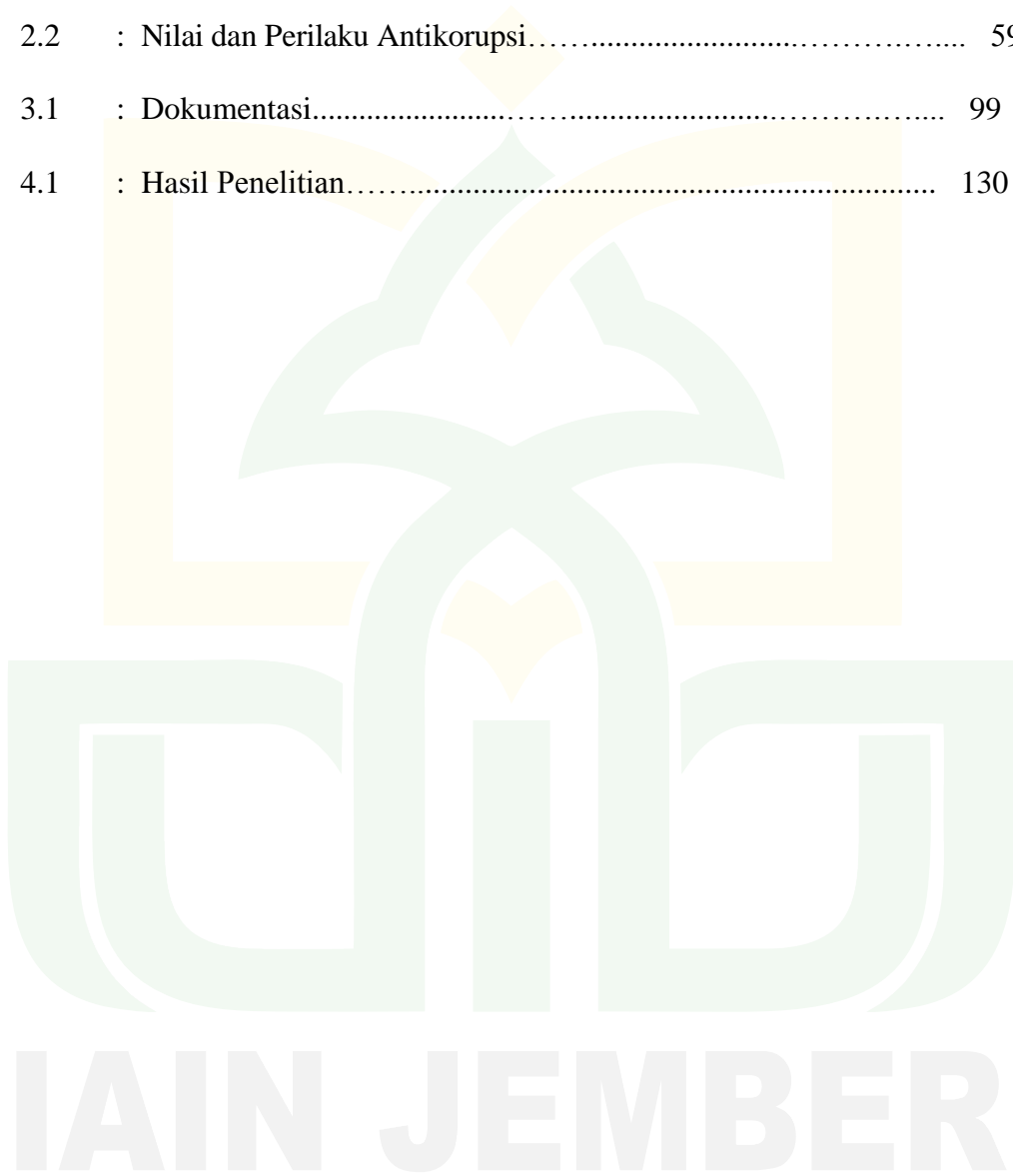
DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Abstrak Indonesia	iv
Abstrak Bahasa Inggris	v
Abstrak Bahasa Arab	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Pedoman Transliterasi	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi operasional	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	17

BAB III METODE PENELITIAN	91
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	91
B. Lokasi Penelitian	93
C. Kehadiran peneliti.....	93
D. Subjek Penelitian	96
E. Sumber Data	96
F. Teknik Pengumpulan Data	98
G. Analisa Data	102
H. Ujin Keabsahan Data	103
I. Tahapan-Tahapan Penelitian	105
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	108
A. Paparan Data dan Analisis.....	108
B. Hasil Penelitian.....	122
BAB V PEMBAHASAN	137
A. Perencanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi.....	137
B. Pengorganisasian Matakuliah Pendidikan Antikorupsi.....	145
C. Pelaksanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi.....	149
D. Evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi.....	160
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	167
A. Kesimpulan	167
B. Saran-saran	170
DAFTAR RUJUKAN	171
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 : Nilai-nilai Acuan dalam Pendidikan Antikorupsi.....	57
2.2 : Nilai dan Perilaku Antikorupsi.....	59
3.1 : Dokumentasi.....	99
4.1 : Hasil Penelitian.....	130



DAFTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	‘	koma di atas	ط	t}	te dg titik di bawah
2	ب	B	be	ظ	z	Zed
3	ت	T	te	ع	‘	koma di atas terbalik
4	ث	Th	te ha	غ	gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	f	Ef
6	ح	h}	ha dg titik di bawah	ق	q	Qi
7	خ	Kh	ka ha	ك	k	Ka
8	د	D	De	ل	l	El
9	ذ	Dh	de ha	م	m	Em
10	ر	R	Er	ن	n	En
11	ز	Z	Zed	و	w	We
12	س	S	Es	ه	h	ha
13	ش	Sh	es ha	ء	‘	Koma di atas
14	ص	s}	es dg titik di bawah	ي	y	es dg titik di bawah
15	ض	d}	de dg titik di bawah	-	-	de dg titik di bawah

IAIN JEMBER